

PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN DALAM PENDEKATAN KESEJAHTERAAN

**(STUDI DI KECAMATAN ENTIKONG, KABUPATEN SANGGAU,
PERBATASAN KALIMANTAN BARAT-MALAYSIA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Ujian Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

**NOOR ALVILAILI
NIM 145030100111018**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2018**



MOTTO

**“PENDIDIKAN MERUPAKAN SENJATA
PALING AMPUH YANG BISA KAMU
GUNAKAN UNTUK MERUBAH DUNIA”**

(Nelson Mandela)

*“Do the best, be good, then you will be
the best”*



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengelolaan Ekonomi Kawasan Perbatasan Dalam Pendekatan Kesejahteraan (Studi di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia)

Disusun oleh : Noor AlviLaili

NIM : 145030100111018

Fakultas : Ilmu Administrasi

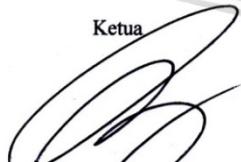
Jurusan : Administrasi Publik

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

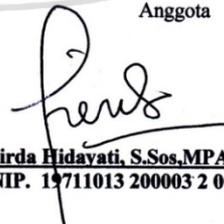
Malang, 19 April 2018

Komisi Pembimbing

Ketua


Prof. Dr. Agus Suryono, MS.
NIP. 16521229 197903 1 003

Anggota


Firda Hidayati, S.Sos, MPA, DPA
NIP. 19711013 200003 2 001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 19 April 2018
Mahasiswa



Nama : Noor AlviLaili
NIM : 145030100111018



TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Mei 2018

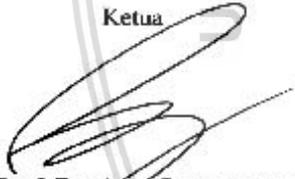
Jam : 08.00-09.00

Skripsi atas Nama : Noor Alvi Laili

Judul : **Pengelolaan Kawasan Perbatasan Dalam Pendekatan Kesejahteraan (Studi di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia)**

Dan dinyatakan **LULUS**

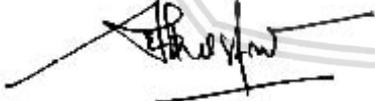
Ketua


Prof. Dr. Agus Suryono, MS
NIP. 19521229 197903 1 003

Anggota


Firda Hidayati, S.Sos, MPA, DPA
NIP. 19711013 200003 2 001

Anggota


I Gede Eko Putra Sri Sentanu, S.AP., M.AP., Ph.D
NIP. 2011078312041000

Anggota

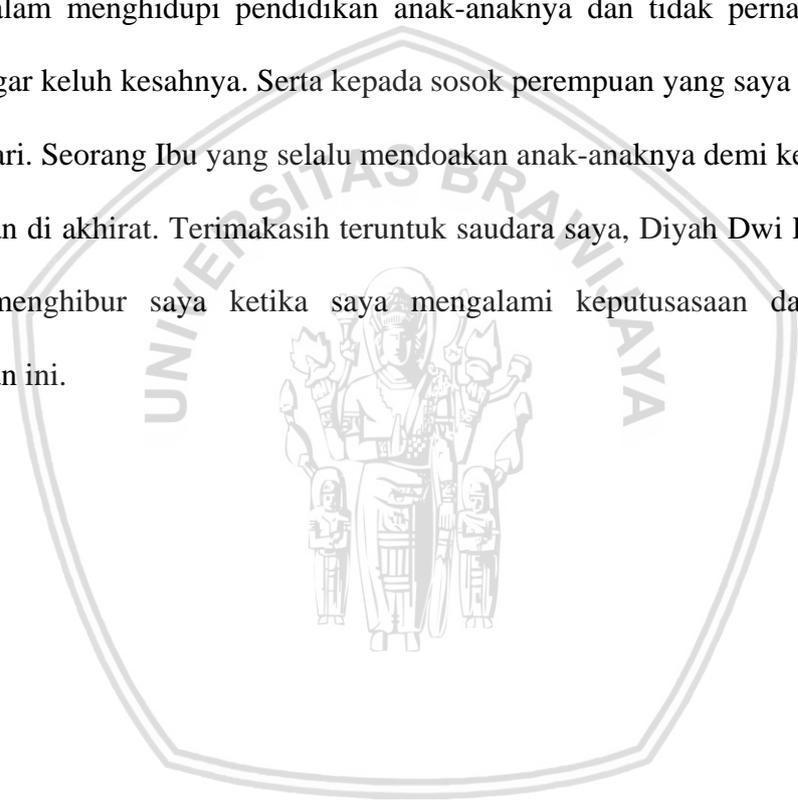

Trisnawati, S.Sos., M.AP
NIP. 19800307 200801 2 012





HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, atas kehendak dan pertolongan Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis dalam setiap langkah pengerjaan skripsi ini. Saya mempersembahkan skripsi ini kepada Sang Inspirator dalam hidup saya, Bapak Pardi. Kepada beliau yang selalu bekerja keras dalam menghidupi pendidikan anak-anaknya dan tidak pernah sekalipun mendengar keluh kesahnya. Serta kepada sosok perempuan yang saya kagumi, Ibu Sri Lestari. Seorang Ibu yang selalu mendoakan anak-anaknya demi kesuksesan di dunia dan di akhirat. Terimakasih teruntuk saudara saya, Diyah Dwi Lestari yang selalu menghibur saya ketika saya mengalami keputusasaan dalam proses penelitian ini.



Summary

Noor Alvi Laili. 2018. Management of Border Areas in Prosperity Approach (Study at Entikong District, Sanggau Regency, West Borneo-Malaysia). Chairman of Supervising Commission: Prof. Dr. Agus Suryono, MS. Member of Supervising Commission: Firda Hidayati, S.Sos., MPA, DPA. 161 hal+xvii.

The welfare issue of people living on the border so far has not received serious attention from the government. Poverty and human backwardness in the border region still occur. This can be seen from the lack of infrastructure, social and economic. The Government of Indonesia implements a new paradigm in the management of the land border region by combining a security approach and prosperity approach.

This research was conducted in Entikong District, Sanggau District, West Kalimantan Province. Entikong Sub-district is directly adjacent to Sarawak, Malaysia. This study aims to determine and explain the steps of welfare approach that has been done in the management of border areas in Entikong District. This study uses indicators of welfare by the Badan Pusat Statistik to analyze whether the community has achieved prosperity through the prosperity approach.

The type of research used in this research is descriptive with qualitative approach. The data source of this study uses primary data derived from informants (local government and community) as well as secondary data.

The results show that the society has not reached its welfare. The management of border areas that have not been optimal to make the border community difficulties in meeting the needs of life and get a decent social service. The inhibiting factors are also a constraint to the implementation of the welfare approach undertaken by the government in Entikong District.

Keywords: Border Area Management, Prosperity Approach

Summary

Noor Alvi Laili. 2018. Management of Border Areas in Prosperity Approach (Study at Entikong District, Sanggau Regency, West Borneo-Malaysia). Chairman of Supervising Commission: Prof. Dr. Agus Suryono, MS. Member of Supervising Commission: Firda Hidayati, S.Sos., MPA, DPA. 161 hal+xvii.

The welfare issue of people living on the border so far has not received serious attention from the government. Poverty and human backwardness in the border region still occur. This can be seen from the lack of infrastructure, social and economic. The Government of Indonesia implements a new paradigm in the management of the land border region by combining a security approach and prosperity approach.

This research was conducted in Entikong District, Sanggau District, West Kalimantan Province. Entikong Sub-district is directly adjacent to Sarawak, Malaysia. This study aims to determine and explain the steps of welfare approach that has been done in the management of border areas in Entikong District. This study uses indicators of welfare by the Badan Pusat Statistik to analyze whether the community has achieved prosperity through the prosperity approach.

The type of research used in this research is descriptive with qualitative approach. The data source of this study uses primary data derived from informants (local government and community) as well as secondary data.

The results show that the society has not reached its welfare. The management of border areas that have not been optimal to make the border community difficulties in meeting the needs of life and get a decent social service. The inhibiting factors are also a constraint to the implementation of the welfare approach undertaken by the government in Entikong District.

Keywords: Border Area Management, Prosperity Approach

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Kawasan Perbatasan Dalam Pendekatan Kesejahteraan (Studi di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

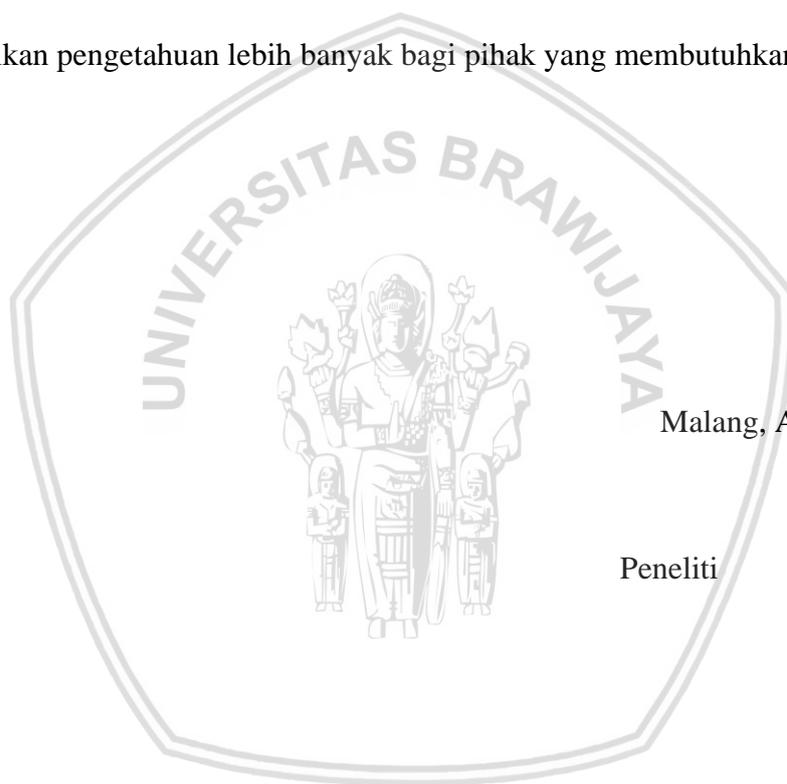
1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi
4. Bapak Prof. Dr. Agus Suryono, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan waktu, arahan, dan bimbingan hingga terselesainya skripsi ini

5. Ibu Firda Hidayati, S.Sos., MPA, DPA selaku Anggota Komisi Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan waktu, arahan, dan bimbingan hingga terselesainya skripsi ini
6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Administrasi Publik atas ilmu dan nasehat yang telah diberikan kepada peneliti selama perkuliahan
7. Seluruh narasumber yang telah memberikan banyak informasi terkait data yang dibutuhkan peneliti
8. Kedua orangtua saya Bapak Pardi dan Ibu Sri Lestari yang sangat saya cintai dan saudara perempuan saya Diyah Dwi Lestari yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
9. Keluarga ku Mbak Ningsih dan Om Halim yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penelitian
10. Teman-teman kos ku Dwi Nur Intan Sari, Kiki Tazkhiya Amira, Inas Arfieny, dan Siti Lukmana yang telah berbaik hati membantu dan tak pernah bosan memberi semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini
11. Sahabat-sahabat seperjuangan bimbingan Ayang, Anggi, Adiba, Willa, Irfan, Ruth, dan Boyo yang tidak pernah mengeluh dan sama-sama berjuang demi mendapatkan hasil terbaik dalam penulisan skripsi.
12. Terima kasih teman-teman magang ku yang receh Ayang, Dea, Ery
13. Terima kasih SM, YG, JYP, dan Big Hit yang selalu menemani saya mengerjakan skripsi dengan lagu-lagunya

14. Teman-teman Fakultas Ilmu Administrasi angkatan 2014 yang telah banyak membantu peneliti dalam menyusun skripsi ini

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan doanya.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat memberikan pengetahuan lebih banyak bagi pihak yang membutuhkan.



Malang, April 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

COVER	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
Ringkasan	Error! Bookmark not defined.
Summary.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR.....	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Kontribusi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Ekonomi Kawasan Perbatasan	Error!
Bookmark not defined.	
1. Konsep dan Klasifikasi Wilayah.....	Error! Bookmark not defined.
2. Pengembangan Wilayah Dalam Kawasan Perbatasan.....	Error!
Bookmark not defined.	
3. Pengelolaan Kawasan Perbatasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	Error! Bookmark not defined.
B. Pendekatan Kesejahteraan Dalam Kawasan Perbatasan	Error!
Bookmark not defined.	
1. Konsep Pendekatan Kesejahteraan	Error! Bookmark not defined.
2. Langkah-Langkah Melakukan Pendekatan Kesejahteraan	Error!
Bookmark not defined.	
a. Identifikasi potensi ekonomi	Error! Bookmark not defined.
b. Pembangunan Infrastruktur	Error! Bookmark not defined.
c. Integrasi Ekonomi	Error! Bookmark not defined.
d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Error! Bookmark not defined.
defined.	
e. Mengoptimalkan Peran Kelembagaan	Error! Bookmark not defined.
defined.	
C. Kesejahteraan	Error! Bookmark not defined.



1. Konsep Kesejahteraan **Error! Bookmark not defined.**
 2. Indikator Kesejahteraan Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)... **Error! Bookmark not defined.**
- D. Pemerintah Daerah **Error! Bookmark not defined.**

- BAB III METODE PENELITIAN** **Error! Bookmark not defined.**
- A. Jenis Penelitian **Error! Bookmark not defined.**
 - B. Fokus Penelitian **Error! Bookmark not defined.**
 - C. Lokasi dan Situs Penelitian **Error! Bookmark not defined.**
 - D. Jenis dan Sumber Data **Error! Bookmark not defined.**
 - E. Teknik Pengumpulan Data **Error! Bookmark not defined.**
 - F. Instrumen Penelitian **Error! Bookmark not defined.**
 - G. Analisis Data **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... **Error! Bookmark not defined.**

- A. Gambaran Umum Lokasi **Error! Bookmark not defined.**
 1. Gambaran Umum Kabupaten Sanggau..... **Error! Bookmark not defined.**
 2. Gambaran Umum Kecamatan Entikong..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Penyajian Data..... **Error! Bookmark not defined.**
 1. Pengelolaan Ekonomi Kawasan Perbatasan Dalam Pendekatan Kesejahteraan **Error! Bookmark not defined.**
 - a. Identifikasi potensi ekonomi berbasis komoditas unggulan melalui kriteria-kriteria komoditas unggulan, yakni:..... **Error! Bookmark not defined.**
 - b. Pembangunan Infrastruktur **Error! Bookmark not defined.**
 - c. Integrasi Ekonomi..... **Error! Bookmark not defined.**
 - d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)..... **Error! Bookmark not defined.**
 - e. Peran Kelembagaan..... **Error! Bookmark not defined.**
 2. Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Ekonomi Kawasan Perbatasan Dalam Pendekatan Kesejahteraan **Error! Bookmark not defined.**
 - a. Faktor Pendukung **Error! Bookmark not defined.**
 - 1) Faktor Internal **Error! Bookmark not defined.**
 - 2) Faktor Eksternal..... **Error! Bookmark not defined.**
 - b. Faktor Penghambat **Error! Bookmark not defined.**
 - 1) Faktor Internal **Error! Bookmark not defined.**
 - 2) Faktor Eksternal..... **Error! Bookmark not defined.**
 - C. Pembahasan **Error! Bookmark not defined.**



1. Konsep Pendekatan Kesejahteraan Melalui Pengembangan Ekonomi
Error! Bookmark not defined.
 - a. Identifikasi Potensi Ekonomi Berbasis Komoditas Unggulan Melalui Kriteria-Kriteria Komoditas Unggulan....**Error! Bookmark not defined.**
 - b. Pembangunan Infrastruktur**Error! Bookmark not defined.**
 - c. Integrasi Ekonomi**Error! Bookmark not defined.**
 - d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia **Error! Bookmark not defined.**
 - e. Mengoptimalkan Peran Kelembagaan **Error! Bookmark not defined.**
2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Kawasan Perbatasan Dalam Pendekatan Kesejahteraan**Error! Bookmark not defined.**
 - a. Faktor Pendukung**Error! Bookmark not defined.**
 - 1) Faktor Internal**Error! Bookmark not defined.**
 - 2) Faktor Eksternal.....**Error! Bookmark not defined.**
 - b. Faktor Penghambat**Error! Bookmark not defined.**
 - 1) Faktor Internal**Error! Bookmark not defined.**
 - 2) Faktor Eksternal.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB VKESIMPULAN DAN SARAN.....**Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA**Error! Bookmark not defined.**





DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Jenis-Jenis Komoditas dan Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan	Error! Bookmark not defined.
2	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian di Kecamatan	Error! Bookmark not defined.
3	Banyaknya Gedung Sekolah di Kecamatan Entikong Menurut Desa Tahun 2016	Error! Bookmark not defined.
4	Sarana/Prasarana Kesehatan di Kecamatan Entikong Tahun 2016	Error! Bookmark not defined.
5	Batas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sanggau	Error! Bookmark not defined.
6	Luas Wilayah Kabupaten Sanggau Menurut Tiap Kecamatan	Error! Bookmark not defined.
7	Penduduk Kabupaten Sanggau Menurut Kecamatan dan Jenis	Error! Bookmark not defined.
8	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sanggau Tahun 2015	Error! Bookmark not defined.
	Luas Wilayah Entikong Menurut Desa Tahun 2016	Error! Bookmark not defined.
10	Nama-nama Desa dan Dusun di Kecamatan Entikong	Error! Bookmark not defined.
11	Jarak Jalan Darat Antara Kantor Camat Dengan Kantor Desa dan Jenis Sarana Transportasi dalam Kecamatan Entikong	Error! Bookmark not defined.
12	Keadaan Perjalanan Menuju Desa-Desa di Kecamatan Entikong	Error! Bookmark not defined.
13	Sarana Transportasi Perjalanan Desa di Kecamatan Entikong	Error! Bookmark not defined.
	Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Entikong Menurut Desa Tahun 2016	Error! Bookmark not defined.
15	Penggunaan Lahan di Kecamatan Entikong Tahun 2016 (Hektar)	Error! Bookmark not defined.
16	Banyaknya Pelanggan, Air yang Disalurkan dan Nilai Penjualan di Kecamatan Entikong	Error! Bookmark not defined.
17	Jumlah Warga Negara Malaysia dan Warga Negara Indonesia yang Melalui PPLB Entikong Tahun 2016	Error! Bookmark not defined.
18	Jumlah Keberangkatan dan Kedatangan Melalui PPLB Entikong Dirinci Menurut Kebangsaan Tahun 2016 (Orang)	Error! Bookmark not defined.
19	Jenis-Jenis dan Jumlah Gedung di ULKI Entikong	Error! Bookmark not defined.
20	Jumlah Ruang Kelas Tiap Kejuruan ULKI Entikong	Error! Bookmark not defined.





DAFTAR GAMBAR

No	JudulHalaman
1	Peta Kabupaten Sanggau Error! Bookmark not defined.
2	Persentase Luas Wilayah Kabupaten Sanggau Error! Bookmark not defined.
3	Peta Kecamatan Entikong Error! Bookmark not defined.
4	Sosialisasi Kepabeanan Error! Bookmark not defined.
5	Jumlah Produsen Lada Tahun 2014-2016..... Error! Bookmark not defined.
6	Tingkat Produksi Lada di Kecamatan Error! Bookmark not defined.
7	Tingkat Produksi Lada di Kecamatan..... Error! Bookmark not defined.
8	Kopi Lada Hitam Khas Entikong Error! Bookmark not defined.
9	Ketersediaan Lahan Perkebunan Lada di..... Error! Bookmark not defined.
10	Penyerapan Tenaga Kerja Perkebunan Lada. Error! Bookmark not defined.
11	Bangunan PLBN Entikong Tampak Depan..... Error! Bookmark not defined.
13	Halaman PLBN Entikong..... Error! Bookmark not defined.
14	PLBN Entikong Tampak Samping..... Error! Bookmark not defined.
15	Ruang Detensi PLBN Entikong Error! Bookmark not defined.
16	Jalan Perbatasan di Kecamatan Entikong..... Error! Bookmark not defined.
17	Jalan Paerbatasan Entikong Error! Bookmark not defined.
18	Jembatan Menuju Desa Suruh Tembawang ... Error! Bookmark not defined.
19	Jalan Menuju Desa Suruh Tembawang..... Error! Bookmark not defined.
21	Masyarakat yang Berjalan Kaki Melewati Jalan Desa.... Error! Bookmark not defined.
23	Pembangunan <i>Dry Port</i> di Perbatasan Entikong..... Error! Bookmark not defined.
24	Lokasi Pembangunan <i>Dry Port</i> Entikong..... Error! Bookmark not defined.
25	Buku Pas Barang Lintas Batas Masyarakat Error! Bookmark not defined.
27	Gula Pasir Kasar Malaysia di Pasar Error! Bookmark not defined.
2	Produk Susu Malaysia di Pasar Entikong Error! Bookmark not defined.
29	Beras Tulip Produk Malaysia di Pasar Entikong Error! Bookmark not defined.
30	Produk Gas Malaysia di Pasar Entikong..... Error! Bookmark not defined.
32	Salah Satu Kendaraan Sedang Diperiksa Pihak Error! Bookmark not defined.
33	Halaman ULKI Kecamatan Entikong..... Error! Bookmark not defined.
34	Bangunan ULKI Kecamatan Entikong Error! Bookmark not defined.
35	Asrama Putra dan Putri ULKI Entikong..... Error! Bookmark not defined.
37	Ruang Bursa Kerja ULKI Entikong Error! Bookmark not defined.
38	Formulir Registrasi Pencari Kerja ULKI Entikong Error! Bookmark not defined.
39	Formulir Pendaftaran Pelatihan Online ULKI Error! Bookmark not defined.
41	Peserta Pelatihan Teknik Las..... Error! Bookmark not defined.



- 42Peserta Pelatihan Tata Kecantikan Rambut **Error! Bookmark not defined.**
- 43 Prajurit TNI bersama Tentara Diraja Malaysia **Error! Bookmark not defined.**
- 44TNI dan Tentara Diraja Malaysia Melakukan **Error! Bookmark not defined.**
- 46Salah Satu Patok Perbatasan yang Rusak..... **Error! Bookmark not defined.**
- 48Seorang TNI Sedang Mengajar Ngaji Anak-Anak..... **Error! Bookmark not defined.**
- 49TNI Sedang Mengajar di Salah Satu Sekolah di **Error! Bookmark not defined.**
- 50Banyaknya Siswa SD, SMP, SMA yang Lulus Tahun ... **Error! Bookmark not defined.**



LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur**Error!**
Bookmark not defined.
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Bakesbangpol Kabupaten Sanggau.....**Error!**
Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki pulau besar dan pulau kecil yang banyak. Eksistensinya sebagai negara kepulauan diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982). Hal ini mengakibatkan cukup banyak wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara lain atau negara asing (Muta'ali., 2014: 1). Menurut Undang-Undang No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara kawasan atau wilayah perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, perbatasan berada di kecamatan. Kawasan perbatasan dikelompokkan menjadi empat tipe menurut Martinez (dalam Hasyim dan Subagiyo, 2017: 4-5). Pertama, *alienated borderland* yaitu suatu wilayah perbatasan yang banyak terjadi perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik sehingga tidak adanya aktivitas lintas batas. Kedua, *coexistent borderland* yang mana wilayah perbatasan tersebut terdapat konflik batas tetapi bisa ditekan sampai pada tingkat yang dapat dikendalikan walaupun muncul persoalan yang penyelesaiannya berkaitan dengan kepemilikan sumber daya alam yang strategis. Ketiga, *interdependent borderland* yang berarti

secara simbolik wilayah perbatasan dikedua sisinya dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil. Keempat, *integrated borderland* yaitu suatu wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya menjadi satu kesatuan, nasionalisme yang jauh menyurut dikedua negara tersebut, dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat.

Secara administratif, kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia meliputi dua provinsi, yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Pada dasarnya garis batas darat antara Indonesia dengan Malaysia di Kalimantan berupa garis batas alamiah (punggung gunung) yang mengikuti garis pemisah air (*watershed*), dimulai dari pantai timur di Selat Sekapal (Kalimantan Timur-Sabah) ke arah barat sampai Tanjung Datu di pantai barat (Kalimantan Barat-Serawak). Pada tempat-tempat tertentu seperti Pulau Sebatik, garis batas dengan sistem Astronomi membagi dua pulau berupa garis lintang $4^{\circ}10'LU$ (Lintang Utara). Cakupan wilayah administrasi di Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi lima kabupaten dan terdapat lima belas kecamatan yang berbatasan langsung dengan Serawak. Malaysia mempunyai panjang batas ± 966 km. Sedangkan untuk wilayah administrasi di Provinsi Kalimantan Timur meliputi tiga kabupaten dan terdapat sebelas kecamatan yang berbatasan langsung dengan Serawak dan Sabah, Malaysia, memiliki panjang batas ± 1038 km. Secara umum letak geografis wilayah perbatasan sebagian besar merupakan daerah bergelombang diantara bukit-bukit, di bagian tengah hingga wilayah utara kabupaten Malinau medan berbukit-bukit terjal, dan hanya sebagian kecil daerah yang relatif datar. Bentangan kawasan perbatasan di Kalimantan yang panjang dan cukup luas

dengan kondisi medan yang variatif mengakibatkan penanganan kawasan ini menghadapi tantangan kendala yang cukup berat dalam penyediaan sumber daya pendanaan maupun kemampuan sumber daya manusia (SDM) (Madu et al., 2010 : 120).

Setiap kawasan perbatasan memiliki karakteristiknya masing-masing dengan potensi yang berbeda. Di masa lalu, kawasan perbatasan di Indonesia diawasi secara ketat karena dianggap banyak pemberontak yang memanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Akibatnya, sebagian besar kawasan perbatasan tidak tersentuh oleh dinamika pembangunan. Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan perbatasan juga umumnya miskin dan lebih berorientasi ke negara tetangga. Sementara, Malaysia sebagai negara tetangga telah membangun pusat-pusat pertumbuhan dan koridor perbatasannya melalui berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan sehingga pemerintah maupun masyarakatnya mendapat keuntungan dari pembangunan yang dilakukan (Muta'ali et al., 2014: 2-3).

Kawasan perbatasan merupakan salah satu kawasan strategis, yaitu kawasan yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, ditinjau dari berbagai sudut kepentingan (politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan pertahanan keamanan). Pengelolaan perbatasan tidak lagi dipandang hanya sebagai bagian terbelakang dari suatu wilayah negara, tetapi juga dijadikan sebagai “beranda depan”. Upaya yang dilakukan pemerintah salah satunya adalah menjadikan perbatasan sebagai semula cenderung berorientasi “*inward looking*” dalam arti melihat perbatasan negara hanya sebagai wilayah pertahanan yang sudah semestinya dijaga secara militeristik menjadi “*outward looking*”. *Outward*

looking merupakan suatu strategi pembangunan kawasan perbatasan yang lebih berorientasi pada potensi pasar dan pusat-pusat pertumbuhan yang ada di kawasan cepat tumbuh di kawasan negara tetangga (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2010).

Menurut Undang-Undang No. 43/2008 tentang Wilayah Negara, kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak di sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Wilayah negara didefinisikan sebagai salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Sementara itu, pengelolaan kawasan perbatasan didefinisikan sebagai segala upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengelola batas kedaulatan kawasan, memanfaatkan sumber daya alam, dan menjaga keutuhan kawasannya baik darat, laut maupun udara (Raharjo, 2013: 73).

Beberapa peraturan mengenai pengelolaan perbatasan, antara lain Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan No. 1 Tahun 2011 Tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025. Ada tiga pendekatan yang digunakan untuk mengelola kawasan perbatasan sebagaimana yang tercantum dalam *Grand Design* Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-

2025, yaitu pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*), pendekatan keamanan (*security approach*), dan pendekatan lingkungan (*environment approach*). Pendekatan kesejahteraan adalah upaya yang dilakukan melalui pengembangan kegiatan ekonomi dan perdagangan yang berbasis komoditas unggulan masing-masing kawasan perbatasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pendekatan keamanan menganggap kawasan perbatasan sebagai kawasan yang bersebelahan langsung dengan negara lain.

Pengelolaan perbatasan tidak lagi dipandang hanya sebagai bagian terbelakang dari suatu wilayah negara, tetapi juga dijadikan sebagai “beranda depan”. Upaya yang dilakukan pemerintah salah satunya adalah menjadikan perbatasan sebagai semula cenderung berorientasi “*inward looking*” dalam arti melihat perbatasan negara hanya sebagai wilayah pertahanan yang sudah semestinya dijaga secara militeristik (*security approach*) menjadi “*outward looking*” yang berarti menganggap NKRI sebagai suatu entitas yang memiliki elemen kedaulatan berupa wilayah dan penduduk yang wajib dilindungi. *Outward looking* merupakan suatu strategi pembangunan kawasan perbatasan yang lebih berorientasi pada potensi pasar dan pusat-pusat pertumbuhan yang ada di kawasan cepat tumbuh di kawasan negara tetangga (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2010).

Kecamatan Entikong merupakan salah satu kawasan perbatasan yang terletak di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Entikong berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak, Malaysia Timur. Entikong dianggap memiliki nilai strategis sebab Entikong mempunyai beberapa komoditas unggulan mulai

dari pertanian, perkebunan, hingga peternakan. Tetapi, hanya beberapa saja yang telah berhasil memasuki pasar ekspor ke negara tetangga, khususnya Malaysia. Ely (dalam Laini et al., 2016: 2) menjelaskan komoditas unggulan adalah komoditi potensial yang dipandang dapat dipersaingkan dengan produk sejenis di daerah lain, karena selain memiliki keunggulan komparatif juga memiliki efisiensi usaha yang tinggi. Muta'ali et al., (dalam Muta'ali et al., 2014: 112) mendefinisikan komoditas unggulan sebagai komoditas andalan yang memiliki keunggulan kompetitif, karena telah memenangkan persaingan dengan produk sejenis di daerah lain. Keunggulan kompetitif dapat muncul karena efisiensi produksi yang tinggi akibat posisi tawar yang tinggi, baik terhadap pemasok, pembeli, serta daya saingnya yang tinggi terhadap pesaing dan pendatang yang baru maupun barang substitusi.

Entikong memiliki beberapa komoditas lokal yang diunggulkan, tetapi komoditi yang diekspor dari daerah Entikong ke Sarawak merupakan hasil-hasil pertanian yang masih dalam bentuk mentah. Hasil-hasil pertanian yang diekspor dalam bentuk mentah seperti lada, kakao, kacang tanah, karet, jagung, sayur-sayuran dan buah-buahan. Dari sekian banyak jenis hasil pertanian yang diekspor ke negara tetangga, lada merupakan produk lokal unggulan masyarakat setempat. Daerah Entikong memang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil lada berkualitas di Indonesia.

Entikong memiliki beberapa komoditas lokal yang diunggulkan, tetapi komoditi yang diekspor dari daerah Entikong ke Sarawak merupakan hasil-hasil pertanian yang masih dalam bentuk mentah. Hasil-hasil pertanian yang diekspor

dalam bentuk mentah seperti lada, kakao, kacang tanah, karet, jagung, sayur-sayuran dan buah-buahan. Dari sekian banyak jenis hasil pertanian yang diekspor ke negara tetangga, lada merupakan produk lokal unggulan masyarakat setempat. Daerah Entikong memang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil lada berkualitas di Indonesia. Kecamatan Entikong merupakan penghasil lada terbesar kedua di Kabupaten Sanggau, sehingga masyarakat di daerah ini pada umumnya menandalkan hidup mereka dari perkebunan lada. Hal ini menyebabkan komoditas lada sangat mendominasi aktivitas ekonomi kawasan di daerah perbatasan tersebut. Misalnya, pada Mei 2017 tercatat ekspor lada sebesar Rp 2.167.200.000,00. Kemudian, ekspor lada naik menjadi Rp 4.017.300.000,00 pada Juni 2017 (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dalam detik news, 2017).

Adanya perhatian yang lebih terhadap komoditas unggulan di Entikong diharapkan memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap kesejahteraan masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi dan perdagangan di kawasan perbatasan tersebut. Ada beberapa konsep efek pengganda, antara lain setiap transaksi ekonomi memiliki nilai tambah terhadap produk bruto sehingga keterkaitan ekonomi dan interaksi antar sektor berperan penting dan uang yang digunakan sebagai alat penukar dapat digunakan berkali-kali untuk melakukan berbagai transaksi (Setiono, 2011: 176). Aktivitas ekonomi di Entikong banyak didukung dari sektor pertanian, terutama bahan pangan dan perkebunan. Perkebunan yang ada merupakan perkebunan swasta maupun perkebunan yang

dikelola dan diolah sendiri oleh masyarakat. Komoditas yang berasal dari perkebunan antara lain sawit, karet, kakao, lada, kopi, dan cokelat.

Tabel 1 Jenis-Jenis Komoditas dan Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan di Kecamatan Entikong

Jenis Tanaman	Produksi (Ton)/Tahun		
	2014	2015	2016
Kelapa Dalam	5	5	5
Kakao	168	188	254
Lada	347	347	691
Kopi	7	7	7
Karet	593	660	700
Kelapa Sawit	-	-	-
Kelapa Hibrida	-	-	-
Aren	-	-	-
Jarak Pagar	-	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau

Kegiatan perdagangan di Entikong dijalankan melalui perdagangan lintas batas. Berbicara mengenai perdagangan lintas batas, sudah pasti yang terlintas adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan masyarakat di daerah perbatasan demi memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan mereka (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2012). Karena itu, berbagai komoditas unggulan yang menjadi produk potensial di perbatasan dapat diperdagangkan melalui perdagangan lintas batas ini. Mengingat letak geografis Entikong yang memang sangat strategis, berdekatan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Kedekatan geografis Entikong dengan Malaysia mengakibatkan mudahnya pemasaran potensi ekonomi terkait produk potensial yang dihasilkan dari komoditas unggulan daerah setempat.

Masyarakat lokal Kecamatan Entikong pada umumnya bekerja sebagai petani, karena kebanyakan dari mereka memiliki lahan pertanian. Beberapa pekerjaan sambilan yang dilakukan masyarakat lokalnya seperti menjadi kuli angkut barang bawaan pelintas dan bongkar muat barang dari/ke dalam truk. Sedangkan, kegiatan perdagangan didominasi oleh penduduk pendatang yang pada umumnya tidak memiliki lahan pertanian. Adapun jasa seperti jasa penukaran uang, jasa pengisian blanko bepergian ke luar negeri, dan sektor informal lainnya menjadi kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh penduduk pendatang.

Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kecamatan Entikong Tahun 2016

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Petani	5.847 orang
2	Buruh	265 orang
3	Pedagang	592 orang
4	Jasa	420 orang
5	PNS	237 orang
6	TNI/Polri	108 orang
7	Lain-lain	146 orang

Sumber: Kantor Camat Entikong, 2017

Menurut Hamid (dalam Mulki, 2015: 7) kawasan perbatasan antarnegara merupakan kawasan yang strategis karena merupakan titik tumbuh bagi perekonomian regional maupun nasional. Melalui kawasan ini, kegiatan perdagangan regional maupun antarnegara dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan murah yang dapat mendorong naiknya aktivitas produksi masyarakat dan pendapatan masyarakat sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Letak kawasan yang berhadapan secara langsung dengan negara lain

menyebabkan kawasan perbatasan rawan terhadap intervensi dari negara lain, baik dalam aspek ekonomi, politik, sosio-kultural, maupun keamanan.

Perubahan paradigma perbatasan dari “*inward looking*” menjadi “*outward looking*” serta menggunakan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) mengakibatkan terjadinya perubahan pengelolaan perbatasan dalam aspek ekonominya yang diharapkan dapat semakin berkembang. Selain itu, pendekatan kesejahteraan yang dikombinasikan dengan pendekatan keamanan dan pendekatan lingkungan mengisyaratkan tidak hanya aspek ekonomi kawasan perbatasan yang perlu diperhatikan, tetapi juga berbagai aspek kehidupan masyarakat perbatasan yang berdampak pada kesejahteraannya. Berbicara mengenai kesejahteraan tidak akan terlepas dari indikator kesejahteraan. Indikator kesejahteraan dapat memberikan gambaran secara jelas dari aspek sosial maupun ekonomi. Masalah kesejahteraan selalu berhubungan dengan konsep kebutuhan, masyarakat/rumah tangga akan memenuhi kebutuhannya sampai terpenuhi maka dapat dikatakan mencapai kesejahteraannya (Rosni, 2017: 54). Menurut Fahrudin (2012) yang dikutip oleh Rosni (2017: 57) kesejahteraan adalah sebuah kondisi di mana seseorang mampu memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran.

Kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga, kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan yang miskin infrastruktur dan tidak memiliki aksesibilitas yang baik pada umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi di negara tetangga misalnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya berkiblat ke wilayah negara Malaysia. Hal ini disebabkan adanya infrastruktur yang lebih baik atau pengaruh sosial ekonomi yang lebih kuat dari wilayah negara tetangga. Ketersediaan prasarana dan sarana, baik sarana dan prasarana wilayah maupun fasilitas sosial ekonomi seperti pendidikan dan kesehatan masih jauh dari memadai juga menyebabkan kawasan perbatasan sulit untuk berkembang dan bersaing dengan Negara tetangga yang akan berimplikasi pada kehidupan sosial masyarakat di wilayah batas negara.

Tabel 3 Banyaknya Gedung Sekolah di Kecamatan Entikong Menurut Desa Tahun 2016

Desa/Kelurahan	TK/RA	SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA
Nekan	1	3	-	-
Semanget	2	2	1	-
Entikong	7	5	2	2
Suruh Tembawang	4	6	1	-
Pala Pasang	1	2	-	-
Jumlah	1	2	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi fasilitas pendidikan di Kecamatan Entikong terbelang minim dari sisi kuantitas. Kondisi Pendidikan di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia terjadi ketimpangan yang sangat nyata. Di Malaysia, sekolah-sekolah dibangun dengan baik, terkadang dilengkapi asrama siswa. Guru-guru yang dikirim bertugas mengajar adalah guru muda yang cakap

mengajar dan diberi gaji yang layak dan pantas, sementara di daerah perbatasan tidak ditemukan kondisi seperti itu, bahkan yang ada sangat memprihatinkan. Bukti empirik seperti yang ditemukan di Desa Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. Kondisi belajar-mengajar sangat memprihatinkan. Satu guru harus mengajar 111 siswa SD. Ditemukan juga seorang Kepala Sekolah merangkap sebagai guru mengajar siswa dari kelas I s/d kelas VI. Tidak hanya masalah mutu pendidikan yang memprihatinkan, jumlah tenaga pengajar tidak tercukupi. Satu orang guru SD di Desa Suruh Tembawang harus mengajari satu sekolah SD. Data dari Kantor Kepala Desa setempat menyebutkan bahwa Desa Suluh Tembawang berpenduduk 2.795 orang. Ada 963 orang buta huruf, tidak tamat SD 689 orang, tamat SD 917 orang, SLTP 113 orang, SLTA 102 orang, diploma 10 orang, sarjana 1 orang (Kantor Kepala Desa Suruh Tembawang, 2017).

Tabel 4 Sarana/Prasarana Kesehatan di Kecamatan Entikong Tahun 2016

Sarana/Prasarana	Jumlah
A. Sarana/Prasarana	
1. Rumah Sakit Umum	-
2. RS Bersalin	-
3. Rumah Bersalin	-
4. Puskesmas	1
5. Puskesmas Pembantu	1
6. Puskesmas Keliling	1
7. Poliklinik	-
8. BKIA	-
9. Praktek Dokter	1
10. Praktek Bidan	4

11. Posyandu	29
12. Polindes	5
13. Poskesdes	1
14. Apotik	1
15. Toko Obat	-
B. Tenaga Medis/Paramedis	
1. Dokter Spesialis	1
2. Dokter Umum	1
3. Mantri Kesehatan	-
4. Bidan	15
5. Perawat	17
6. Dukun/Tabib/Sinsang	-
7. Dukun Bayi	-
8. Lainnya	-

Sumber: Badan Pusat Statistik kabupaten Sanggau, 2017

Selain masalah pendidikan yang memprihatinkan, sarana prasarana kesehatan di Kecamatan Entikong juga masih terbatas walaupun jumlah puskesmas mendominasi dibandingkan sarana prasarana kesehatan lainnya. Masalah kesehatan juga masih terkendala dari jumlah tenaga medis yang bertugas. Fasilitas kesehatan belum memadai, dokter hanya ada satu, dan masih sering terjadi kekosongan obat. Isu pemerataan tenaga kesehatan ini penting untuk difasilitasi ke depan, agar tingkat kesehatan warga Kecamatan Entikong dapat lebih merata. Masalah-masalah seperti ini menyebabkan banyak masyarakat di Entikong lebih memilih berobat ke negara tetangga, Malaysia (Puskesmas Kecamatan Entikong, 2017). Untuk akses ke puskesmas, 89% pasien menggunakan jamkesda. 8,76% menggunakan askes/BPJS/jamkesmas, sisanya membayar secara pribadi (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2015).

Pengelolaan kawasan perbatasan juga memerlukan sistem kelembagaan yang baik, mengingat permasalahannya yang kompleks. Rendahnya aksesibilitas informasi dan komunikasi serta ketergantungan yang tinggi terhadap negara tetangga dalam pemenuhan kebutuhan hidup (seperti kebutuhan pokok, lapangan kerja, pendidikan, dan kesehatan) secara tidak langsung cenderung merupakan ancaman terhadap wawasan kebangsaan. Permasalahan seperti ini dapat berpotensi terjadinya penurunan wawasan kebangsaan dan kesadaran politik berbangsa sehingga berpotensi terhadap disintegrasi bangsa (Purwanto dan Syawie, 2013: 5).

Banyak kalangan menuding akar permasalahan adalah tumpang-tindih program pemerintah yang tidak *project oriented*, tidak komprehensif, tidak terintegrasi, tidak berkesinambungan dan tidak menyentuh kebutuhan masyarakat setempat. Pemanfaatan potensi lokal oleh pihak-pihak tertentu dari negara tetangga berdampak pada kegiatan ekonomi di perbatasan yang bisa menimbulkan efek negatif yang disebut *polarization effect*, yaitu tertarik/ditariknya sumber daya alam dan sumber daya manusia suatu negara ke negara tetangga untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah negara tetangga tersebut. Akibatnya, bisa terjadi pengosongan kegiatan ekonomi di wilayah yang sumber daya alam dan sumber daya manusianya tertarik. Fenomena ini terjadi karena lemahnya pengawasan terhadap aktivitas ekonomi yang berlangsung di kawasan perbatasan (Bangun, 2014).

Maka dari itu, penelitian terkait pengelolaan ekonomi kawasan perbatasan di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Perbatasan Kalimantan Barat-

Malaysia menarik untuk dilakukan. Penelitian ini disusun dengan judul **“Pengelolaan Kawasan Perbatasan Dalam Pendekatan Kesejahteraan (Studi di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka beberapa permasalahan yang akan diangkat mengenai Pengelolaan Ekonomi Kawasan Perbatasan Dalam Pendekatan Kesejahteraan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan kawasan perbatasan dalam pendekatan kesejahteraan di Kecamatan Entikong?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan kawasan perbatasan di Kecamatan Entikong?

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan penelitian terkait Pengelolaan kawasan perbatasan dalam pendekatan kesejahteraan, antara lain sebagai berikut:

1. Menjelaskan pengelolaan kawasan perbatasan dalam pendekatan kesejahteraan di Kecamatan Entikong
2. Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat pengelolaan kawasan perbatasan di Kecamatan Entikong

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang membangun dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan dan informasi bagi penelitian yang membahas fenomena terkait

2. Kontribusi Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah untuk menentukan langkah-langkah untuk melakukan pendekatan kesejahteraan dalam mengelola kawasan perbatasan di Kecamatan Entikong

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun berdasarkan pokok-pokok yang dipaparkan secara sistematis, yakni terdiri dari tiga bab yang mana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan. Berikut sistematika penulisan pada skripsi ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan mengenai latar belakang pemilihan Kecamatan Entikong sebagai objek penelitian, rumusan masalah yang ingin diteliti di Kecamatan Entikong, tujuan dan kontribusi penelitian yang dilakukan di Kecamatan Entikong, serta sistematika penulisan dalam penelitian ini

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori yang menjadi landasan penelitian serta menjadi rujukan dalam menganalisis data dan mengambil keputusan. Teori-teori yang dipaparkan dalam bab ini, yaitu teori pengembangan wilayah dalam ekonomi

kawasan perbatasan, pendekatan kesejahteraan dalam ekonomi kawasan perbatasan, dan pemerintah daerah

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan analisis data

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian meliputi penyajian data fokus penelitian dan pembahasan data fokus penelitian dan merupakan jawaban dari pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari dua sub bab pokok yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan garis besar dari hasil pembahasan yang ditarik berdasarkan permasalahan, teori dan analisis data. Sedangkan saran merupakan rekomendasi peneliti yang didasarkan pada ketidaksesuaian teori dengan kenyataan di lapangan dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Ekonomi Kawasan Perbatasan

1. Konsep dan Klasifikasi Wilayah

Banyak istilah yang digunakan dalam pembahasan kewilayahan, misalnya Boudeville menggunakan istilah tata ruang wilayah. Tata ruang wilayah mengungkapkan wujud struktur dan tata letak pemanfaatan serta keterkaitan pemanfaatan lahan sebagai ruangnya untuk penyusunan rencana proyek pembangunan secara tepat baik dari jenis, kapasitas, dan lokasi (Adisasmita, 2008: 14). Menurut Adisasmita (2008) wilayah didefinisikan sebagai lokasi suatu kegiatan seperti industri, perusahaan, dan fasilitas pelayanan. Konsep wilayah dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Wilayah homogen, diartikan sebagai suatu konsep yang menganggap wilayah geografis dapat dikaitkan bersama-sama menjadi sebuah wilayah tunggal jika memiliki karakteristik yang sama diantara wilayah-wilayah tersebut
- b. Wilayah nodal (pusat) atau wilayah polarisasi (berkutub) terdiri dari satuan wilayah heterogen. Misalnya, kota-kota besar, kota-kota menengah, dan kota-kota kecil dapat muncul karena distribusi penduduk yang terkonsentrasi di tempat-tempat tertentu

- c. Wilayah perencanaan atau wilayah program, merupakan satuan wilayah pengembangan di mana program-program pembangunan dilakukan.

Menurut Friedmann dan Alonso (dalam Adisasmita, 2013: 19) klasifikasi wilayah terdiri dari empat macam, yaitu:

- a. Wilayah metropolitan (kota yang sangat besar)

Wilayah ini dihuni sekitar 10 juta jiwa dengan berbagai kegiatan seperti perdagangan, industri, dan jasa pelayaran dalam skala besar dan penghematan eksternalnya tinggi sehingga menjadi daya tarik bagi para pengusaha. Tetapi, terdapat dampak eksternal negatif yang ditimbulkan seperti kemacetan lalu lintas, pencemaran lingkungan, kriminalitas yang tinggi, pemukiman kumuh, dan lain-lain

- b. Wilayah poros pembangunan

Wilayah ini menghubungkan dua kota besar melalui jalan yang lebar dan mulus. Kota-kota besar yang saling terhubung memiliki aksesibilitas dan kelancaran yang tinggi sehingga mendukung interaksi terutama dalam kegiatan perdagangan

- c. Wilayah perbatasan

Wilayah ini terletak pada perbatasan antara dua wilayah dan pada umumnya letaknya jauh dari pusat pelayanan yang berada di ibukota provinsi dan ibukota kabupaten. Secara ekonomi dan sosial wilayah ini relatif tertinggal

- d. Wilayah tertekan

Wilayah ini dapat dikatakan sama sekali tidak mengalami pertumbuhan atau mengalami kemacetan dikarenakan tidak memiliki sumberdaya alam yang bisa

dikembangkan, daerahnya tandus dan gersang, penduduknya tidak memiliki kemampuan bahkan dikatakan malas bekerja sehingga dikategorikan miskin, tidak memiliki semangat melakukan pembangunan dan prasarana serta sarana yang minim.

2. Pengembangan Wilayah Dalam Kawasan Perbatasan

Menurut Triutomo (2001: 50), pengembangan wilayah mengandung dua sisi yang saling berkaitan, yaitu sisi sosial dan ekonomis. Dengan kata lain pengembangan wilayah adalah upaya memberikan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, misalnya menciptakan pusat-pusat produksi, memberikan kemudahan prasarana, pelayanan logistik, dan sebagainya. Menurut Triutomo (2001) dalam rencana pembangunan nasional, pengembangan wilayah lebih ditekankan pada penyusunan paket pengembangan wilayah terpadu dengan mengenali sektor potensial yang perlu dikembangkan di suatu wilayah, antara lain:

- a. Sumberdaya lokal, yaitu kekuatan alam yang dimiliki wilayah tersebut seperti lahan pertanian, hutan, bahan galian, tambang, dan sebagainya
- b. Pasar, yaitu tempat memasarkan produk yang dihasilkan suatu wilayah sehingga dapat berkembang
- c. Tenaga kerja, berperan dalam pengembangan wilayah sebagai pengolah sumberdaya yang ada
- d. Investasi, kegiatan investasi akan masuk ke dalam suatu wilayah yang memiliki kondisi kondusif bagi penanaman modal

- e. Kemampuan pemerintah, merupakan elemen pengarah pengembangan wilayah. Pemerintah yang berkapasitas akan dapat mewujudkan pengembangan wilayah yang efisien karena sifatnya sebagai katalisator pembangunan
- f. Transportasi dan komunikasi, berperan sebagai media pendukung yang menghubungkan wilayah satu dengan wilayah lainnya. Interaksi yang terjadi seperti aliran barang, jasa, dan informasi akan berpengaruh bagi tumbuh kembangnya suatu wilayah
- g. Teknologi, berpengaruh terhadap pemanfaatan sumber daya wilayah melalui peningkatan output produksi dan keefektifan kinerja sektor-sektor perekonomian wilayah.

Menurut Direktorat Jenderal Penataan Ruang (2005) prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan wilayah adalah:

- a. Sebagai *growth center*

Pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal, tetapi juga memperhatikan pengaruh (*spread effect*) pertumbuhan yang ditimbulkan bagi wilayah sekitarnya bahkan nasional

- b. Pengembangan wilayah memerlukan kerjasama pengembangan antar daerah karena menjadi syarat penting bagi keberhasilan pengembangan daerah
- c. Pola pengembangan wilayah bersifat integral yang merupakan integrasi dari daerah-daerah yang tercakup dengan pendekatan kesetaraan. Mekanisme pasar juga menjadi prasyarat bagi perencanaan pengembangan kawasan

3. Pengelolaan Kawasan Perbatasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pengelolaan kawasan perbatasan menjadi salah satu kerangka dalam menunjang keberhasilan pengelolaan perbatasan. Permasalahan yang ada di kawasan perbatasan bukan hanya mengenai penegasan garis batas wilayah suatu negara, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana mengelola kawasan-kawasan perbatasan tersebut, baik dari segi pertahanan dan keamanan, ekonomi kawasan, infrastruktur dan penataan ruang, serta kelembagaan yang mengelola kawasan perbatasan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pola atau kerangka pengelolaan kawasan perbatasan yang menyeluruh meliputi berbagai sektor dan kegiatan pembangunan, serta koordinasi dan kerjasama yang efektif mulai dari Pemerintah Pusat sampai ke tingkat kabupaten/kota (Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2011: 34).

Mengingat luasnya wilayah negara yang berbatasan dengan negara tetangga, maka pengelolaan kawasan perbatasan tidak dapat dilepaskan dengan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pelimpahan urusan pemerintahan dalam konteks negara kesatuan pada dasarnya berada di tangan pusat, sebagaimana dijelaskan Mawhood yang dikutip oleh Situmorang (2002: 63) bahwa pemerintahan daerah harus dipahami sebagai organisasi semi independen. Pemerintah daerah mempunyai beberapa kebebasan untuk bertindak tanpa persetujuan pusat, tetapi statusnya tidak dapat melakukan hubungan dengan negara luar. Kekuasaan pemerintah daerah dan eksistensinya hanya

menindaklanjuti suatu keputusan nasional pusat dan dapat dibatalkan sesuai keputusan pusat.

Pembagian kewenangan untuk mengelola perbatasan secara umum ditetapkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bab 16 tentang Kawasan Khusus dan Kawasan Perbatasan Negara, pasal 361 menjelaskan pembagian kewenangan pemerintah di kawasan perbatasan. Adapun isi dari UU No. 23 tahun 2014 Bab 16 pasal 361 sebagai berikut:

a. Pasal 361

- 1) Kawasan perbatasan negara adalah kecamatan-kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain
- 2) Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan perbatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai wilayah negara
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk:
 - a) Penetapan rencana detail ruang
 - b) Pengendalian dan izin pemanfaatan ruang; dan
 - c) Pembangunan sarana dan prasarana kawasan
- 4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

- 5) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh bupati/wali kota
- 6) Dalam memberikan bantuan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/wali kota menugaskan camat di kawasan perbatasan
- 7) Pemerintah Pusat wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan di negara tetangga
- 8) Kewenangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pendekatan Kesejahteraan Dalam Kawasan Perbatasan

1. Konsep Pendekatan Kesejahteraan

Pendekatan kesejahteraan menurut Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 menjelaskan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan berdasarkan pengembangan kegiatan ekonomi dan perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Pengembangan aktivitas ekonomi dan perdagangan diarahkan berbasis pada komoditas unggulan masing-masing wilayah perbatasan dan sekitarnya, sesuai dengan karakteristik dan potensi unggulannya masing-masing. Pendekatan kesejahteraan dalam hal ini merupakan respon untuk menjawab tantangan perubahan ekonomi kawasan.

Adanya proses integrasi ekonomi kawasan menjadikan kawasan perbatasan memiliki peran penting, yaitu sebagai pintu gerbang bagi kegiatan ekonomi sehingga perlu pendekatan kesejahteraan untuk mengelola ekonomi kawasan perbatasan. Menurut Hasyim dan Subagiyo (2017: 55) pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) pada dasarnya merupakan usaha yang dilakukan dengan memperhatikan pengembangan perekonomian di kawasan perbatasan yang diharapkan mampu mendorong peningkatan pendapatan negara, pertumbuhan ekonomi serta percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dari wilayah negara tetangga dengan tujuan utamanya kesejahteraan masyarakat. Menerapkan pendekatan kesejahteraan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan wilayah perbatasan harus didukung dari berbagai sektor dan kebijakan. Konsep pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan bertujuan untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai pusat pengembangan ekonomi skala lokal, regional, dan nasional.

2. Langkah-Langkah Melakukan Pendekatan Kesejahteraan

Menurut Hasyim dan Subagiyo (2017: 56) langkah awal dalam melakukan pendekatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dilakukan dengan pengembangan pada kota-kota utama di kawasan perbatasan yang dijadikan fungsi sebagai penggerak utama pengembangan wilayah-wilayah di sekitarnya karena konsep pendekatan kesejahteraan di kawasan perbatasan lebih menekankan melalui pengembangan ekonomi dan perdagangan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan pengembangan ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi potensi ekonomi

Letak kawasan perbatasan yang berhadapan langsung dengan negara lain dianggap memiliki potensi ekonomi daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Potensi ekonomi daerah menurut Suparmoko (2002: 99) adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang layak dikembangkan untuk menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan mampu mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dengan berkesinambungan. Potensi ekonomi yang ada di kawasan perbatasan pada dasarnya merupakan keunggulan komparatif yang menjadi modal bagi daerah sehingga dengan adanya identifikasi potensi ekonomi nantinya dapat diketahui komoditas-komoditas unggulan daerah di kawasan perbatasan. Menurut Yulianti (2011) komoditas unggulan diartikan sebagai komoditas andalan yang memiliki posisi strategis baik dalam hal teknis (kondisi tanah dan iklim) ataupun sosial ekonomi serta kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumberdaya manusia, infrastruktur, dan kondisi sosial masyarakat setempat) yang dapat dikembangkan di suatu daerah atau wilayah. Komoditas unggulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komoditas adalah *hasil bumi dan kerajinan setempat dapat dimanfaatkan sbg – ekspor ; bahan mentah yang dapat digolongkan menurut mutunya standar perdagangan internasional.* Sedangkan, kata unggulan memiliki kata dasar unggul yang berarti utama (terbaik, terutama). Dapat disimpulkan bahwa komoditas unggulan merupakan hasil utama masyarakat yang memiliki peluang pemasaran dan berdaya saing tinggi.

Pemerintah daerah harus menentukan komoditas unggulan daerahnya sebelum dikembangkan. Menurut Bahrein (2003) yang dikutip oleh Demmatadju (2012: 29) penetapan komoditas unggulan di suatu wilayah menjadi keharusan dengan mempertimbangkan komoditas-komoditas yang mampu bersaing secara berkelanjutan dengan komoditas yang sama di wilayah lain yang diusahakan secara efisien dari aspek teknologi dan sosial ekonomi serta memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Penentuan komoditas unggulan menurut Hasyim dan Subagiyo (2017: 49) mempunyai beberapa kriteria, antara lain:

1) Sifat strategis komoditas

Kriteria ini diukur berdasarkan permintaan pasar, dukungan pemerintah dalam pengembangan komoditas serta ada tidaknya komoditas pengganti yang bersifat suplemen

2) Nilai ekonomi komoditas

Kriteria ini dinilai dari jumlah produsen komoditas, tingkat produksi komoditas, keunggulan komparatif komoditas, ketersediaan lahan yang sesuai untuk pengembangan komoditas, dan kondisi pasar

3) Memiliki status teknologi yang terus meningkat

4) Pengembangan komoditas unggulan mempunyai kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja

5) Berorientasi pada kelestarian sumberdaya dan lingkungan

b. Pembangunan Infrastruktur

Menurut Grigg (dalam Jesly, 2016: 407-408) mendefinisikan infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infratruktur sebagai suatu sistem di mana sistem tersebut adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Menurut Mankiw (2001) yang dikutip oleh Warsilan dan Noor (2015) menjelaskan infrastruktur dalam ilmu ekonomi merupakan wujud dari *public capital* (modal publik) yang dibentuk dari investasi oleh pemerintah meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan.

Infrastruktur merupakan salah satu komponen utama yang mendukung keberhasilan pengembangan kawasan perbatasan dengan konsep kesejahteraan. Ketersediaan infrastruktur yang lengkap secara otomatis akan berdampak langsung terhadap laju kegiatan ekonomi wilayah. Kegiatan ekonomi tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan pembangunan infrastruktur. Selain itu, ketersediaan infrastruktur juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam menarik minat investor untuk menanamkan modal di kawasan perbatasan selain faktor ketersediaan SDA. Seperti yang dikemukakan Setiadi (2006) yang dikutip oleh Warsilan dan Noor (2015) bahwa infrastruktur merupakan prasyarat bagi sektor-sektor lain untuk berkembang dan juga sebagai sarana penciptaan hubungan antara satu dengan lainnya.

c. Integrasi Ekonomi

United Nation Conference on Trade and Development (UNCTD) mendefinisikan integrasi ekonomi sebagai kesepakatan yang dilakukan untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan pergerakan faktor produksi lintas negara. Sedangkan Pelkman (dalam Ridwan, 2009) mendefinisikan integrasi ekonomi sebagai integrasi yang ditandai oleh penghapusan hambatan-hambatan ekonomi (*economic frontier*) antara dua atau lebih ekonomi atau negara. Hambatan-hambatan ekonomi yang dimaksud meliputi semua pembatasan yang menyebabkan mobilitas barang, jasa, faktor produksi, dan aliran komunikasi.

Integrasi ekonomi merupakan faktor penting keberhasilan perekonomian regional di kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan secara geografis terletak di kawasan strategis harus mampu mengendalikan ekonomi baik di wilayahnya sendiri ataupun di wilayah negara lain. Tujuan mendasar dari integrasi ekonomi adalah untuk meningkatkan volume perdagangan barang dan jasa, meningkatkan mobilitas kapital dan tenaga kerja, meningkatkan produksi, meningkatkan efisiensi produk dan meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Negara tetangga merupakan mitra kerja dalam perekonomian yang sangat potensial sehingga upaya-upaya kerjasama harus dilakukan dan dipermudah prosedurnya. Secara geografis, peningkatan ekspor ke negara tetangga relatif mudah dilakukan. Hal ini dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Integrasi ekonomi kawasan perbatasan diwujudkan dalam bentuk kerjasama dengan negara tetangga yang sudah dilakukan selama ini. Sistem perdagangan yang semakin terbuka di

kawasan perbatasan dapat menjadi jalan untuk mencapai keberhasilan perekonomian. Hal ini disebabkan karena letak dan potensi unggulan yang dimilikinya. Solvatore (1997) yang dikutip oleh Ridwan (2009) menguraikan integrasi ekonomi dalam beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Pengaturan Perdagangan Preferensial (*Preferential Trade Arrangements*) dibentuk oleh negara-negara yang sepakat menurunkan hambatan-hambatan perdagangan diantara mereka dan membedakannya dengan negara-negara bukan anggota
- 2) Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Area*) di mana hambatan perdagangan yang ada baik tarif maupun non tarif diantara anggotanya dihilangkan sepenuhnya, tetapi masing-masing negara anggota masih mempunyai hak untuk menentukan apakah hambatan tersebut dipertahankan atau dihilangkan terhadap negara-negara non anggota
- 3) Persekutuan Pabean (*Customs Union*) yang berarti semua negara diwajibkan untuk tidak menghapuskan semua bentuk hambatan perdagangan diantara mereka, tetapi menyeragamkan kebijakan perdagangan mereka terhadap negara yang bukan anggota
- 4) Pasaran Bersama (*Common Market*) yaitu suatu bentuk integrasi di mana bukan hanya perdagangan yang dibebaskan, tetapi juga termasuk arus faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal
- 5) Uni Ekonomi (*Economic Union*) yaitu menyeragamkan kebijakan moneter dan fiskal masing-masing negara anggota dalam suatu kawasan atau negara-negara yang melakukan kesepakatan.

d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Konsep pendekatan kesejahteraan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Dibutuhkan kualitas SDM yang baik agar mampu mengembangkan ekonomi dan memanfaatkan infrastruktur yang ada dengan sebaik-baiknya. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Craig dan Mayo (1995) yang dikutip oleh Alfitri (2012: 22) mengungkapkan konsep pemberdayaan termasuk dalam pengembangan masyarakat dan terkait dengan kemandirian (*self help*), partisipasi (*participation*), jaringan kerja (*networking*), dan pemerataan (*equity*). Pemberdayaan masyarakat menurut Suharto (2010: 59) adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk memperkuat keberdayaan kelompok lemah, dalam hal ini masyarakat yang kurang mampu (miskin). Sebagai tujuan, pemberdayaan adalah suatu keadaan ingin mencapai suatu perubahan masyarakat yang berdaya, mandiri dalam memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi, maupun sosial seperti halnya memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai pekerjaan, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial.

e. Mengoptimalkan Peran Kelembagaan

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan dilakukan dengan optimalisasi peran kelembagaan pemerintah, swasta, dan masyarakat secara produktif, sinergis, dan kreatif sesuai perannya masing-masing.

C. Kesejahteraan

1. Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan. Secara umum, teori kesejahteraan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu *classical utilitarianism*, *neoclassical welfare theory*, dan *new contraction approach* (Badrudin, 2012). *Classical utilitarianism* menekankan bahwa kepuasan atau kesenangan seseorang dapat diukur dan bertambah. Tingkat kepuasan setiap individu dapat dibandingkan secara kuantitatif. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya, sedangkan bagi masyarakat peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya. *Neoclassical welfare theory* menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu. *New Contraction Approach* menekankan pada konsep di mana setiap individu memiliki kebebasan maksimum dalam hidupnya. Hal yang paling ditekankan dalam pendekatan *new contractarian approach* ini adalah individu akan memaksimalkan kebebasannya untuk mengejar konsep mereka tentang barang dan jasa tanpa adanya campur tangan. Ketiga teori tersebut menekankan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang sangat tergantung pada tingkat kepuasan yang diraih dalam kehidupannya.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan pengelolaan kawasan perbatasan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan antara lain:

- 1) Jurnal Paradigma (Vol. 1 No. 3, Desember 2012: 389-401) yang berjudul Kebijakan Pembangunan Perbatasan dan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Perbatasan Pulau Sebatik, Indonesia. Ditulis oleh Sonny Sudiar.

Jurnal ini berisi tentang kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan di Pulau Sebatik secara keseluruhan masih bersifat elitis dan *top down policy*. Akibatnya banyak program pembangunan kawasan perbatasan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dasar dan kepentingan masyarakat di Pulau Sebatik. Masyarakat juga seringkali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

- 2) Jurnal Paradigma (Vol. 4 No. 2, Agustus 2005: 92-103) yang berjudul Evolusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia di Kalimantan Utara. Ditulis oleh Muhammad Nizar Hidayat.

Jurnal ini berisi tentang kebijakan-kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan ketika Kalimantan Utara masih tergabung dalam Provinsi Kalimantan Timur hingga terbentuknya Kalimantan Utara sebagai Provinsi baru di Indonesia pada tahun 2012. Tumpang tindih atau *overlapping* dalam hal kebijakan maupun institusi pengelolaan kawasan perbatasan mengakibatkan program-program

pengelolaan kawasan perbatasan tidak berjalan sinergis sehingga kesejahteraan masyarakat cenderung terabaikan

2. Indikator Kesejahteraan Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Kawasan perbatasan tidak lagi dipandang sebagai halaman belakang suatu negara. Semenjak adanya desain besar pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2011-2025, pemerintah berupaya untuk memperbaiki kawasan perbatasan melalui pendekatan kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan dalam pengelolaan kawasan perbatasan pada dasarnya dilakukan dengan cara mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung secara selektif dan bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan. Pendekatan kesejahteraan dilakukan dengan cara mengkombinasikan pendekatan keamanan dan pendekatan lingkungan (BNPP, 2011). Pendekatan kesejahteraan dalam hal ini pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai ekonomi, tetapi dalam aspek yang lebih banyak, termasuk kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator yang menjadi penentu apakah masyarakat tersebut dapat disebut sejahtera atau tidak. Apabila indikator-indikator tersebut tidak terpenuhi, masyarakat dikatakan memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah.

Menurut BPS (2005), indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, keadaan tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan,

kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Berikut ini penjelasan indikator-indikator menurut Badan Pusat Statistik.

1) Indikator pendapatan digolongkan menjadi tiga item yaitu:

- a. Tinggi ($>$ Rp. 10.000.000)
- b. Sedang (Rp. 5.000.000)
- c. Rendah ($<$ Rp. 5.000.000)

2) Indikator pengeluaran digolongkan menjadi tiga item yaitu:

- a. Tinggi ($>$ Rp. 5.000.000)
- b. Sedang (Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000)
- c. Rendah ($<$ Rp. 1.000.000)

3) Indikator tempat tinggal yang dinilai ada lima item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari lima item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam tiga golongan yaitu:

- a. Permanen

Kriteria permanen ditentukan oleh kualitas dinding, atap dan lantai.

Bangunan rumah permanen adalah rumah yang dindingnya terbuat dari tembok/kayu kualitas tinggi, lantai terbuat dari ubin/keramik/kayu

kualitas tinggi dan atapnya terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes (BPS, 2012).

b. Semi Permanen

Rumah semi permanen adalah rumah yang dindingnya setengah tembok/bata tanpa plaster/kayu kualitas rendah, lantainya dari ubin/semen/kayu kualitas rendah dan atapnya seng/genteng/sirap/asbes (BPS, 2012)

c. Non Permanen

Sedangkan rumah tidak permanen adalah rumah yang dindingnya sangat sederhana (bambu/papan/daun) lantainya dari tanah dan atapnya dari daun-daunan atau atap campuran genteng/seng bekas dan sejenisnya (BPS, 2012)

- 4) Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam tiga golongan yaitu:
- a. Lengkap
 - b. Cukup
 - c. Kurang
- 5) Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi tiga item yaitu:
- a. Bagus (< 25% sering sakit)
 - b. Cukup (25% - 50% sering sakit)
 - c. Kurang (> 50% sering sakit)

- 6) Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari lima item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Dari lima item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam tiga golongan yaitu:
- Mudah
 - Cukup
 - Sulit
- 7) Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari tiga item yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. Dari tiga item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam tiga golongan yaitu:
- Mudah
 - Cukup
 - Sulit
- 8) Indikator kemudahan mendapatkan transportasi terdiri tiga item, yaitu Ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan. Dari tiga item tersebut kemudian akan di digolongkan ke dalam tiga golongan yaitu:
- Mudah
 - Cukup
 - Sulit

D. Pemerintah Daerah

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah

adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur, Bupati, dan perangkat daerah adalah termasuk pemerintah daerah. Menurut Hosein dan Muluk (2007) menjelaskan bahwa *local government* adalah sebuah konsep yang mengandung tiga arti. Pertama, pemerintah lokal seringkali dipertukarkan dengan *local authority* yang mengacu pada organ, yakni organ dan badan pemerintah. Jadi, dalam rekrutmen pejabatnya didasarkan pada pemilihan. Kedua, mengacu pada pemerintahan lokal yang dilakukan pemerintah lokal dalam arti pemerintahan lebih mengacu pada fungsi. Ketiga, *local government* bermakna daerah otonom yang berarti berperan penting untuk meningkatkan potensi daerah yang ada agar dapat menjadi produk unggulan daerah. Ndraha (2011: 6) mengemukakan pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan *civil* bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warganegara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan *civil* tertentu dan pemerintah wajib melayakannya.

Soekanto (2004: 243) menyatakan peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Suatu peran dikatakan

telah dilaksanakan apabila seseorang dengan dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Peran pemerintah berdasarkan fungsinya menurut Munir dikutip oleh Heningtyas, Sjamsuddin, & Hadi (2014: 265-266), yaitu:

- a. Enterpreneur, artinya pemerintah daerah memiliki tanggungjawab melaksanakan usaha untuk mengelola sumberdaya ekonomi, aset-aset daerah sumberdaya ekonomi potensial, sehingga memberikan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat
- b. Koordinator, artinya pemerintah daerah berhak menetapkan kebijaksanaan maupun strategi bagi pembangunan daerah dan merangkul semua komponen masyarakat untuk berpartisipasi sebagai aktor dalam pembangunan
- c. Fasilitator, artinya pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui lingkungan *attitudional*, yaitu berkaitan dengan perbaikan prosedur perijinan dan pelayanan serta melakukan penetapan daerah untuk memantapkan pengaturan dimensi spasial dalam pembangunan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian menyesuaikan objek penelitian, karena metode digunakan sebagai bahan dasar dan panduan untuk mencapai tujuan. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif. Menurut Widi (2010: 84), penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2014:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia terkadang perspektif berdasarkan peneliti sendiri, penelitian ini bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk mempermudah dalam membuat keputusan mengenai data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dengan adanya fokus penelitian, akan mempermudah peneliti dalam mengambil data dan kemudian mengolah data yang diperoleh. Fokus penelitian dalam Sugiyono (2008: 207) diartikan sebagai batasan masalah penelitian yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan serta defisini fokus penelitian tersebut, adapun yang menjadi fokus penelitian ini antara lain:

1. Pengelolaan kawasan perbatasan dalam pendekatan kesejahteraan yang mana pendekatan kesejahteraan dilakukan melalui pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal (komoditas unggulan) yang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka terdapat langkah-langkah yang digunakan untuk merealisasikan pendekatan kesejahteraan di kawasan perbatasan, yaitu:
 - a. Identifikasi potensi ekonomi berbasis komoditas unggulan melalui kriteria-kriteria komoditas unggulan, yakni:
 - 1) Sifat strategis komoditas. Kriteria ini diukur berdasarkan permintaan pasar, dukungan pemerintah dalam pengembangan komoditas serta ada tidaknya komoditas pengganti yang bersifat suplementer
 - 2) Nilai ekonomi komoditas. Kriteria ini dinilai dari jumlah produsen komoditas, tingkat produksi komoditas, keunggulan komparatif

komoditas, ketersediaan lahan yang sesuai untuk pengembangan komoditas, dan kondisi pasar

- 3) Adanya peningkatan teknologi melalui inovasi
 - 4) Pengembangan komoditas unggulan mempunyai kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja
 - 5) Berorientasi pada kelestarian sumberdaya dan lingkungan
- b. Pembangunan infrastruktur
 - c. Integrasi ekonomi
 - d. Peningkatan kualitas SDM
 - e. Mengoptimalkan peran kelembagaan di seluruh *stakeholder* (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dengan konsep Koordinasi, Integrasi, Sinergi, dan Sinkronisasi (KISS)
2. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan ekonomi kawasan perbatasan dalam pendekatan kesejahteraan:
- a. Faktor pendukung
 - b. Faktor penghambat

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Berdasarkan lokasi penelitian ini, peneliti memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kecamatan Entikong yang berlokasi di Kabupaten Sanggau, perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia. Pemilihan lokasi penelitian di Kecamatan Entikong. Ada beberapa alasan peneliti

memilih Kecamatan Entikong sebagai obyek penelitian, yaitu: Entikong merupakan perbatasan yang memiliki aktivitas ekonomi dan perdagangan yang terbilang lancar, Entikong mempunyai Pos Lintas Batas Negara yang digunakan sebagai aktivitas ekonomi dan perdagangan sehingga cukup mudah untuk dilakukan penelitian, Entikong memiliki beberapa potensi daerah yang dapat diunggulkan dalam menopang aktivitas ekonomi dan perdagangannya. Sedangkan situs penelitian adalah tempat peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Adapun yang menjadi situs penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau
2. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Sanggau
3. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Sanggau
4. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong
5. Pos Lintas Batas Negara Entikong
6. Tentara Nasional Indonesia di Perbatasan

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2009: 137) sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

Berdasarkan pernyataan tersebut, berikut beberapa jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang berasal dari sumber pertama. Sumber dari data primer diperoleh melalui informan dan peristiwa yang terjadi. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bapak Abu Hanifah selaku Pelaksana Pemeriksa Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai II KPPBC Entikong
- b. Bapak Farchan selaku Kepala Subseksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen KPPBC Entikong
- c. Bapak Suparman, S.Pd., M.Si selaku Camat Kecamatan Entikong
- d. Bapak Kurniawan, SP selaku Kasi Pengembangan Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau
- e. Bapak Raditya Ishak selaku Kepala Subseksi Penindakan Bea Cukai Pos Lintas Batas Negara Entikong
- f. Ibu Wahyu Widiati, S.Hut selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat di Kantor Kecamatan Entikong
- g. Bapak Lettu Infanteri Septyan Dwi Nuryadi selaku Kepala Seksi Operasi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan
- h. Pelaku Usaha di Kecamatan Entikong
- i. Petani di Kecamatan Entikong
- j. Masyarakat Kecamatan Entikong

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Data sekunder merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data

primer. Data sekunder dapat berupa buku, literature, dokumen, arsip, berita, dan lain-lain. Adapun data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Profil Kabupaten Sanggau
- b. Profil Kecamatan Entikong
- c. Data Ekspor-Impor PLBN Entikong
- d. Data Jumlah Pelintas Batas PLBN Entikong
- e. Data Infrastruktur di Kecamatan Entikong
- f. Kecamatan Entikong Dalam Angka
- g. Kabupaten Sanggau Dalam Angka

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2008: 224). Jika dilihat dari cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara: observasi (pengamatan), wawancara (interview), dan dokumentasi atau gabungan semuanya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) teknik, yaitu:

1. Observasi

Nasution (dalam Sugiyono, 2011:310) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai kenyataan yang diperoleh berdasarkan observasi. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di Kecamatan Entikong serta masyarakatnya. Teknik pengamatan yang dilakukan adalah observasi non

partisipasi, yakni proses pengamatan tanpa ikut serta dalam kehidupan masyarakat yang diamati dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat

2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini berdasarkan asas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada beberapa pihak, yaitu Bapak Abu Hanifah selaku Pelaksana Pemeriksa Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai II KPPBC Entikong, Bapak Farchan selaku Kepala Subseksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen KPPBC Entikong, Bapak Suparman, S.Pd., M.Si selaku Camat Kecamatan Entikong, Bapak Kurniawan, SP selaku Kepala Seksi Pengembangan Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Bapak Raditya Ishak selaku Kepala Subseksi Penindakan Bea Cukai Pos Lintas Batas Negara Entikong, Bapak Lettu Infanteri Septyan Dwi Nuryadi selaku Kepala Seksi Operasi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan, Ibu Wahyu Widiati, S.Hut selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kantor Kecamatan Entikong, Bapak Ir. Rodi Sanen, M.Si selaku Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau, Pelaku Usaha di Kecamatan Entikong, Petani di Kecamatan Entikong dan Masyarakat Kecamatan Entikong. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang disesuaikan dengan fokus penelitian sehingga peneliti mendapatkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan, permasalahan, dan tujuan penelitian

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, berbentuk tulisan gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2008: 240). Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data sekunder, yakni berupa dokumen-dokumen, peraturan daerah, jurnal atau penelitian terdahulu, dan dokumen lainnya terkait fokus penelitian. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti dalam rangka pengumpulan data di lapangan. Dokumen didapatkan dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang terkumpul. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri menjadi instrumen penelitian. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetaokan fokus penelitian, memilih informan, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan, dan membuat kesimpulan (Sugiyono, 2008: 222). Berikut instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti

Peneliti memiliki peran penting dalam pengumpulan data karena sebagai subyek dalam penelitian. Peneliti dengan menggunakan panca indera untuk melihat, mendengar, dan mengamati kejadian-kejadian yang ada di lapangan yang

berhubungan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti sendiri sebagai instrumen penelitian dengan cara mengamati pengelolaan ekonomi di kawasan perbatasan Kecamatan Entikong

2. Pedoman wawancara

Peneliti sebagai instrument peneliti utama, melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber guna memperoleh data-data yang konkrit. Wawancara dilakukan sesuai dengan pedoman wawancara agar data-data yang diperoleh dari informan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan, dan tujuan penelitian.

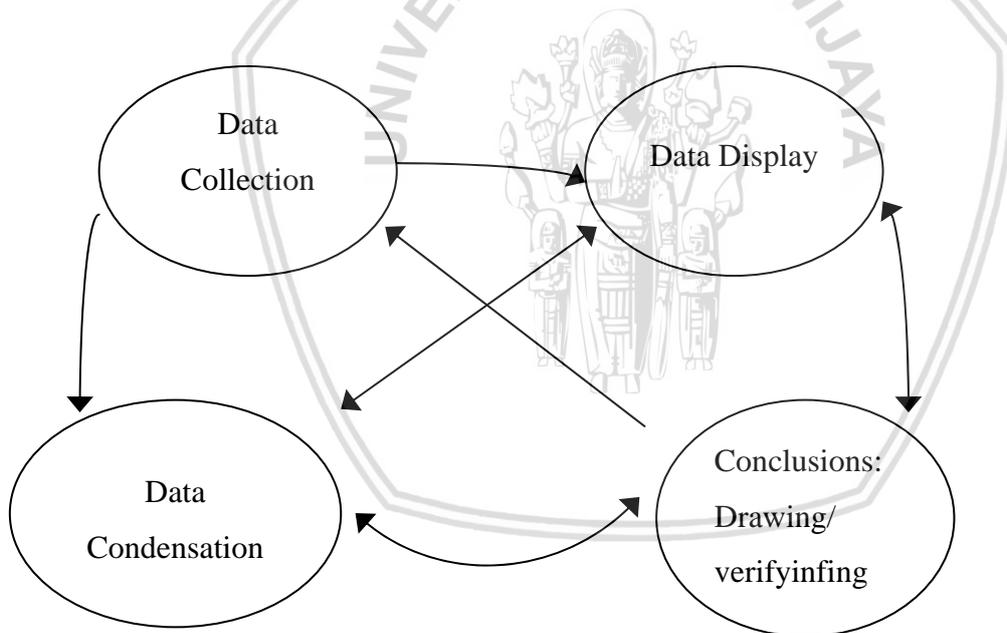
3. Perangkat penunjang

Penelitian dilakukan dengan menggunakan alat-alat bantu penelitian yang membantu peneliti dalam mengumpulkan data-data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perangkat penunjang penelitian yang digunakan peneliti dalam proses pengumpulan data, yakni berupa alat tulis, buku catatan, alat perekam, dan kamera. Alat-alat penunjang tersebut digunakan peneliti untuk mencatat hasil temuan peneliti ketika melakukan observasi, merekam hasil wawancara peneliti dengan narasumber, serta mengambil gambar/foto kondisi objek penelitian.

G. Analisis Data

Menurut Widi (2010: 253) analisis data merupakan proses menghimpun dan mengumpulkan, membentuk, dan mentransformasi data yang telah diperoleh untuk dianalisis sehingga dapat diperoleh kesimpulan dari informasi untuk menarik kesimpulan dalam menjawab rumusan masalah yang telah dibuat. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data Miles, Huberman dan Saldana.

Berikut alur kegiatan analisis data Miles, Huberman dan Saldana:



Gambar 4: Komponen Analisis Data Model Interaktif Miles, Huberman, dan Saldana

Sumber : Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14)

Berikut penjelasan alur analisis data Miles, Huberman, dan Saldana:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Dalam tahap ini data yang diperoleh dari lapangan dicatat dalam uraian atau laporan yang terperinci dan lengkap, kemudian dilakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian, memilih hal-hal yang pokok dan penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Kegiatan dalam kondensasi data merupakan suatu bentuk analisis menggolongkan, mengambil data yang pokok dan penting dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan akhirnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

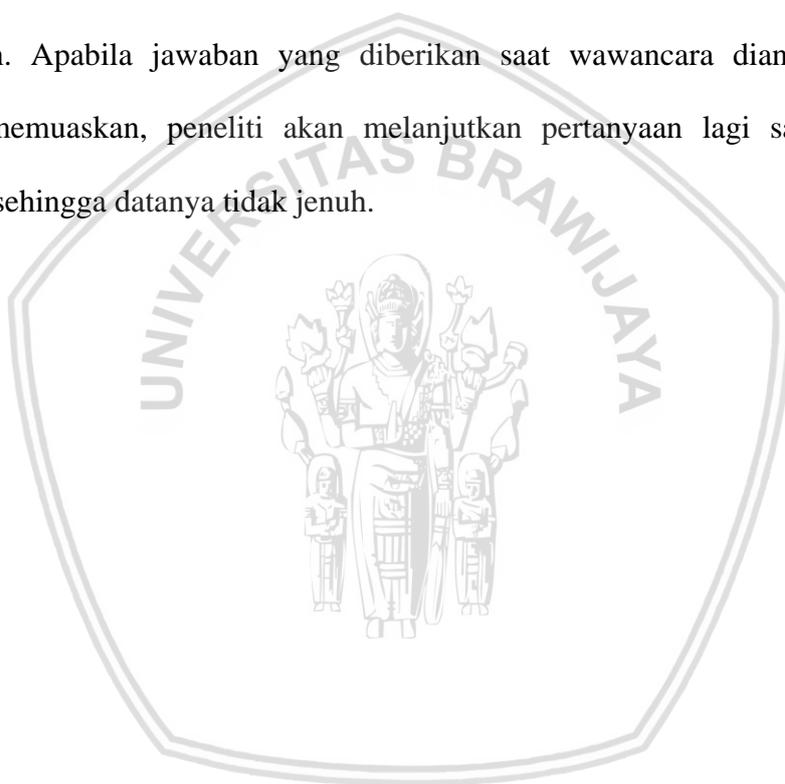
Langkah selanjutnya setelah melakukan kondensasi data adalah melakukan penyajian data. Penyajian data dilakukan agar memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari peneliti sehingga peneliti dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk kualitatif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verifying*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan di tahap awal didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Sehingga kesimpulan penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Hal tersebut karena masalah dan rumusan

masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah berada di lapangan.

Antara penyajian data dan penarikan kesimpulan, terdapat aktivitas analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Apabila jawaban yang diberikan saat wawancara dianalisis masih belum memuaskan, peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sehingga datanya tidak jenuh.

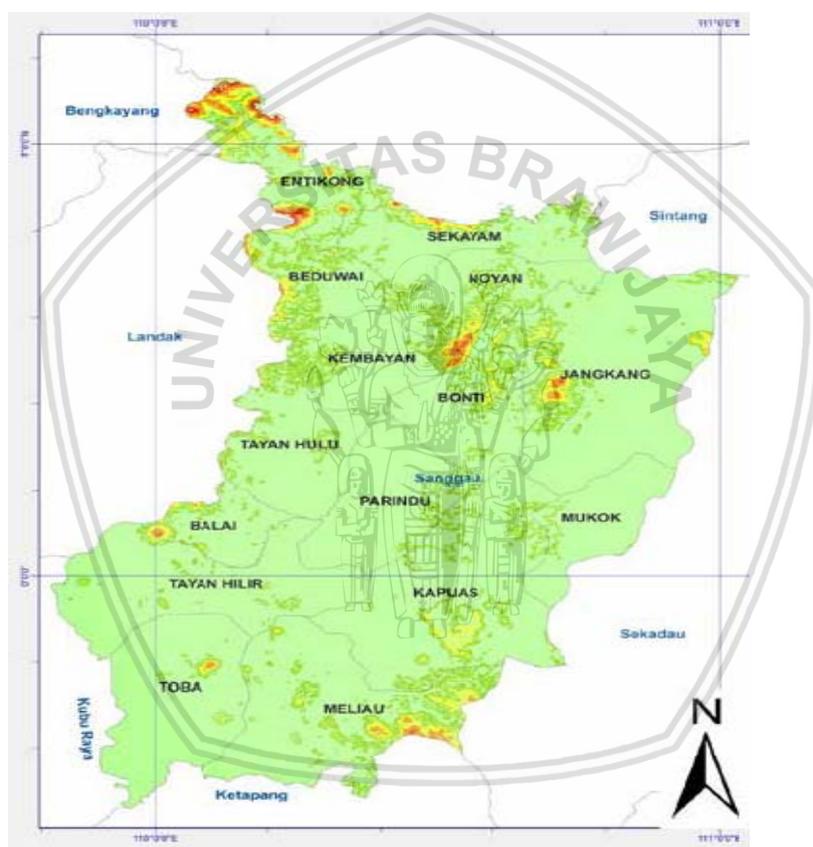


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi

1. Gambaran Umum Kabupaten Sanggau



Gambar 1: Peta Kabupaten Sanggau

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau

Kabupaten Sanggau merupakan salah satu Daerah/Region Tingkat II dengan wilayah terluas keempat dari Kabupaten/Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sanggau terletak di tengah-tengah dan pada bagian utara Provinsi Kalimantan Barat, memiliki luas daerah 12.857,70 km². Letak geografis Kabupaten Sanggau

di antara 1°10' Lintang Utara dan 0°35' Lintang Selatan dan di antara 109°45' dan 111°11' Bujur Timur. Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sanggau adalah sebelah utara berbatasan dengan Malaysia Timur (Sarawak), sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ketapang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sekadau, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Landak.

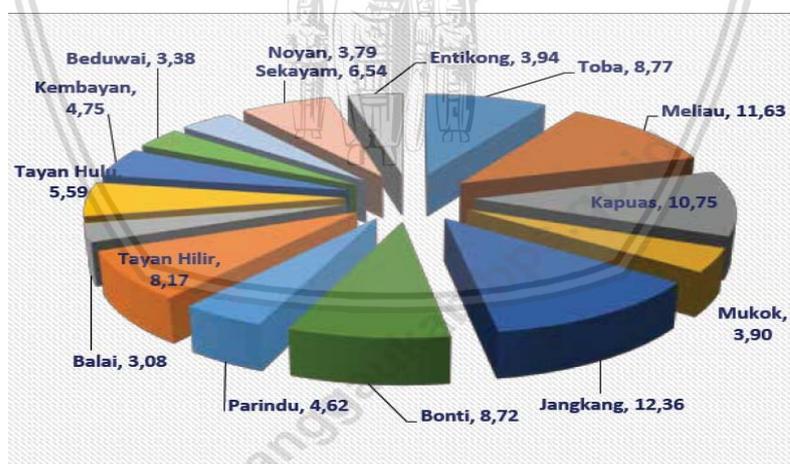
Tabel 1 Batas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sanggau

No	Kecamatan	Utara	Selatan	Timur	Barat
1	Toba	Tayan Hilir	Kabupaten Ketapang	Meliau	Kabupaten Kubu Raya
2	Meliau	Tayan Hilir, Kapuas	Kabupaten Ketapang	Kapuas, Kabupaten Sekadau	Toba
3	Kapuas	Bonti, Jangkang	Meliau, Kabupaten Sekadau	Mukok, Kabupaten Sekadau	Parindu, Tayan Hilir, Meliau
4	Mukok	Jangkang	Kabupaten Sekadau	Kabupaten Sekadau	Kapuas
5	Jangkang	Kabupaten Sintang	Kapuas, Mukok	Kabupaten Sekadau	Bonti, Nayan
6	Bonti	Noyan	Parindu, Kapuas	Jangkang	Kembayan
7	Parindu	Bonti	Tayan Hilir	Kapuas	Tayan Hulu
8	Tayan Hilir	Tayan Hulu, Balai	Toba, Meliau	Kapuas, Parindu	Kabupaten Landak
9	Balai	Tayan Hulu	Tayan Hilir	Tayan Hilir	Kabupaten Landak
10	Tayan Hulu	Kembayan	Tayan Hilir, Balai	Parindu	Kabupaten Landak
11	Kembayan	Beduwai	Tayan Hulu	Noyan, Bonti	Kabupaten Landak
12	Beduwai	Sekayam	Kembayan	Noyan	Kabupaten Landak
13	Noyan	Sekayam	Kembayan, Bonti	Jangkang	Beduwai, Sekayam

14	Sekayam	Entikong, Malaysia Timur	Beduwai	Kabupaten Sintang	Kabupaten Landak
15	Entikong	Malaysia Timur	Sekayam	Sekayam	Kab. Landak, Kab. Bengkayang

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2017

Kecamatan terluas di Kabupaten Sanggau adalah Kecamatan Jangkang dengan luas 1.589,20 km², sedangkan Kecamatan Balai merupakan kecamatan terkecil di Kabupaten Sanggau dengan luas 395,60 km². Pada umumnya Kabupaten Sanggau merupakan daerah dataran tinggi yang memiliki bukit dan rawa-rawa yang dialiri beberapa sungai. Beberapa sungai besar diantaranya Sungai Kapuas, Sungai Sekayam, Sungai Mengkiang, Sungai Kambing dan Sungai Tayan. Sungai-sungai kecil lainnya merupakan cabang dari Sungai Kapuas yang saling berhubungan.



Gambar 2: Persentase Luas Wilayah Kabupaten Sanggau Menurut Kecamatan

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2017

Tabel 2 Luas Wilayah Kabupaten Sanggau Menurut Tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota	Luas (Km ²)
1	Toba	Teraju	1.127,20
2	Meliau	Meliau	1.495,70

3	Kapuas	Sanggau	1.382,00
4	Mukok	Kedukul	501,00
5	Jangkang	Balai Sebut	1.589,20
6	Bonti	Bonti	1.121,80
7	Parindu	Pusat Damai	593,90
8	Tayan Hilir	Kawat	1.050,50
9	Balai	Batang Tarang	395,60
10	Tayan Hulu	Sosok	719,20
11	Kembayan	Tanjung Merpati	610,80
12	Beduwai	Bereng Berkawat	435,00
13	Noyan	Noyan	487,90
14	Sekayam	Balai Karanganyan	841,01
15	Entikong	Entikong	506,89

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2017

Pada tahun 2016, jumlah penduduk di Kabupaten Sanggau sebanyak 451.211 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 233.128 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 218.083 jiwa. Dilihat dari kepadatan penduduk di Kabupaten Sanggau, Kecamatan Parindu memiliki jumlah penduduk dengan kepadatan terbesar, yaitu 64 jiwa per km² yang berarti dua kali lipat kepadatan penduduk Kabupaten Sanggau yang sebesar 35 jiwa per km². Kecamatan Toba merupakan kecamatan dengan jumlah kepadatan penduduk terkecil, yaitu sebesar 11 jiwa per km². Untuk persebaran penduduk di Kabupaten Sanggau, Kecamatan Kapuas menduduki urutan pertama dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu 86.428 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Noyan sebesar 10.399 jiwa.

Tabel 3 Penduduk Kabupaten Sanggau Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2016

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Toba	6.663	5.988	12.651
2	Meliau	25.787	23.469	49.256
3	Kapuas	43.358	43.070	86.428
4	Mukok	10.005	9.524	19.529

5	Jangkang	15.162	13.621	28.783
6	Bonti	11.532	10.699	22.231
7	Parindu	19.602	18.471	38.073
8	Tayan Hilir	17.580	16.216	33.796
9	Balai	12.219	11.264	23.483
10	Tayan Hulu	18.604	17.245	35.849
11	Kembayan	14.377	13.596	27.973
12	Beduwai	5.818	5.477	11.295
13	Noyan	5.492	4.907	10.399
14	Sekayam	17.659	16.165	33.824
15	Entikong	9.270	8.371	17.641

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2017

Lapangan usaha di Kabupaten Sanggau didominasi dari sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk Kabupaten Sanggau, yaitu sebesar 73,49 persen terhadap seluruh pekerja. Hal ini dikarenakan sektor pertanian terkonsentrasi pada daerah perdesaan dan sebagian besar penduduk Kabupaten Sanggau berdomisili di daerah perdesaan, sehingga mata pencaharian masyarakat di daerah perdesaan bergantung pada sektor pertanian. Sektor kedua terbesar setelah sektor pertanian adalah sektor perdagangan dengan penyerapan pekerja sebesar 9,05 persen. Sektor ketiga setelah perdagangan adalah sektor jasa-jasa sebesar 5,46 persen diikuti sektor industri pengolahan sebesar 4,9 persen. Sektor konstruksi, transportasi, dan sektor lainnya berturut-turut menyerap tenaga kerja sekitar 2,76 persen; 1,44 persen; 2,9 persen.

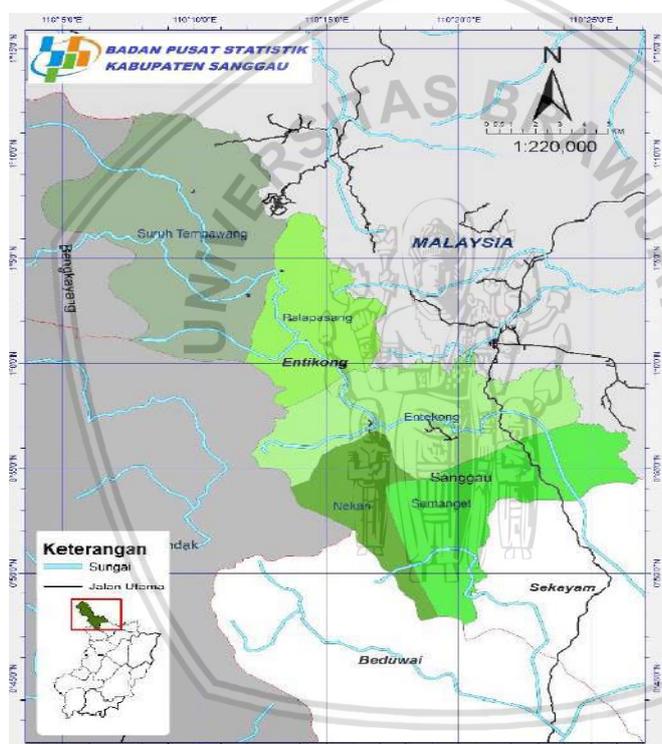
Tabel 4 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sanggau Tahun 2015

Lapangan Usaha	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
Pertanian	71,01	77,46	73,49

Industri Pengolahan	5,25	4,34	4,9
Konstruksi	4,48	0	2,76
Perdagangan	7,6	11,4	9,05
Transportasi	2,34	0	1,44
Jasa-Jasa	5,19	5,89	5,46
Lainnya	4,13	0,91	2,9
JUMLAH	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

2. Gambaran Umum Kecamatan Entikong



Gambar 3: Peta Kecamatan Entikong
 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau

Kecamatan Entikong merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di bagian utara Kabupaten Sanggau. Kecamatan Entikong terletak pada koordinat 1,13° Lintang Utara sampai 0,37° Lintang Selatan dan 104° Bujur Timur sampai 111,19° Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Serawak Malaysia Timur



2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sekayam
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sekayam dan Kabupaten Landak
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang

Tabel 5 Luas Wilayah Entikong Menurut Desa Tahun 2016

Desa	Luas Daerah	
	Km ²	Hektar
Nekan	100,53	10053
Semanget	62,54	6254
Entikong	110,98	11098
Suruh Tembawang	148,82	14882
Pala Pasang	84,02	8402

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2017

Berdasarkan data tabel di atas, luas Kecamatan Entikong adalah 506,89 km² yang terdiri dari lima desa/kelurahan yang semuanya berstatus desa. Jumlah desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Entikong selama lebih dari sepuluh tahun terakhir ini tidak mengalami perubahan. Desa/kelurahan Suruh Tembawang merupakan desa terluas di Kecamatan Entikong dan Desa Semanget merupakan desa/kelurahan dengan wilayah terkecilnya.

Tabel 6 Nama-nama Desa dan Dusun di Kecamatan Entikong

Nama Desa	Nama Dusun
Entikong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entikong 2. Sontas 3. Serangkang 4. Merau 5. Peripin 6. Entikong Benuan 7. Entikong Tapang 8. Serangkang Raya

Semanget	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semanget 2. Semeng 3. Panga 4. Semanget Nijau 5. Sekunyit 6. Panga Bintawa
Nekan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nekan 2. Punt Tapau 3. Punt Engkaras 4. Punt Kayan 5. Punt Meraga 6. Grama Jaya
Pala Pasang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entabang 2. Mangkau 3. Pala Pasang 4. Suruh Engkadok
Suruh Tembawang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suruh Tembawang 2. Pool 3. Gun Jemak 4. Badat Lama 5. Sekajang 6. Senutul 7. Badat Baru 8. Gun Tembawang 9. Kebak Raya 10. Gita Jaya

Sumber: Kantor Camat Entikong, 2017

Topografi Kecamatan Entikong ada yang berupa lereng/puncak, lembah, dan dataran. Beberapa akses dari desa/kelurahan masih ada yang menggunakan jalur air untuk menuju ke pusat pemerintahan kecamatan. Sedangkan akses untuk menuju ke desa/kelurahan di Kecamatan Entikong masih ada yang termasuk kategori sulit.

Tabel 7 Jarak Jalan Darat Antara Kantor Camat Dengan Kantor Desa dan Jenis Sarana Transportasi dalam Kecamatan Entikong

Desa	Jarak (Km)	Jenis Sarana Transportasi
Nekan	13,5	Darat

Semanget	6	Darat
Entikong	1	Darat dan Air
Suruh Tembawang	42	Darat dan Air
Pala Pasang	30	Darat dan Air

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2017

Tabel 8 Keadaan Perjalanan Menuju Desa-Desa di Kecamatan Entikong

Desa	Perjalanan		
	Normal	Sulit	Sangat Sulit
Nekan	Ya	Tidak	Tidak
Semanget	Ya	Tidak	Tidak
Entikong	Ya	Tidak	Tidak
Suruh Tembawang	Tidak	Tidak	Ya
Pala Pasang	Tidak	Tidak	Ya

Sumber: Kantor Camat Entikong, 2017

Tabel 9 Sarana Transportasi Perjalanan Desa di Kecamatan Entikong

Desa	Sarana Perjalanan			
	Mobil	Ojek Motor	Sungai	Jalan Kaki
Nekan	√	√	-	√
Semanget	√	√	-	√
Entikong	√	√	√	√
Suruh Tembawang	-	-	√	√
Pala Pasang	-	-	√	√

Sumber: Kantor Camat Entikong, 2017

Pada tahun 2016, penduduk di Kecamatan Entikong berjumlah 17.641 jiwa. Jika dirinci, jumlah penduduk laki-laki 9.207 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 8.371 jiwa. Desa yang memiliki jumlah penduduk terpadat adalah Desa Entikong, yaitu 74,62 jiwa per km². Desa Pala Pasang merupakan desa dengan kepadatan penduduk terkecil, yaitu sebesar 12 jiwa per km².

Tabel 10 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Entikong Menurut Desa Tahun 2016

Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio
Nekan	1.370	1.262	2.632	109



Semanget	1.326	1.244	2.570	107
Entikong	4.391	3.890	8.281	113
Suruh Tembawang	1.660	1.490	3.150	111
Pala Pasang	523	485	1.008	108
JUMLAH	9.270	8.371	17.641	111

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2017

B. Penyajian Data

1. Pengelolaan Ekonomi Kawasan Perbatasan Dalam Pendekatan Kesejahteraan

a. Identifikasi potensi ekonomi berbasis komoditas unggulan melalui kriteria-kriteria komoditas unggulan, yakni:

1) Sifat strategis komoditas, yang terdiri dari:

a) Permintaan pasar

Permintaan pasar lada di Kecamatan Entikong didominasi dari masyarakat yang tinggal di Malaysia. Permintaan lada terbilang selalu tinggi walaupun sebagian besar permintaan lada dilakukan melalui perdagangan tradisional. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hanifah selaku pegawai di KPPBC Entikong, bahwa:

“Selama ini data mengenai permintaan pasar lada di Kecamatan Entikong sebagian besar masih sulit didapat karena banyak masyarakat yang menjualnya melalui tengkulak karena dibeli dengan harga tinggi. Kalau dijual di pasar lokal jauh beda sama di Malaysia. Permintaan pasar lada yang dicatat oleh pihak KPPBC hanya di tahun 2017 dengan nilai ekspor sebesar Rp 1.602.425.755,00 dan volume ekspornya yaitu 34.910,00 kilogram. Jumlah tersebut sudah termasuk lada putih dan lada hitam”(wawancara dilakukan pada tanggal 17 Januari 2018, Pukul 09.15 WIB).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa permintaan pasar lada masih didominasi oleh para tengkulak di Malaysia. Lada yang dihasilkan

para petani di Kecamatan Entikong dibeli dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan jika dijual di pasar lokal.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Farchan selaku Kepala Sub Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen Bea Cukai Entikong, bahwa:

“Lada tetap dicatat pihak bea cukai sebagai komoditas ekspor, tapi sebagai barang tradisional lintas batas. Lada yang dibawa ke Malaysia biasanya 16 sampai 20 karung pakai mobil pribadi. Para eksportir lada banyak yang nggak berbadan hukum alias nggak melengkapi dokumen pemberitahuan ekspor barang jadi seringkali ekspor tradisional nggak tercatat bea cukai. Dari pihak cukai sudah sering menyarankan agar petani tradisional punya usaha dagang sebagai badan usaha resmi supaya lada bisa dicatat lebih detail oleh pihak bea cukai. Kami udah sering mengadakan sosialisasi kepabeanan terkait ekspor yang bertujuan untuk membekali para pelaku usaha pertanian, khususnya lada agar bisa melakukan ekspor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sangat disayangkan sekali kalau lada yang jadi komoditas unggulan di sini hanya bisa dijual dalam jumlah tertentu ke Malaysia. Mereka juga sering dapat penjelasan tentang proses syarat perizinan pendirian badan usaha yang diperlukan untuk dapat melakukan kegiatan ekspor sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tapi sampai sekarang ya masih banyak saja yang melakukan ekspor nggak sesuai ketentuan (Wawancara dilakukan pada tanggal 17 Januari 2018, pukul 09.37 WIB).



Gambar 4 : Sosialisasi Kepabeanan
Sumber : KPPBC Entikong, 2017

Hasil wawancara di atas membuktikan bahwa selama ini masih terdapat kendala yang dialami pihak Bea Cukai dalam mencatat data permintaan pasar lada. Hal tersebut terjadi karena masih banyak petani lada yang melakukan ekspor tanpa memiliki dokumen resmi pemberitahuan ekspor sehingga Bea Cukai mengalami kesulitan dalam mencatat kegiatan ekspor lada yang dilakukan selama ini. Bea Cukai sudah sering melakukan sosialisasi kepada para petani di Kecamatan Entikong, khususnya petani lada terkait pelaksanaan ekspor yang sesuai dengan ketentuan. Walaupun pihak Bea Cukai Entikong sering melakukan sosialisasi kepabeanan terkait ekspor dan sosialisasi syarat perizinan pendirian badan usaha, masih banyak petani lada yang tetap melakukan eskpor lada tanpa dokumen resmi.

b) Dukungan pemerintah dalam pengembangan komoditas

Dukungan dari pemerintah setempat yang diberikan kepada para petani lada di Kecamatan Entikong diantaranya dalam bentuk program-program yang diberikan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau. Program-program tersebut antara lain Pelatihan Pengendalian Hama Terpadu PHT Perkebunan (SL-PHT), Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) Lada, Fasilitasi Pupuk dan Pengembangan Tanaman Lada Rakyat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kurniawan, SP selaku Kasi Pengembangan Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, bahwa:

“Para petani diberikan berbagai bantuan yang sifatnya meliputi perluasan tanaman untuk mendukung penguatan produksi tanaman, yaitu dalam bentuk pemberian bibit lada yang unggul. Bibit yang kami sediakan merupakan bibit yang sudah memiliki sertifikat. Selain itu bantuan untuk mendukung pasca panen juga disediakan berupa alat-alat yang diperlukan selama melakukan kegiatan panen lada seperti adanya lantai jemur dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk merendam lada”(wawancara dilakukan pada tanggal 16 Januari 2018, Pukul 12.30 WIB).

Hasil wawancara di atas menunjukkan telah adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Sanggau dalam upaya meningkatkan kualitas lada petani lada Kecamatan Entikong. Pemerintah daerah memberikan bantuan dari sejak mulai pembibitan hingga pasca panen.

Dukungan produksi lada juga didukung oleh pemerintah setempat dengan dibentuknya Kelompok Usaha Bersama Batas Negeri Indonesia atau KUB Bageri. KUB Bageri Kecamatan Entikong dibentuk pada tanggal 16 Februari 2017 di Dusun Peripin, Desa Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. KUB Bageri menggeluti bidang usaha industri makanan dan industri kerajinan berbasis potensi sumber daya alam yang ada, termasuk lada yang menjadi komoditas unggulan masyarakat lokal. Dasar pembentukan KUB Bageri adalah menciptakan usaha masyarakat lokal yang maju dan mandiri, sedangkan tujuan berdirinya KUB Bageri adalah untuk menanamkan jiwa kewirausahaan di perbatasan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengangkat citra daerah Entikong sebagai daerah pebatasan negara.

c) Komoditas Pengganti yang Bersifat Suplementer

Komoditas pengganti yang ada di Kecamatan Entikong yang selama ini diandalkan oleh masyarakat setempat adalah karet. Menurut penuturan Bapak Kurniawan, SP selaku Kasi Pengembangan Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, bahwa:

“Sebenarnya ada dua komoditas suplementer di Kecamatan Entikong, yaitu kelapa sawit dan karet. Dari kedua komoditas tersebut, karet adalah komoditas yang menjadi primadona masyarakat Entikong untuk menggantikan lada apabila harga lada di pasaran anjlok walaupun sekarang ini udah banyak perkebunan kelapa sawit di sekitar Kecamatan Entikong maupun Kabupaten Sanggau. Ada beberapa faktor yang menyebabkan minat terhadap karet lebih tinggi dibandingkan kelapa sawit. Pertama, karena karet mengikuti harga pasar internasional sehingga jika para petani karet menjual hasilnya di pasaran, dapat menghindari penentuan harga yang merugikan bagi petani. Kedua, karet lebih mudah dijual karena tidak seperti kelapa sawit yang harus diolah terlebih dahulu menjadi minyak (CPO). Ketiga, kebanyakan pemasaran kelapa sawit harus mengatasnamakan perusahaan. Kebutuhan konsumsi karet di dunia sangat menentukan fluktuasi harga karet di tingkat pengusaha dan petani karet. Dengan kata lain, harga karet ditentukan oleh mekanisme pasar global. Artinya semakin besar permintaan pasar maka harga akan naik sebaliknya jika permintaan kurang dan persediaan barang cukup banyak maka harga akan turun. Alhamdulillah sampai tahun ini konsumsi karet terus meningkat” (wawancara dilakukan pada tanggal 16 Januari 2018, Pukul 13.00 WIB).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa karet merupakan komoditas yang diandalkan masyarakat Kecamatan Entikong sebagai komoditas pengganti saat lada mengalami penurunan harga yang drastis. Walaupun perkebunan kelapa sawit sudah mulai merebak di Kecamatan Entikong, karet tetap dipilih sebagai komoditas pengganti dikarenakan beberapa alasan. Pertama, harga karet mengikuti harga pasar internasional sehingga para petani tidak terlalu merasa khawatir akan

ada oknum yang memperlmainkan harga pasar. Kedua, pengolahan karet lebih sederhana dibandingkan kelapa sawit yang harus diolah terlebih dahulu menjadi minyak (CPO) untuk mendapatkan nilai jual yang tinggi. Ketiga, apabila ingin memasarkan olahan kelapa sawit, harus mengatasnamakan nama perusahaan. Menurut penuturan Bapak Binus salah satu warga pemilik kebun karet di Kecamatan Entikong menuturkan, bahwa:

“Kami lebih suka menjual karet saat harga lada turun drastis. Karet alam kan bisa diolah jadi macam-macam barang. Ngolahnya juga gampang. Tidak seperti kelapa sawit yang dijadikan minyak dulu barulah nilai jualnya tinggi. Kalo udah jadi, olahan karet bisa dipakai secara langsung dan tak langsung atau bisa juga melalui proses industri jadi ada nilai tambah produk, contohnya ban yang dipakai untuk kendaraan. Karet yang masih mentah pun di sini tetap ada yang mau beli. Kelapa sawit ya ada memang di sini tapi yang mampu ngolahnya masih sedikit. Biayanya kan mahal, belum lagi transportasinya. Kalo tak atas nama perusahaan susah jadinya. Mau ngurus izinnya pasti lama dan panjang jadi kami lebih milih karet”(wawancara dilakukan pada tanggal 17 Januari 2018, Pukul 07.50 WIB).

Hasil wawancara di atas memperkuat fakta bahwa masyarakat Kecamatan Entikong menganggap karet lebih unggul dibandingkan kelapa sawit sehingga dipilih menjadi komoditas suplementer. Selain karena harga karet yang mengikuti pasar internasional, masyarakat merasa lebih mudah dan murah mengelola karet karena kelapa sawit membutuhkan biaya yang lebih besar mulai dari pengolahan, pengangkutan, hingga pemasaran.

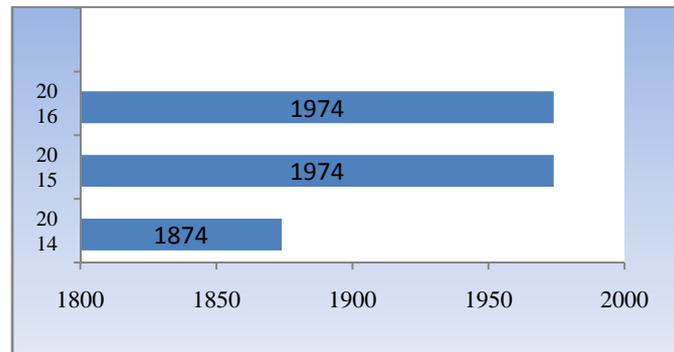
Hal ini diperkuat dari penuturan Apen yang merupakan petani lada di Kecamatan Entikong:

“Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Entikong tidak merasakan krisis ekonomi yang waktu itu kurs Dollar terhadap Rupiah melambung di atas Rp. 10.000,00. Karena kan harga karet mengikuti nilai kurs jadinya kami sebagai masyarakat biasa pun ikut menikmati dampaknya. Harga karet yang menurut kami menguntungkan membuat para petani semangat menoreh (menyadap) karet setiap harinya. Misalnya, karet yang dihasilkan dihargai Rp 20.000,00 per kilogram, produksi karet yang paling sedikit 10 kilogram yang didapatkan dari hasil menoreh sejak subuh hingga jam 11 siang bisa menghasilkan keuntungan sebesar Rp 200.000,00. Para petani juga melakukan penanaman baru maupun penanaman kembali (*replanting*) untuk menggantikan pohon karet yang sudah tua dan menurun produktivitasnya. Ada dua jenis karet yang dijual, namanya karet sintesis dan karet alam. Yang paling laku dibeli itu karet alam”(Wawancara dilakukan pada tanggal 17 Januari 2018, Pukul 08.00 WIB).

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa narasumber di atas menunjukkan bahwa karet merupakan komoditas suplementer di Kecamatan Entikong. Karet dianggap lebih memberi keuntungan karena harga mengikuti nilai kurs dan mengikuti harga pasar internasional. Pengolahan karet juga lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan kelapa sawit yang harus melalui pengolahan di pabrik terlebih dahulu. Pemasaran karet juga lebih mudah karena dapat dijual secara perseorangan.

2) Nilai Ekonomi Komoditas

a) Jumlah Produsen Komoditas

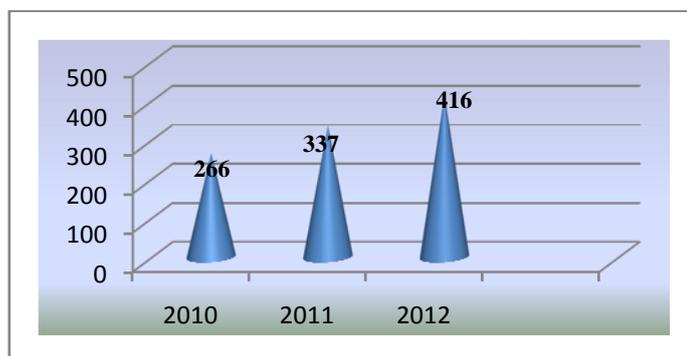


Gambar 5: Jumlah Produsen Lada Tahun 2014-2016

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2017

Data grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah produsen lada di Kecamatan Entikong meningkat dari tahun 2014 ke tahun 2015, walaupun pada tahun 2015 hingga 2016 produsen lada tetap berjumlah 1974 KK (Kepala Keluarga). Jumlah produsen petani lada yang stabil di Kecamatan Entikong disebabkan sebagian masyarakat beralih mengandalkan hasil dari perkebunan kelapa sawit. Apabila tidak memiliki perkebunan kelapa sawit sendiri, masyarakat menjadi karyawan atau mitra usaha perkebunan kelapa sawit. Hingga sekarang, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah memperoleh IUP (Izin Usaha Perkebunan) dari pemerintah Kabupaten Sanggau yang berlokasi di kawasan perbatasan adalah PT. Bumi Tata Lestari (BTL), PT. Global Kalimantan Makmur (GKM), PT. Sepayang Inti Surya Utama 2 (SISU 2) dan PT Borneo Khattulistiwa Palma (BKP) dan PT Mitra Karya Sentosa (MKS).

b) Tingkat Produksi Komoditas



Gambar 6: Tingkat Produksi Lada di Kecamatan Entikong Tahun 2010-2012 (Ton)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2017



Gambar 7: Tingkat Produksi Lada di Kecamatan Entikong Tahun 2013-2016 (Ton)

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, 2017

Data grafik tingkat produksi lada di atas menunjukkan bahwa produksi lada di Kecamatan Entikong cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan produksi lada paling drastis terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 691 ton dari yang sebelumnya sebesar 347 ton pada tahun 2015. Peningkatan produksi lada ini disebabkan semakin banyak petani lada di Kecamatan Entikong yang memahami teknik budidaya lada secara baik dan benar. Kendala yang masih dihadapi sebagian besar petani lada di Kecamatan Entikong adalah biaya produksi lada yang besar bagi petani

yang membudidayakannya secara kontinuitas. Petani lada kontinuitas tidak akan menanam lada apabila hasilnya tidak menutupi biaya produksi. Ketika harga lada mahal atau tinggi, petani akan segera menanam. Tidak hanya masalah penanaman, pemanen lada juga kebanyakan menyesuaikan saat harga tinggi. Ketika harga tinggi, petani akan lebih banyak menjual lada hitam dikarenakan panennya lebih cepat dan lebih mudah. Sistem panen seperti membuat pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau sulit mengukur besarnya biaya produksi lada secara pasti dalam setiap hektar karena produksi bersifat fluktuatif (Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, 2018).

c) Keunggulan Komparatif Komoditas

Sebagai salah satu komoditas unggulan di Kecamatan Entikong, sampai saat ini lada masih dianggap memiliki daya dari aspek keunggulan komparatif. Lada yang berasal dari Entikong tidak kalah terkenal dengan lada yang berasal dari negara lain, khususnya cita rasa dan aromanya yang khas. Hasil perkebunan lada masyarakat Entikong juga relatif ditawarkan dengan harga tinggi, terutama lada putih. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kurniawan, SP selaku Kasi Pengembangan Perkebunan di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau:

“Keunggulan komparatifnya kalau dihitung-hitung dari semua biaya dan waktu lada putih lebih mahal dan jauh berbeda harganya dari lada hitam. Dengan pengeluaran sedikit kami bisa dapat harga yang lebih

tinggi saat dijual. Biasanya kami beli bibitnya dari Sarawak, harganya lima ribu per batang. Itu termasuk murah harganya. Lada Entikong punya aroma dan cita rasa khas, tak kalah rasanya dari lada dari daerah lain, misalnya lada khas Lampung. Tenaga kerja buat perkebunan lada juga banyak, lagipula mereka banyaknya penduduk di sini. Jadi kita nggak repot-repot pakai tenaga kerja dari luar. Lahannya di sini juga lebih banyak dipakai buat bertanam lada”(wawancara dilakukan pada tanggal 16 Januari 2018, Pukul 11.40 WIB).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa lada di Kecamatan Entikong dikatakan memiliki keunggulan komparatif karena biaya produksi murah, harga beli yang tinggi, memiliki aroma dan cita rasa yang khas, tenaga kerja yang didominasi penduduk setempat, luas lahan yang mencukupi dan harga yang menguntungkan di pasaran.

Untuk lada hitam hasil biasanya diolah menjadi kopi, ada juga yang menjualnya dalam olahan biasa seperti lada putih. Salah satu masyarakat di Kecamatan Entikong yang memproduksi kopi lada hitam, Ibu Wahyu Widiati, S.Hut selaku Kasi Kesra Kecamatan Entikong menuturkan bahwa:

“Awalnya saya lihat potensi lada yang ada di perbatasan ini banyak juga yang memproduksi lada hitam. Dari situlah saya punya ide untuk meracik kopi dengan lada hitam. Saya lebih sering beli lada hitam dari petani lada di Desa Nekan. Terus saya olah. Caranya lada hitam dihaluskan lalu dicampur dengan bubuk kopi original. Setelah dicoba ternyata rasanya enak dan hangan dibadan. Jadi, selain petani lada hitam menjual ke Malaysia kan dapat keuntungan juga dari saya soalnya harga lada hitam lebih murah daripada lada putih. Saya pun juga dapat pemasukan dari kopi lada hitam yang saya produksi. Ide saya membuat produk Mami Ayu berbahan kopi dan lada ini juga karena setelah melihat keseharian transaksi hasil bumi masyarakat Kecamatan Entikong dan sekitarnya dengan warga negara Malaysia. Selain itu saya berkeinginan untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia di perbatasan yang kerjanya menjadi buruh pikul di sekitar pos lintas batas negara. Untuk produk Kopi Lada Hitam

kemasan 500 gram dijual dengan harga 75 ribu, kemasan 250 gram 40 ribu, kemasan 150 gram 30 ribu, kemasan 50 gram 10 ribu. Ada juga kopi lada hitam kemasan gelas harganya Rp 10.000, langsung diseduh. Sedangkan Lada bulat kemasan botol 50 gram 10 ribu dan bubuk lada hitam botol ukuran 50 gram 15 ribu. Respon konsumen lokal sangat baik, masyarakat di Malaysia juga suka sama kopi lada hitam ini. Bahkan, produk kopi mami ayu sudah masuk pasaran di Batam, Bali, Jakarta, dan Bandung walaupun masih terbilang belum rutin. Masalahnya karena belum memiliki sendiri mesin penggilingan di rumah produksinya. Selama ini jika mau memproduksi bubuk kopi dan bubuk lada, kami masih menggunakan jasa pihak ketiga yang memiliki mesin penggilingan. Saya memproduksi produk ini bersama dengan KUB Bageri. Jadi KUB Bageri itu kelompok usaha bersama atau usaha masyarakat lokal di perbatasan yang menggeluti bidang usaha industri kerajinan dan makanan berbasis potensi sumber daya alam yang ada, termasuklah itu lada yang jadi komoditas unggulan diolah jadi kopi lada hitam. Setiap bulan KUB Bageri baru bisa memproduksi kopi lada hitam sebanyak 50 kg. Di sini saya sebagai *owner* Kopi Mami Ayu. Sampai sekarang sudah 30 orang yang jadi anggota di KUB Bageri. Saya senang semenjak adanya usaha masyarakat ini kehidupan ekonomi masyarakat di perbatasan mulai meningkat, nama Entikong juga mulai terangkat dan dikenal” (wawancara dilakukan pada tanggal 17 Januari 2018, Pukul 14.45 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, keunggulan komparatif dari lada di Kecamatan Entikong adalah selain dapat dijual dalam bentuk mentah (biji), juga bisa diolah menjadi produk turunan berupa kopi lada hitam. Usaha produk kopi lada hitam di Kecamatan Entikong membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal. Petani lada juga merasa diuntungkan karena lada yang dihasilkan memiliki nilai tambah sehingga petani tidak hanya mengandalkan pemasaran lada ke Malaysia.



Gambar 8: Kopi Lada Hitam Khas Entikong
Sumber : Peneliti, 2018

d) Ketersediaan Lahan yang Sesuai

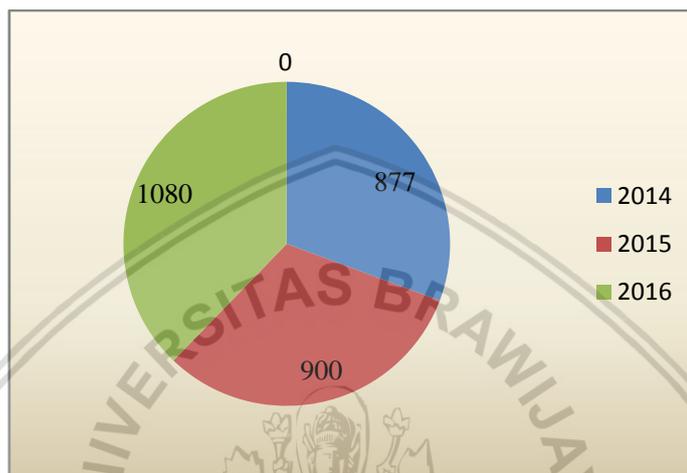
Kecamatan Entikong memiliki total luas wilayah 50.689 hektar. Sebanyak 80,01 persen digunakan sebagai lahan pertanian dan 19,99 perse digunakan sebagai lahan bukan pertanian. Sisanya masyarakat mengusahakan sawah irigasi dan tadah hujan. Luas wilayah dari Kecamatan Entikong yang dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan adalah 975 hektar, yang sebagian besar untuk perkebunan lada.

Tabel 11 Penggunaan Lahan di Kecamatan Entikong Tahun 2016 (Hektar)

Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
A. LAHAN SAWAH	842
1. Irigasi	335
2. Rawa Lebak	-
3. Rawa Pasang	-
4. Tadah Hujan	507
B. PERTANIAN BUKAN SAWAH	44842
1. Tegal/Kebun	15157
2. Ladang/Huma	2205
3. Perkebunan	975
4. Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	10192
5. Padang Penggembalaan/Padang Rumput	-
6. Hutan Negara	2064
7. Sementara Tidak Diusahakan	14244

8. Lainnya	5
C. BUKAN PERTANIAN	5005

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2017



Gambar 9: Ketersediaan Lahan Perkebunan Lada di Kecamatan Entikong Tahun 2014-2016 (Hektar)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2017

e) Kondisi Pasar

Kondisi pasar sangat mempengaruhi permintaan komoditas di suatu daerah karena kondisi pasar menentukan seberapa besar komoditas unggulan diminati masyarakat. Masyarakat di Kecamatan Entikong menjual hasil komoditas unggulannya melalui perdagangan tradisional. Belum ada perusahaan khusus atau intervensi pemasaran yang menampung dan mendistribusikan lada dari perkebunan masyarakat. Selama ini ekspor lada seringkali dilakukan oleh pelaku jasa perdagangan tanpa dokumen kepabeanan, sehingga nilai ekspor yang bisa tercatat oleh

negara hanya sedikit. Hal ini disebabkan karena belum adanya sarana dan prasarana yang mendukung di beberapa desa seperti jalan darat atau infrastruktur lainnya untuk melakukan ekspor lada secara internasional sehingga masyarakat masih menjual lada dari perkebunannya ke *tengkulak* yang berada di Malaysia (Sarawak). Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Mulyadi, salah satu petani lada di Kecamatan Entikong bahwa:

“Satu batang lada bisa menghasilkan setengah kilogram sekali panen. Panennya dijual ke Sarawak. Di sana sudah ada penampungnya. Untuk lada putih biasanya dari *tengkulak* Malaysia dibeli 70 RM atau sekitar Rp 224.000,00 per kilogram. Di pasar lokal malah lebih murah, biasanya cuma dikasi harga Rp 160.000,00 atau paling tinggi Rp 175.000,00. Padahal yang kami jual kualitasnya sama” (Wawancara dilakukan pada tanggal 17 Januari 2018, Pukul 10.18 WIB).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pasar lada di Malaysia lebih menguntungkan dibandingkan dengan kondisi pasar lokal, sehingga petani lada di Kecamatan Entikong lebih tertarik menjual hasil panennya kepada *tengkulak* di Malaysia.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Yus, petani lada di Suruh Tembawang Kecamatan Entikong bahwa:

“Kondisi pasar lada masih tidak jelas karena harga lada yang kami terima di sini ditentukan oleh para *tengkulak* di Malaysia sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi para petani. Kalau harganya lagi jelek bisa sampai 40 ribuan per kilogramnya untuk lada hitam. Tapi mau tidak mau lah itu daripada kami terima harga rendah. Belum ada sarana yang mendukung pemasaran petani lada di sini. Contohnya di desa kami yang sampai sekarang jalan daratnya belum dibangun. Untuk memasarkan lada, kami harus naik turun bukit selama tiga jam ke Malaysia. Kalo naik perahu mahal, bisa sampai satu jutaan sekali angkut” (Wawancara dilakukan pada tanggal 17 Januari 2018, Pukul 12.30 WIB).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kondisi pasar lada Entikong terbilang tidak selalu stabil. Hal tersebut dikarenakan harga lada ditentukan oleh para tengkulak di Malaysia. Walaupun lada hasil perkebunan masyarakat Kecamatan Entikong relatif dibeli dengan harga tinggi, petani lada terkadang juga merasa dirugikan apabila lada ditawarkan dengan harga yang rendah. Berdasarkan penjelasan dari beberapa informan, petani lada tidak mempunyai pilihan lain untuk memasarkan lada. Sarana dan prasarana yang tidak menjadi faktor penghambat bagi petani lada di Kecamatan Entikong untuk tetap menjual ladanya kepada tengkulak di Malaysia. Petani lada lebih memilih menjual lada ke Malaysia walaupun harus menempuh perjalanan yang sulit dan jauh karena kondisi pasar lada di Malaysia dianggap lebih menguntungkan dibandingkan kondisi pasar lokal.

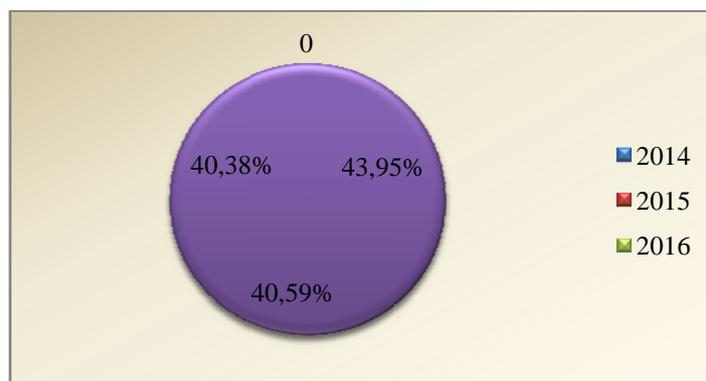
f) Mempunyai Status Teknologi yang Terus Meningkat

Petani lada di Kecamatan Entikong pada umumnya menerapkan teknologi budidaya lada dengan pola semi intensif, yaitu menggunakan tiang panjat hidup. Tiang panjat hidup dipilih karena memiliki umur produktif lebih lama dan produktivitas yang tinggi selama dilakukan pemeliharaan yang intensif. Tiang panjat hidup murah dan mudah diperoleh. Tanaman lada yang dikembangkan dengan teknologi tiang panjat hidup tetap terlihat lebih segar apabila musim kemarau karena kayu hidup yang dilekat oleh lada membantu lada mendapatkan

tambahan air dan unsure hara. Sebagian besar petani di Kecamatan Entikong mengolah lada putih karena harganya yang lebih tinggi dibandingkan lada hitam. Lada hitam dan lada putih asalnya adalah dari pohon yang sama, hanya saja cara pengolahannya berbeda. Buah lada dipanen jika sudah berwarna kuning atau merah disepertiga bulirnya dalam satu tangkai buah. Untuk lada putih biasanya berumur tujuh sampai delapan bulan, dihitung dari pertama kali ke luar bunganya. Setelah dipanen, buah lada ditampung dalam karung goni lalu direndam air bersih selama empat sampai enam harian gitulah, tergantung dari seberapa keras kulit buah lada. Jika kulit lada sudah lunak, dibagi jadi dua dalam karung goni. Kemudian karungnya diinjak dan dibalik-balik supaya kulit buah lada terlepas dari kulitnya. Selanjutnya dijemur, terakhir disimpan di tempat sejuk dan kering. Lada bisa disimpan sampai tiga tahun asal rutin dijemur tiap enam bulan sekali. Lada tidak akan menyusut karena sifatnya yang menyerap uap air di udara.

g) Mempunyai Kontribusi dalam Penyerapan Tenaga Kerja

Banyaknya perkebunan lada di Kecamatan Entikong berdampak pada penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat lokal. Pada tahun 2014, perkebunan lada berkontribusi menyerap tenaga kerja sebesar 43,95%. Tahun 2015 dan 2016 penyerapan tenaga kerja dari perkebunan lada masing-masing sebesar 40,59% dan 40,38%.



Gambar 10: Penyerapan Tenaga Kerja Perkebunan Lada Tahun 2014-2016

Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau (Diolah), 2017

Penurunan penyerapan tenaga kerja perkebunan lada di Kecamatan Entikong disebabkan karena sebagian masyarakat yang mulai menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit. Apabila tidak memiliki perkebunan kelapa sawit sendiri, masyarakat menjadi karyawan atau mitra usaha perkebunan kelapa sawit. Hingga sekarang, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah memperoleh IUP (Izin Usaha Perkebunan) dari pemerintah Kabupaten Sanggau yang berlokasi di kawasan perbatasan adalah PT. Bumi Tata Lestari (BTL), PT. Global Kalimantan Makmur (GKM), PT. Sepayang Inti Surya Utama 2 (SISU 2) dan PT Borneo Khattulistiwa Palma (BKP) dan PT Mitra Karya Sentosa (MKS).

h) Berorientasi Pada Kelestarian Sumberdaya dan Lingkungan

Lada merupakan tanaman yang termasuk ramah lingkungan selain harganya yang menguntungkan sehingga banyak masyarakat di Kecamatan Entikong memilih lada sebagai sumber penghasilannya. Masyarakat di Kecamatan Entikong mengembangkan perkebunan lada

yang ramah lingkungan, selain bertujuan untuk memperpanjang masa hidup tanaman komoditas unggulan tersebut. Perkebunan lada yang ramah lingkungan menggunakan tajar atau penyangga hidup tanaman lada. Penggunaan tajar hidup bertujuan untuk mengurangi penebangan kayu di hutan, mengingat sebagian besar hutan di Kecamatan Entikong merupakan hutan yang termasuk kawasan hutan lindung. Keuntungan penggunaan tajar hidup pada tanaman lada adalah masa hidup tanaman yang bisa mencapai 15 tahun dibandingkan menggunakan tajar mati.

Pupuk yang digunakan untuk merawat tanaman lada adalah pupuk kompos. Produktivitas yang dihasilkan dari penggunaan pupuk kompos untuk tanaman lada dapat mencapai lima kilogram per batang. Selain itu, sebagian besar petani di Kecamatan Entikong mengintegrasikan budidaya tanaman lada dan hewan ternak. Perkebunan lada ditanami kacang pinto sebagai penutup tanah. Kacang pinto yang menutupi tanah untuk tanaman lada bermanfaat menghambat penyebaran cendawan sebagai penyebab penyakit busuk pangkal batang. Untuk memangkas pertumbuhan kacang pinto yang berlebihan, para petani memelihara hewan ternak, seperti kambing dan sapi. Hewan ternak akan memakan kacang pinto dan kotorannya dapat digunakan sebagai bahan organik pembasmi cendawan sehingga lebih ramah lingkungan. Petani lada di Kecamatan Entikong yang menerapkan pola budidaya lada ramah lingkungan masih terbilang rendah, sekitar 15 persen karena masih

banyak petani yang belum memahami budidaya lada ramah lingkungan dan sesuai tuntutan pasar internasional.

b. Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur merupakan salah satu unsur daya saing yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas. Adanya infrastruktur segala aktivitas akan mudah dilakukan karena lebih terjangkau dan mengurangi biaya yang dikeluarkan sehingga menimbulkan dampak positif pada pembangunan lokal. Infrastruktur yang baik dan memadai juga memungkinkan diversifikasi produksi, perdagangan yang semakin berkembang, pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup secara umum.

Kawasan perbatasan memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang di mana interaksi langsung terjadi dengan negara tetangga serta memiliki nilai strategis terhadap kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan. Pengembangan kawasan perbatasan dilakukan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang semula cenderung *inward looking* menjadi *outward looking*. Selain menjadi wilayah pertahanan, *outward looking* juga berarti meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat dan sebagai pintu gerbang perdagangan dengan negara tetangga. Untuk mengejar ketertinggalan pembangunan kawasan perbatasan, dibutuhkan sarana dan prasarana yang menjadi salah satu penunjang terselenggaranya suatu aktivitas.

Entikong merupakan salah satu kawasan perbatasan yang mendapatkan perhatian khusus dalam pembangunan infrastruktur. Kemajuan peningkatan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Entikong sudah mencapai 99,2 persen. Adapun infrastruktur yang telah tersedia diantaranya pembangunan instalasi pengolahan air limbah, pengolahan sampah, sistem pengolahan air minum, pembangunan toilet umum, pembangunan jalan lingkungan dan pembenahan fasilitas publik lainnya.

Adanya Pos Lintas Batas Negara (PLBN)/Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo pada tanggal 21 Desember 2016 juga mendukung perekonomian wilayah di Kecamatan Entikong. Semenjak adanya PLBN, peningkatan pergerakan manusia yang keluar masuk melalui PLBN Entikong tidak hanya pelintas batas tradisional yang memanfaatkannya untuk melakukan aktivitas ekonomi, tetapi juga dari pelintas batas non tradisional. Pembangunan PLBN Entikong berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagaimana wawancara dengan Bapak Ir. Rodi Sanen, M.Si selaku Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau mengatakan bahwa:

“Kondisi PLBN Entikong sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Suatu kebanggaan juga buat masyarakat Entikong karena banyak orang yang kagum apabila melihat PLBN di sini. Untuk biaya pembangunan PLBN tahap I itu kan pemugaran ya, dananya sebesar 152 miliar. Pengerjaannya dilakukan oleh PT Wijaya Karya Persero. Itu tahap I meliputi bangunan utama PLBN, bangunan pemeriksa kargo kedatangan dan keberangkatan, monumen garuda, *check point* dan *check point* buat pemeriksaan kargo. Kemudian pembangunan PLBN tahap II diperuntukkan membangun area parkir, mess pegawai,

bangunan PLBN, masjid, klinik sampai pasar tematik. Dananya ya kira-kira habisnya 420 miliar buat yang tahap II. Yang mengerjakan dari PT Adhi Karya Persero dan PT Utama Karya Persero. PLBN Entikong memang dapat anggaran paling besar. Perbatasan lain dapat anggaran relatif lebih sedikit karena kawasan perbatasannya lebih kecil. Kalau ditotal adalah jumlahnya 700 miliar buat PLBN Entikong. Itu semua anggarannya dari APBN” (wawancara dilakukan pada tanggal 16 Januari 2018, pukul 08.50 WIB).

Berdasarkan penjelasan narasumber, biaya pembangunan PLBN Entikong berasal dari APBN. PLBN Entikong dibangun dalam dua tahap. Pembangunan tahap I menghabiskan anggaran sebesar 152 miliar yang meliputi bangunan utama PLBN, bangunan pemeriksa kargo kedatangan dan keberangkatan, monumen garuda, check point dan check point untuk pemeriksaan kargo. Proyek pembangunan PLBN Entikong tahap I dikerjakan oleh PT Wijaya Karya Persero. Pembangunan PLBN tahap II menghabiskan anggaran sekitar 420 miliar yang meliputi area parkir, mess pegawai, bangunan PLBN, masjid, klinik dan pasar tematik. Pengerjaan PLBN Entikong tahap II yaitu oleh PT Adhi Karya Persero dan PT Utama Karya Persero. Anggaran untuk PLBN Entikong lebih besar dibandingkan anggaran PLBN di wilayah perbatasan lain. Ini dikarenakan perbatasan lain merupakan kawasan perbatasan yang lebih kecil.

Tabel 12 Banyaknya Pelanggan, Air yang Disalurkan dan Nilai Penjualan di Kecamatan Entikong

2015			
Kelompok	Jumlah Pelanggan	Banyaknya Air Disalurkan (M ³)	Nilai Penjualan (Rp)
Rumah Tangga	672	23.856	71.432.450
Toko/Hotel	273	11.300	47.429.650
Pemerintah	95	4.650	10.936.600
Sosial	3	1089	-

JUMLAH	1.043	40.895	129.798.700
2016			
Rumah Tangga	599	74.889	174.410.200
Toko/Hotel	37	3.450	67.854.500
Pemerintah	21	2.675	28.469.000
Sosial	8	2.069	1.535.700
JUMLAH	665	83.083	272.269.400

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2017

Tabel 13 Jumlah Warga Negara Malaysia dan Warga Negara Indonesia yang Melalui PPLB Entikong Tahun 2016

Bulan	Kewarganegaraan			
	Malaysia		Indonesia	
	Tiba	Berangkat	Tiba	Berangkat
Januari	12	13	135	165
Februari	12	13	175	159
Maret	10	4	187	195
April	17	13	165	182
Mei	45	35	167	161
Juni	27	15	149	192
Juli	16	11	191	209
Agustus	5	6	170	189
September	6	23	158	184
Oktober	6	2	154	178
November	5	1	191	202
Desember	19	1	191	203

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2017

Tabel 14 Jumlah Keberangkatan dan Kedatangan Melalui PPLB Entikong Dirinci Menurut Kebangsaan Tahun 2016 (Orang)

Bulan	Keberangkatan							Jumlah
	ASEAN	ASIA/ Tanpa ASEAN	Timur Tengah	Eropa	Amerika	Oseania	Afrika	
Januari	1.291	111	2	34	15	7	1	1.461
Februari	1.939	130	-	38	9	10	1	2.127
Maret	1.614	162	-	45	14	18	-	1.853
April	1.171	160	1	56	10	16	1	1.415
Mei	1.510	98	2	37	12	16	1	1.676
Juni	1.544	98	1	40	15	9	2	1.709
Juli	2.174	107	5	39	9	29	-	2.363



Agustus	1.002	138	2	86	15	28	-	1.271
September	2.003	84	-	33	10	14	2	2.146
Oktober	1.382	47	2	44	2	9	4	1.490
November	1.277	52	1	31	7	5	2	1.375
Desember	3.264	82	-	49	7	14	2	3.418
Total	20.171	1.269	16	532	125	175	16	22.304
Rata-Rata	1.681	106	1	44	10	15	1	1.859
Bulan	Kedatangan							
	ASEAN	ASIA/ Tanpa ASEAN	Timur Tengah	Eropa	Amerika	Oseania	Afrika	Jumlah
Januari	877	115	2	37	10	9	-	1.050
Februari	2.106	145	-	18	21	15	2	2.307
Maret	1.478	344	-	35	14	15	-	1.886
April	1.119	206	1	48	17	18	-	1.409
Mei	1.744	106	1	36	11	21	-	1.949
Juni	1.310	69	2	43	5	8	1	1.438
Juli	2.092	114	6	72	9	33	-	2.326
Agustus	1.113	153	1	58	15	23	1	1.364
September	2.000	59	-	41	8	10	2	2.120
Oktober	1.360	63	2	47	4	3	3	1.482
November	1.476	68	1	40	6	1	-	1.592
Desember	3.292	63	-	27	8	11	13	3.414
Total	19.997	1.505	16	502	128	167	22	22.337
Rata-Rata	1.666	125	1	42	11	14	2	1.861

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2017



Gambar 11: Bangunan PLBN Entikong Tampak Depan
Sumber : Peneliti, 2018



Gambar 12: Halaman PLBN Entikong
Sumber : Peneliti, 2018

PLBN yang dibangun terbilang megah dan didukung oleh fasilitasnya yang cukup baik. Berdasarkan penjelasan Pak Raditya Ishak selaku Kepala Subseksi Penindakan Bea Cukai PLBN Entikong menjelaskan, bahwa:

“Supir mobil yang akan memasuki Malaysia hanya diperiksa kelengkapan imigrasinya dari luar sehingga tidak perlu turun untuk menjalani pemeriksaan. Tetapi, penumpang mobil dan barang bawaan pribadi harus turun untuk melintasi bagian dalam gedung utama PLBN pada layanan keberangkatan. Untuk lalu lintas barang, hanya barang-barang pribadi yang diperiksa melalui pemindai sedangkan barang-barang bawaan dalam jumlah besar dari Indonesia yang akan memasuki Malaysia, pemeriksaannya dilakukan oleh pihak Malaysia di teritorial Malaysia, begitu pula sebaliknya barang-barang yang berasal dari Malaysia dan akan masuk ke Indonesia tidak diperiksa oleh pihak Malaysia, melainkan diperiksa di PLBN Entikong”(Wawancara dilakukan pada tanggal 17 Januari 2018, Pukul 16.00 WIB).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa untuk masyarakat yang mengendarai mobil dan hendak menyeberang ke Malaysia, maka sopir tak perlu turun menjalani pemeriksaan di dalam, sopir mobil akan

diperiksa kelengkapan imigrasinya di perlintasan luar bangunan. Penumpang mobil beserta barang bawaan pribadinya harus diturunkan melintasi bagian dalam Gedung Utama, yakni bagian layanan keberangkatan. Untuk lalu lintas barang, hanya barang-barang pribadi saja yang diperiksa lewat pemindai. Untuk barang-barang bawaan dalam jumlah besar dari Indonesia yang berangkat ke Malaysia, maka pemeriksaan akan dilakukan oleh pihak Malaysia di teritorial Malaysia. Begitu pula sebaliknya, barang-barang dari Malaysia yang masuk ke Indonesia juga tidak diperiksa di Malaysia melainkan diperiksa di PLBN Entikong.



Gambar 13: PLBN Entikong Tampak Samping
Sumber : Peneliti, 2018

PLBN Entikong juga memiliki layanan pemeriksaan kesehatan bagi pelintas batas. Apabila sedang terjadi musim wabah penyakit seperti zika, flu burung, dan MERS-CoV, maka para pelintas batas akan diperiksa kesehatannya dengan menggunakan alat pendeteksi suhu tubuh. Apabila suhu tubuh lebih dari 38 derajat atau 40 derajat, maka akan ditindaklanjuti di ruang isolasi. Untuk pemeriksaan hewan dan tumbuhan yang dibawa

pelintas batas, PLBN dilengkapi bagian karantina. Hewan peliharaan dari Malaysia harus memiliki surat perlengkapan dari pihak Malaysia agar bisa memasuki Indonesia. PLBN Entikong juga dilengkapi Ruang Detensi untuk pelintas batas ilegal, dilengkapi jeruji besi.



Gambar 14: Ruang Detensi PLBN Entikong

Sumber : Peneliti, 2018

Jalan beton yang dibangun di beberapa daerah di Kecamatan Entikong juga turut mendukung perbaikan infrastruktur perbatasan. Adanya pembangunan jalan beton kampung dan dusun memberikan kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat perbatasan, terutama yang bermata pencaharian sebagai petani. Berdasarkan penuturan Bapak Sius yang merupakan salah satu warga di Kecamatan Entikong menuturkan bahwa:

“Para petani di Kecamatan Entikong semakin bersemangat untuk mengelola lahan pertanian semenjak pembangunan infrastruktur jalan beton. Misalnya petani lada yang sebelumnya harus mengangkut kebutuhan dan hasil pertanian menggunakan tenaga manusia dengan cara dipikul dan berjalan jauh, kini dapat melakukan aktivitas tersebut dengan menggunakan transportasi yang ada melewati jalan beton. Selain itu, dampak positif jalan beton juga dirasakan para guru dan murid di Kecamatan Entikong. Anak saya sekarang tidak perlu lepas sepatu kalo mau ke sekolah. Untuk jalan parallel perbatasan sudah lumayan bagus walaupun belum semuanya mulus”(Wawancara dilakukan pada tanggal 17 Januari 2018, Pukul 10.00 WIB).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Kecamatan Entikong menimbulkan dampak positif dan kontribusi yang besar, terutama bagi para petani. Infrastruktur berupa jalan beton berdampak pada semangat petani untuk meningkatkan lahan pertaniannya karena para petani mendapatkan akses yang mudah untuk membawa hasil panen. Jalan beton tersebut juga memudahkan guru dan murid di Kecamatan Entikong setiap menuju ke sekolah. Jalan paralel sepanjang perbatasan Entikong juga sudah dinilai lebih oleh masyarakat setempat, walaupun belum semua terselesaikan.



Gambar 15: Jalan Perbatasan di Kecamatan Entikong
Sumber : Peneliti, 2018



Gambar 16 : Jalan Paerbatasan Entikong
Sumber : Peneliti, 2018

Meskipun demikian, ternyata masih ada beberapa desa yang aksesnya sulit untuk menuju pemerintah di kecamatan, seperti Desa Suruh Tembawang. Menurut Bapak Rinto yang merupakan salah satu warga di Desa Suruh Tembawang menuturkan, bahwa:

“Di desa kami sama sekali belum ada infrastruktur jalan. Ada pun jembatan tapi itu kami buat seadanya. Kalau mau bikin dokumen catatan sipil seperti KTP, KK, dan akta kelahiran jadi terhambat. Kami biasanya ke kota kecamatan sebulan sekali dan harus menginap supaya mengurus administrasinya mudah soalnya mengurusnya pasti lama dan banyak. Ada perahu kalau mau, tapi mahal sekali. Bisa sampai kena di atas satu jutaan”(Wawancara dilakukan pada tanggal 21 Januari 2018, Pukul 08.00 WIB).

Hasil wawancara di atas menunjukkan belum semua wilayah di Kecamatan Entikong mempunyai akses jalan yang mudah, salah satunya Desa Suruh Tembawang. Masyarakat Suruh Tembawang masih kesulitan mendapat akses yang cepat. Contohnya adalah dalam mengurus dokumen catatan sipil, masyarakat harus menginap di kota kecamatan untuk mengurus pembuatan dokumen catatan sipil.

Hal ini diperkuat dari penuturan Bapak Gak Muliadi selaku Kepala Desa Suruh Tembawang, bahwa:

“Masyarakat di Desa Suruh Tembawang masih mengalami keterbatasan dalam hal infrastruktur, apalagi setelah panen mereka kesulitan membawa hasil panennya. Sampai sekarang belum ada infrastruktur jalan yang layak. Ada ojek tapi mahal 600 ribuan per orang. Jalannya juga tak bagus. Kalau musim berdebu, banyak debunya. Kalau musim hujan sangat becek dan licin. Resikonya besar jadi jarang yang lewat darat. Kami hanya pakai jembatan dari batang bambu biar motor bisa lewat soalnya di sini banyak sungai dan tebing. Banyaknya ya pakai perahu, itu juga mahal bayarnya. Masyarakat harus siap uang tiga sampai empat juta buat pulang pergi. Belum lagi biaya angkut barang yang dibawa juga. Harus bayar biaya tambahan 25 ribu untuk tiap satu kilogram barang yang dibawa. Jadi sebelum

barangnya ikut naik ditimbang dulu. Kalau lagi musim kemarau, masyarakat harus menempuh perjalanan sekitar delapan jam menuju Entikong. Gara-gara jalan jelek dan kendaraan masih sulit apa-apa di sini sangat mahal. Mau beli semen harganya 300 ribu yang ukuran 50 kilogram. Padahal di Entikong hanya 75 ribu. Terus contohnya harga indomie, di Suruh Tembawang harganya sampai 3.500 per bungkus, di Entikong 1.800 saja. Ingin sekali kami masyarakat Suruh Tembawang cepat-cepat punya jalan beton biar distribusi barang-barang lebih gampang. Udah pernah ada wacana mau bikin jembatan beton di desa kami, tapi memang tak mudah. Katanya perlu sekitar 900 juta. Anggaran segitu sama dengan anggaran di sini buat setahun”(Wawancara dilakukan pada tanggal 21 Januari 2018, Pukul 09.45).

Hasil wawancara di atas membuktikan bahwa Desa Suruh Tembawang merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Entikong yang belum mendapat perhatian pembangunan infrastruktur berupa jalan. Masyarakat Suruh Tembawang mengalami kesulitan setiap membawa hasil panen. Rute darat Entikong-Suruh Tembawang dengan kondisi jalan banyak terputus oleh sungai dan tebing sehingga masyarakat menggunakan batang pohon sebagai jembatan agar dapat dilalui transportasi roda dua. Namun tetap saja tidak banyak yang berani mengambil risiko lewat di sana. Saat kemarau, jalan akan sangat berdebu. Lebih parah di musim hujan, jalan akan becek dan sangat licin. Sulitnya transportasi dan distribusi barang ini membuat barang-barang di Suruh Tembawang mahal. Dari wawancara, informan menjelaskan sebagai contoh harga semen di Desa Suruh Tembawang sangat jauh berbeda dengan harga semen di Entikong. Harga semen bisa tembus Rp 300.000,00 untuk setiap satu sak berukuran 50 kilogram. Padahal di Entikong sekitar Rp 75.000,00 per saknya. Contoh lain yaitu indomie

yang harganya hanya Rp 1.800,00 per bungkus, di Suruh Tembawang bisa mencapai Rp 3.500,00. Masyarakat Suruh Tembawang sangat berharap agar pembangunan jalan beton di Desa Suruh Tembawang segera terealisasi, tetapi masih ada kendala yang dihadapi, yaitu anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan beton terbilang besar, sekitar 900 juta rupiah.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur berupa jalan di Kecamatan Entikong belum semuanya dikatakan memadai karena masih ada beberapa desa yang mengalami keterbatasan akses.



Gambar 17: Jembatan Menuju Desa Suruh Tembawang

Sumber : Peneliti, 2018



Gambar 18: Jalan Menuju Desa Suruh Tembawang
Sumber : Peneliti, 2018

Gambar di atas merupakan jalan menuju Desa Suruh Tembawang di Kecamatan Entikong. Jalan tersebut juga merupakan rute Suruh Tembawang menuju Entikong serta menghubungkan dusun-dusun lainnya di Desa Suruh Tembawang. Jembatan menuju desa tersebut merupakan satu-satunya akses darat yang hanya bisa dilalui kendaraan roda dua atau pejalan kaki. Setelah melewati jembatan yang terbuat dari bambu, masyarakat yang mengendarai motor harus melewati jalan tanah. Apabila sedang musim hujan, tidak jarang pengendara yang terjatuh akibat akses jalan yang dilalui sangat sulit. Jalan tanah yang dilewati masyarakat untuk menuju Desa Suruh Tembawang juga berupa tanjakan-tanjakan yang apabila sedang musim hujan sangat licin sehingga semakin mempersulit kendaraan roda dua melewatinya. Jika musim hujan, banyak masyarakat Desa Suruh Tembawang yang memilih untuk menunggu hingga hujan reda. Masyarakat tidak mempunyai pilihan lain karena jalan satu-satunya yang menjadi penghubung ke kota kecamatan sangat sulit dan beresiko.

Masyarakat yang berjalan kaki melewati jalan tanah tersebut juga harus berhati-hati karena setiap musim hujan sering terjadi kasus beberapa masyarakat yang tergelincir saat berjalan melewati jalan becek tersebut.



Gambar 19: Masyarakat yang Berjalan Kaki Melewati Jalan Desa Suruh Tembawang

Sumber : Peneliti, 2018

Sulitnya jalan yang harus dilalui masyarakat Desa Suruh Tembawang juga diungkapkan oleh Bapak Petrus selaku masyarakat Desa Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong:

“Kami masih bergantung pada alur sungai Sekayam. Ya pandai-pandai lah biar perahu tak sampai nabrak batu-batu di sungai itu. Ngeri sih pasti karena batunya banyak tajam. Ditambah arus sungainya cukup besar. Ndak ada pilihan lain kak, kalau ndak nekat kami ndak bisa jual hasil kebun kami. Memang begitulah cara masyarakat sini dari Desa Suruh Tembawang ke Entikong biar lebih cepat. Kalau melalui jalur darat dan berjalan kaki diperkirakan perjalanan sekitar 45 kilometer. Bisa seharian baru sampai. Kalau pakai motor trail bisa singkat sekitar dua jam. Itu pun jalannya curam dan banyak tebing. Jadi lebih amannya kalau membawa hasil pertanian dan belanja kebutuhan bahan pokok harus melalui jalur sungai. Untuk bayar naik perahu kami patungan karena mahal” (wawancara dilakukan pada tanggal 21 Januari 2018, pukul 10.10 WIB).

Berdasarkan penjelasan beberapa narasumber, masyarakat di Desa Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong mengalami keterbatasan infrastruktur jalan salah satunya untuk mengangkut hasil pertaniannya setelah panen. Infrastruktur jalan yang tidak layak berdampak pada transportasi yang mahal. Masyarakat Suruh Tembawang harus membayar tiga hingga empat juta untuk biaya transportasi pulang pergi menggunakan perahu. Masyarakat juga menghadapi medan jalan yang sulit dan beresiko untuk keselamatan karena jalan darat satu-satunya berbahaya untuk dilewati. Kebutuhan listrik masyarakat perbatasan di Kecamatan Entikong mulai meningkat karena adanya PLN Rayon Balai Karang III yang mengalir arus listrik. Menurut Bapak Suparman, S.Pd., M.Si selaku Camat di Kecamatan Entikong menuturkan bahwa:

“Masyarakat perbatasan telah mendapat bantuan penambahan daya listrik berupa tiga mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berkekuatan 1500 MW. Tetapi, belum semua desa dialiri listrik dari PLN tersebut dikarenakan beberapa daerah yang kondisi alamnya sulit dijangkau. Jadi, desa yang belum dapat aliran listrik dari PLN Rayon Balai Karang III mengimpor listrik Malaysia dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan harga Rp 550/kWh” (Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Januari 2018, Pukul 08.45 WIB).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur listrik di Kecamatan Entikong belum merata. Minimnya pasokan listrik di beberapa desa yang ada di Kecamatan Entikong disebabkan karena ada wilayah yang kondisi alamnya sulit dijangkau. Untuk mengatasi hal tersebut, masyarakat mengimpor listrik Malaysia yang bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan harga Rp 550/kWh.

Infrastruktur telekomunikasi juga diperkuat dengan adanya jaringan 4G dari operator Telkomsel. Sinyal 4G ini tidak hanya diperlukan untuk kebutuhan komunikasi, tetapi juga menunjang eksistensi wisatawan di media sosial saat berkunjung ke Entikong. Berdasarkan penuturan Pak Suparman, S.Pd.,M.Si selaku Camat di Kecamatan Entikong, bahwa:

“Sesuai amanah Presiden untuk mempercantik daerah perbatasan, kami di sini memperbaiki jaringan dengan cara menghadirkan sinyal 4G. Tapi pelanggan telkomsel di wilayah perbatasan sejauh ini masih lebih banyak menggunakan layanan telepon dan sms saja. Kami berharap dengan adanya perbaikan infrastruktur komunikasi ini bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu mempromosikan daerah perbatasan. Kan banyak tuh medsos jaman sekarang, misalnya instagram. Nah itu bisa dijadikan media buat promosi” (wawancara dilakukan pada tanggal 19 Januari 2018, pukul 09.07 WIB).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa infrastruktur dalam wujud telekomunikasi juga telah dibangun di Kecamatan Entikong melalui adanya sinyal 4G dari jaringan operator Telkomsel. Hadirnya sinyal 4G diharapkan menjadi pendukung kegiatan perekonomian kawasan perbatasan. Perbaikan infrastruktur telekomunikasi di Kecamatan Entikong diharapkan juga menjadi media untuk mempromosikan kawasan perbatasan melalui para wisatawan yang berkunjung.

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Bapak Paulus selaku masyarakat Entikong:

“Dulu tiap mau nelpon susah sekali karena sudah masuk sinyal dari Malaysia. Sekarang tower sinyal udah ditambah. Nah semenjak ada sinyal telkomsel itu sekarang bisa lah” (wawancara dilakukan pada tanggal 18 Januari 2018, pukul 10.15 WIB).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa keluhan mengenai sinyal di Kecamatan Entikong berkurang dengan adanya penambahan tower. Berdasarkan penjelasan beberapa informan disimpulkan bahwa masyarakat perbatasan Entikong telah mendapatkan kemudahan akses telekomunikasi. Akses telekomunikasi yang telah dibangun diharapkan bisa mendorong pembangunan di kawasan perbatasan, di antaranya mempercepat pertumbuhan perekonomian dan kemasyarakatan sekaligus mampu menjadi katalisator dalam mempromosikan potensi daerah.

Infrastruktur yang masih dalam tahapan pembangunan di Kecamatan Entikong adalah *dry port* (pelabuhan darat/terminal barang). *Dry port* yang dibangun tidak jauh dari PLBN Entikong. Proses pembebasan lahan untuk pembangunan *dry port* Entikong bersumber dari dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sebesar Rp 9,2 miliar. Pembangunan tahap I menggunakan dana APBN 2017 sebesar Rp 9,4. Selanjutnya pembangunan tahap II dan tahap III juga menggunakan dana APBN yang masing-masing sebesar 9,46 miliar dan 76,46 miliar. *Dry port* Entikong memiliki luas lahan sebesar 3,7 hektar. Luas bangunan pengelola terminal sebesar 1.824 meter persegi, luas gudang penimbunan sebesar 2.984 meter persegi, dan luas lapangan penimbunan sebesar 4.125 meter persegi.

Sebelum perdagangan luar negeri via Entikong beberapa tahun lalu, aktivitas bongkar muat di Tebedu Inlad Port (pelabuhan darat Sarawak) masih sangat marak dilakukan. Semenjak perdagangan luar negeri ditutup secara normal, otoritas di Entikong hanya melayani perdagangan dari

masyarakat pemegang Kartu Identitas Lintas Batas, sehingga dengan adanya *dry port*, lalu lintas perdagangan akan diaktifkan kembali dan dapat memperlancar arus barang internasional di kawasan perbatasan karena selama ini arus barang belum terkonsolidasi secara optimal, terutama untuk kegiatan ekspor. *Dry port* tersebut juga akan digunakan sebagai tempat lintas batas logistik antar negara. Pembangunan *dry port* Entikong sudah mencapai 40 persen dan ditargetkan akan selesai akhir tahun 2018.



Gambar 20: Pembangunan *Dry Port* di Perbatasan Entikong
Sumber : Peneliti, 2018



Gambar 21: Lokasi Pembangunan *Dry Port* Entikong
Sumber : Peneliti, 2018

c. Integrasi Ekonomi

Integrasi ekonomi di perbatasan Kecamatan Entikong diwujudkan dalam suatu kesepakatan yang disebut Border Trade Agreement (BTA).

Adanya BTA disebabkan karena perdagangan lintas batas yang terjadi di perbatasan Entikong-Malaysia cukup tinggi, khususnya dari perdagangan tradisional yang sudah lama terjadi antar masyarakat di kawasan perbatasan tersebut. Untuk mengatur lalu lintas barang antar kedua wilayah, Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia membuat suatu kesepakatan berupa BTA atau disebut Perjanjian Perdagangan Lintas Batas. BTA ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 1970 di Jakarta.

BTA memiliki prinsip-prinsip dasar, antara lain:

1. BTA bertujuan untuk memudahkan masyarakat perbatasan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang dengan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian perdagangan lintas batas itu sendiri, antara lain barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk segala jenis peralatan, perkakas, serta perlengkapan yang dibutuhkan untuk keperluan perindustrian dalam suatu daerah lintas batas Indonesia
2. Masyarakat perbatasan hanya diperbolehkan menjual hasil pertanian dan hasil bumi lainnya yang berasal dari suatu daerah lintas batas Indonesia (tidak termasuk minyak, mineral, dan bijih tambang)
3. Masyarakat perbatasan diperbolehkan melakukan pembelian barang dari Malaysia dengan nilai tidak melebihi 600 RM (Ringgit Malaysia) tanpa dikenakan bea masuk dalam kurun waktu satu bulan

Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia di dalam BTA dikenal dengan nama Perjanjian Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo). Forum kerjasama Sosek Malindo

selalu mengadakan pertemuan setahun sekali dengan tempat yang saling bergantian antara Indonesia dan Malaysia. Sosek Malindo diketuai oleh General Border Committee (GBC) di masing-masing negara. Kelompok Kerja Sosek Indonesia tingkat daerah di Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat No. 408 Tahun 1985 tanggal 21 Desember 1985. Surat keputusan itu selanjutnya dirubah dan disempurnakan untuk pertama kalinya dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat No. 146 Tahun 1988, kemudian disempurnakan kembali dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 4 Tahun 1999 tanggal 11 Januari 1999. Setelah dibentuk kerjasama Sosek Malindo, ditumbuhkan forum Jawatan Kuasa Sosek Malindo tingkat Negeri Sarawak dan Kelompok Kerja Sosek Malindo daerah Kalimantan Barat. Forum kerjasama sosek tingkat daerah ini bertugas menyepakati beberapa proyek penting kerjasama pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di kawasan perbatasan, menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan perbedaan politik dan sosial, serta mensinkronkan perbedaan peraturan dan perundangan antara kedua negara. Isu lain mengenai *illegal logging*, pemberantasan penyelundupan, serta perdagangan perempuan dan anak (*human trafficking*). Sedangkan isu penentuan patok batas ditangani langsung oleh sebuah Tim pemerintah pusat di Jakarta dan Kuala Lumpur.

Masyarakat yang diperbolehkan melakukan transaksi perdagangan lintas batas adalah orang-orang yang bertempat tinggal dalam daerah lintas

batas dari kedua wilayah atau negara dan yang memiliki paspor nasional atau memiliki Kartu Identitas Lintas Batas (KILB). Berdasarkan wawancara dengan Raditya Ishak, Kepala Sub Seksi Penindakan Bea Cukai PLBN Entikong menjelaskan KILB adalah pelengkap dari Pas Lintas Batas (PLB) atau dengan kata lain merupakan dokumen pengganti paspor khusus untuk masyarakat perbatasan. Setiap penduduk yang tinggal di perbatasan bisa mendapatkan KILB dengan syarat memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memiliki PLB. KILB digunakan untuk berbelanja ke Malaysia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat perbatasan.



Gambar 22: Buku Pas Barang Lintas Batas Masyarakat Kecamatan Entikong

Sumber : KPPBC Entikong

Nilai transaksi untuk masyarakat perbatasan Entikong, setiap orang hanya diperbolehkan berbelanja ke Malaysia maksimal sebesar 600 RM (Ringgit Malaysia) atau kurang lebih sebesar Rp 2000.000,00 setiap bulannya. Biasanya barang-barang kebutuhan masyarakat yang dibeli dari Malaysia adalah sembako yang meliputi minyak goreng, gula, beras, dan gas karena keempat barang tersebut mendapat subsidi dari Kerajaan Malaysia.



Gambar 23: Gula Pasir Kasar Malaysia di Pasar Entikong
Sumber : Peneliti, 2018



Gambar 24: Produk Susu Malaysia di Pasar Entikong
Sumber : Peneliti, 2018



Gambar 25: Beras Tulip Produk Malaysia di Pasar Entikong
Sumber : Peneliti, 2018



Gambar 26: Produk Gas Malaysia di Pasar Entikong
Sumber : Peneliti, 2018

Mengacu pada perjanjian Sosek Malindo Pasal II angka 3 yang menyatakan bahwa nilai barang-barang yang dibawa atau diangkut untuk maksud perdagangan lintas batas di daratan oleh setiap orang tidak diperbolehkan melebihi jumlah 600 RM/bulan. Tujuan pembatasan nilai transaksi tersebut adalah untuk mencegah perdagangan lintas batas ilegal dan mengurangi ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap produk luar negeri (Malaysia). Berdasarkan penuturan Bapak Abu Hanifah selaku Pelaksana Pemeriksa KPPBC Entikong, bahwa:

“Sebelum adanya pembatasan berbelanja sebesar 600 RM banyak masyarakat yang membawa gula dari Malaysia yang jumlahnya berton-ton, gula tersebut disinyalir akan diselundupkan. Barang selundupan yang dimaksud di sini adalah apabila masyarakat perbatasan yang menjual produk Malaysia ke luar Kecamatan Entikong, khususnya sembako. Tetapi, semenjak aturan pembatasan transaksi diperketat, saat ini setiap orang yang ingin membeli produk gula Malaysia hanya diperbolehkan membawa gula maksimal sebanyak dua karung sehingga dapat meminimalisir penyelundupan gula. Kebanyakan perdagangan ilegal skala kecil disebabkan karena adanya aktivitas perdagangan lintas batas yang melebihi limit transaksi sebesar 600 RM setiap orang per bulan, tetapi tidak membayar pajak ekspor atau biaya impor. Barang-barang yang berasal dari Malaysia masuk tanpa membayar bea atau pajak dengan memanfaatkan KILB yang dimiliki masyarakat perbatasan”(Wawancara dilakukan pada tanggal 17 Januari 2018, Pukul 09.30 WIB).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa menurut pihak Bea Cukai Entikong, adanya pembatasan belanja untuk masyarakat perbatasan Entikong sebesar 600 Ringgit Malaysia menimbulkan dampak yang positif karena adanya pembatasan transaksi tersebut dapat mengurangi bahkan mencegah kasus adanya barang selundupan (illegal), terutama barang kebutuhan sehari-hari.

Di sisi lain, pembatasan belanja 600 RM menimbulkan keluhan di kalangan masyarakat perbatasan. Nilai transaksi tersebut dinilai terlalu kecil terutama bagi para masyarakat perbatasan yang bekerja sebagai pedagang. Berdasarkan penuturan Bapak Mikail selaku masyarakat perbatasan Entikong mengatakan, bahwa:

“Kalau bisa 600 Ringgit dinaikkan lah soalnya masyarakat di sini sekarang sudah kesusahan soalnya tiap belanja nggak bisa dapat banyak. Itu kan udah dr tahun 70an, sekarang apa-apa harganya udah berubah. Kami udah pernah beberapa kali menyampaikan ini ke pihak-pihak yang berwenang. Katanya mau direvisi tuh aturannya tapi ya sampai sekarang tetap aja nilainya segitu. Ya wajar saja kalau sampe sekarang masih banyak pihak yang sembunyi-sembunyi alias menyelundupkan barang-barang” (Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Januari 2018, pukul 11.40 WIB).

Hasil wawancara di atas membuktikan bahwa transaksi 600 Ringgit Malaysia (RM) juga menimbulkan dampak negatif di kalangan masyarakat. Masyarakat perbatasan Entikong mengeluh perjanjian Border Trade Agreement (BTA) 600 RM yang berlaku sekarang ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut pengakuan informan, masyarakat Entikong telah beberapa kali menyampaikan kritik atas peraturan transaksi

600 RM di perbatasan, tetapi hingga saat ini perjanjian 600 RM belum mengalami perubahan.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibu Rosa selaku masyarakat perbatasan

Entikong, bahwa:

“600 Ringgit itu sedikit sekali bagi kami. Kebutuhan sehari-hari masyarakat kan banyak. Kalau 600 Ringgit itu sudah habis kurang dari sebulan sementara kebutuhan pokok banyak pastinya mereka tidak punya pilihan selain berbelanja ke Ibukota Provinsi. Itu kan sudah memakan biaya transportasi yang besar. Apalagi bagi mereka yang pedagang harus berbelanja barang dagangannya sekaligus membeli kebutuhannya sehari-hari. Perjanjian itu kan sampe sekarang pun belum jelas dasar hukumnya apa. Menurut kami malah pihak Malaysia yang lebih diuntungkan” (wawancara dilakukan pada tanggal 18 Januari 2018, pukul 12.01 WIB).

Hasil wawancara di atas memperkuat fakta bahwa banyak masyarakat Entikong yang mengeluh dan menilai transaksi belanja 600 RM yang tertuang dalam BTA sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, dapat disimpulkan perjanjian Border Trade Agreement (BTA) masih belum memiliki dampak signifikan yang dirasakan masyarakat perbatasan. Sebaliknya, masyarakat merasa kesulitan karena nilai transaksi dianggap terlalu kecil, sedangkan harga kebutuhan sehari-hari sudah banyak berubah. Masyarakat ditambah merasa kesulitan apabila jatah belanja 600 RM tersebut telah habis digunakan dalam kurun waktu kurang dari sebulan karena harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk berbelanja ke Ibukota Provinsi yang jaraknya jauh.

Aparat bea cukai di Entikong semakin memperketat pengawasan arus masuk barang melalui perdagangan tradisional dengan cara pemilik KILB harus hadir saat dilakukan pemeriksaan barang untuk diverifikasi, karena sering terjadi penyalahgunaan KILB di mana seseorang yang bekerja sebagai pedagang bisa memegang KILB dengan alasan banyak teman atau kerabat yang menitip. Akibatnya, jumlah barang yang dibawa masuk melebihi ketentuan perorangan sehingga barang-barang tersebut berpotensi bukan untuk keperluan rumah tangga, melainkan untuk diperdagangkan.



Gambar 27: Salah Satu Kendaraan Sedang Diperiksa Pihak Bea Cukai

Sumber : KPPBC Entikong

Pemasukan barang untuk perdagangan harus melalui prosedur perdagangan internasional. Untuk memastikan setiap orang tidak berbelanja melebihi 600 RM, pihak KBBC Entikong telah mengembangkan Sistem Informasi Kartu Identitas Lintas Batas (Siska). Melalui teknologi ini, jenis barang dan nilainya akan tercatat secara sistematis.

d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kawasan perbatasan merupakan batas negara yang tidak hanya harus dijaga, tetapi juga digali potensinya untuk meningkatkan dan memperkuat ekonomi

bangsa. Penguatan modal sosial, ekonomi, dan budaya belum harus disertai dengan peningkatan kualitas SDM. Berbagai peningkatan keterampilan dan keahlian perlu diberikan. Program pemberdayaan pada masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan terus ditingkatkan. Program tersebut dapat berupa vokasional atau program pelatihan keterampilan teknis.



Gambar 28: Halaman ULKI Kecamatan Entikong
Sumber : ULKI Entikong



Gambar 29: Bangunan ULKI Kecamatan Entikong
Sumber : ULKI Entikong

Unit Latihan Kerja Industri Entikong (ULKI Entikong) merupakan unit pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang latihan kerja industri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ULKI Entikong dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2009

Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Latihan Kerja Industri Entikong Provinsi Kalimantan Barat. Selain melaksanakan kegiatan pelatihan dan pemagangan tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri, ULKI Entikong mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Tersedianya tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
- b. Terserapnya tenaga kerja sesuai dengan keterampilan/kompetensi yang dimiliki
- c. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

Sebagai unit yang berupaya meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, ULKI Entikong telah melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan bagi para pencari kerja sejak tahun 2008. Pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh ULKI Entikong bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pelatihan diberikan selama 30 hari dan tidak dipungut biaya. Adapun pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh ULKI Entikong, antara lain:

- a. Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi-Office Tools
- b. Kejuruan Teknik Otomotif-Teknik Sepeda Motor
- c. Kejuruan Teknik Listrik-Instalasi Penerangan
- d. Kejuruan Teknik Las-Fabrikasi
- e. Kejuruan Teknik Apparel-Menjahit
- f. Kejuruan Tata Kecantikan-Kecantikan Rambut

Fasilitas-fasilitas yang terdapat di ULKI Entikong terbilang cukup lengkap. Beberapa fasilitas pendukung selain ruang kelas yang ada antara lain tempat ibadah, aula, kantin, perpustakaan hingga asrama.

Tabel 15 Jenis-Jenis dan Jumlah Gedung di ULKI Entikong

Jenis Gedung	Jumlah
Kantor	10
Tempat Ibadah	1
Asrama	16
Kantin	5
Aula	1
Perpustakaan	1
Tempat Olahraga	1
Kios 3in1	1

Sumber: Unit Latihan Kerja Industri Entikong



Gambar 30: Asrama Putra dan Putri ULKI Entikong

Sumber : ULKI Entikong

Tabel 16 Jumlah Ruang Kelas Tiap Kejuruan ULKI Entikong

Jenis Gedung	Grup	Kejuruan	Sub Kejuruan	Jumlah
Ruang Kelas	Listrik	Teknik listrik	Instalasi penerangan	1
Ruang Kelas	Tata niaga	Teknologi informasi dan komunikasi	Office tools	3
Ruang Kelas	Aneka kejuruan	Garmen apparel	Menjahit (knitting, woven)	1

Ruang Kelas	Aneka kejuruan	Tata kecantikan	Kecantikan rambut	1
Ruang Kelas	Otomotif	Teknik otomotif	Teknik sepeda motor	2
Ruang Kelas	Teknologi mekanik	Teknik las	Fabrikasi	1
Ruang Kelas	Listrik	Refrigeration	Teknik tata udara	1

Sumber: Unit Latihan Kerja Industri Entikong

ULKI Entikong juga menyediakan informasi mengenai bursa kerja. Para pencari kerja yang telah memiliki kemampuan dan mendapatkan sertifikasi mengisi formulir yang telah disediakan kemudian mengikuti prosedur yang ada. Para pencari kerja dapat mengakses langsung ke website resmi ULKI Entikong untuk mengirimkan lamaran pekerjaan.



Gambar 31: Ruang Bursa Kerja ULKI Entikong
Sumber : ULKI Entikong

ANDA AKAN DIDAFTRAKAN SEBAGAI PENCARI KERJA DI **BLKI ENTIKONG**.
Silakan mengisi formulir dengan lengkap dan benar.
Tanda * = form harus diisi (tidak boleh dikosongkan).

LOWONGAN KERJA
Silakan LOGIN untuk melamar pekerjaan secara online.

USERNAME *	<input type="text"/>
PASSWORD *	<input type="password"/>
Konfirmasi PASSWORD	<input type="password"/>
NO. KTP	<input type="text"/>
NAMA *	<input type="text"/>
* Nama harus sesuai dengan ijazah terakhir. * Jika tidak sesuai maka pendaftaran tidak akan diproses.	
JENIS KELAMIN *	<input type="text"/>
TEMPAT LAHIR *	<input type="text"/>
TGL LAHIR *	<input type="text"/>
AGAMA *	<input type="text"/>
STATUS PERKAWINAN *	<input type="text"/>
TELEPON / HP *	<input type="text"/>
ALAMAT *	<input type="text"/>
PROVINSI *	<input type="text"/>
KAB/KOTA *	<input type="text"/>
PENDIDIKAN TERAKHIR	<input type="text"/>
JURUSAN *	<input type="text"/>
SEKOLAH ASAL *	<input type="text"/>
PENDIDIKAN (NON FORMAL)	<input type="text"/>
* Ketik semua kursus/pelelitan yang pernah anda ikuti.	
KETRAMPILAN	<input type="text"/>
* Ketik semua ketrampilan yang anda bisa dikuasai.	
PENGALAMAN KERJA	<input type="text"/>
* Ketik pengalaman kerja/praktek kerja yang pernah anda lakukan.	
ALUMNI BLK *	<input type="text"/>
PHOTO	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen * Format file : JPG atau GIF, Ukuran maksimal 200 kb.
RIWAYAT HIDUP (CV)	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen * Buatlah Riwayat Hidup (CV) anda dengan jelas dan lengkap. * Format file : DOC atau PDF, Ukuran maksimal 200 kb.
<input type="button" value="KIRIM"/>	

Gambar 32 : Formulir Registrasi Pencari Kerja ULKI Entikong
Sumber : ULKI Entikong

Untuk mengikuti pelatihan, para peserta diwajibkan mendaftar terlebih dahulu melalui Kantor ULKI Entikong atau dapat mengakses website resmi ULKI Entikong, yaitu www.kios3in1.net/blkientikong/ pada menu pelatihan.



FORMULIR PENDAFTARAN PELATIHAN

* Sebelum melakukan pendaftaran online, silakan melihat Profil Kejuruan. Klik disini : 

* Setiap calon peserta hanya dapat mendaftar 1 (satu) kali.

KEJURUAN & PROGRAM

* HANYA PELATIHAN YANG MEMBUKA PENDAFTARAN YANG DITAMPILKAN.

Kejuruan :

Sub Kejuruan :

Program :

DATA PRIBADI

Nama Lengkap :

* NAMA HARUS SESUAI DENGAN IJAZAH TERAKHIR.
* JIKA TIDAK SESUAI MAKA PENDAFTARAN TIDAK AKAN DIPROSES.

Jenis Kelamin :

Tpt/Tgl. Lahir (dd/mm/yyyy) : 

Alamat :

Propinsi :

Kab/Kota :

No. Telepon / HP :

* JIKA ADA, MASUKKAN NOMOR TELEPON LEBIH DARI SATU.

Email :

* DAPAT DIKOSONGKAN JIKA BELUM ADA.

Agama :

PENDIDIKAN TERAKHIR

Pendidikan :

Jurusan :

Asal Sekolah :

Pas Foto : No file chosen

* FORMAT FILE : JPG/GIF , UKURAN MAX : 100 KB.
* DAPAT DIKOSONGKAN JIKA BELUM ADA.

Gambar 33 : Formulir Pendaftaran Pelatihan Online ULKI Entikong
Sumber : ULKI Entikong

Persyaratan pendaftaran lainnya yang harus dipatuhi para peserta adalah sebagai berikut:

- a. Fotokopi ijazah terakhir sebanyak satu lembar
- b. Fotokopi KTP sebanyak satu lembar
- c. Pas foto ukuran 3x4 berwarna latar belakang biru atau merah sebanyak tiga lembar
- d. Berumur 17-35 tahun (sedang tidak sekolah)



Gambar 34: Peserta Pelatihan Teknik Las
Sumber : ULKI Entikong



Gambar 35: Peserta Pelatihan Tata Kecantikan Rambut
Sumber : ULKI Entikong

- e. Peran Kelembagaan

Peran kelembagaan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan dalam masyarakat. Pemerintah mengatur dan menjalankan berbagai kebijakan untuk kepentingan masyarakatnya. Masyarakat Kecamatan Entikong dinaungi oleh pemerintahan Kecamatan Entikong yang terbagi menjadi lima desa yang terbagi lagi menjadi beberapa dusun dan rukun tetangga (RT).

Tabel 17 Banyaknya Dusun, Rukun Warga, Rukun Tetangga, dan Kepala Keluarga di Kecamatan Entikong Menurut Desa Tahun 2015

Desa	Dusun	Rukun Warga	Rukun Tetangga	Kepala Keluarga
Nekan	6	-	18	610
Semanget	6	-	14	574
Entikong	8	-	16	1.452
Suruh Tembawang	10	-	18	599
Pala Pasang	4	-	12	254

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau

Status Kecamatan Entikong yang merupakan kawasan perbatasan menjadikan pemerintah pusat memberikan perhatian khusus, misalnya menjadikan Kecamatan Entikong sebagai salah satu dari 26 Pusat Kawasan Strategis Nasional yang tercantum dalam Lampiran II Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional. Entikong juga ditetapkan menjadi lokasi prioritas (lokpri) I dalam Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025. Dukungan kelembagaan dari pemerintah pusat ini merupakan modal politik yang besar bagi ketahanan sosial masyarakat perbatasan di Kecamatan Entikong.

Peran masyarakat di Kecamatan Entikong masih terbilang rendah karena selama ini masyarakat hanya dijadikan objek pembangunan dibandingkan menjadi subjek. Banyak kasus di mana masyarakat dipaksa menerima setiap proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat tanpa melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Fakta tersebut berdasarkan penuturan Pak Antonius selaku masyarakat Kecamatan Entikong:

“Selama ini kita nggak tau tiap BNPP bikin program. Jadi ya kalau ada program kita terima saja. Misalnya mau dibangun jalan, kita nggak pernah tau itu duitnya darimana dan mau dibikin gimana”.
(Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Januari 2018 Pukul 08.00 WIB).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat perbatasan Entikong masih sangat rendah karena masyarakat tidak dilibatkan dalam pembangunan di kawasan perbatasan. Keterbukaan informasi mengenai pembangunan di Entikong juga sangat minim. Masyarakat tidak pernah mengetahui bagaimana awal mula rumusan program yang akan dijalankan hingga seberapa besar anggaran yang diterima setiap ada program pembangunan kawasan perbatasan di Kecamatan Entikong.

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Bapak Deri selaku masyarakat Kecamatan Entikong:

“.....makanya kan kami di sini maunya dari BNPP itu koordinasi dulu sama masyarakat perbatasan dan pemerintah setempat di sini supaya lebih tau apa yang jadi prioritas. Jangan langsung tembak aja program-program itu. Takutnya program yang ada hanya nyari keuntungan pihak-pihak tertentu”.
(Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Januari 2018 Pukul 08.27 WIB).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa peran lembaga pengelola perbatasan yang bernama BNPP belum optimal. Menurut pengakuan masyarakat Entikong, dalam mengelola perbatasan BNPP tidak pernah melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan masyarakat setempat. Disimpulkan bahwa Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) belum berperan secara optimal dalam melaksanakan tugasnya. BNPP dianggap

tidak melibatkan aspirasi masyarakat dalam pembuatan program yang diperuntukkan untuk masyarakat kawasan perbatasan.

Sedangkan Badan Pengelola Perbatasan di daerah Kalimantan Barat telah dibubarkan. Banyak masyarakat yang menyayangkan hal tersebut mengingat Badan Pengelola Perbatasan Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Berdasarkan penuturan Bapak Suparman selaku Camat Kecamatan Entikong:

“Kalau urusan perbatasan dikelola pemerintah pusat pasti akan sulit koordinasinya karena urusannya kan pasti lama dan repot. Lagipula pemerintah pusat tak paham karakteristik masyarakat perbatasan, terutama apa saja kepentingan masyarakat di sini. Tidak jarang realisasi programnya salah sasaran. Bisa-bisa pembangunan di sini lama-kelamaan tidak memperhatikan kearifan lokal. Sementara BNPP di tingkat pusat mengalami kendala yang mana tugasnya yang masih tidak jelas. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Pasal 3 Tahun 2010 tugas BNPP hanya bersifat sebagai lembaga koordinatif”
(Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Januari 2018 Pukul 09.35 WIB).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa selama ini BNPP hanya sebagai lembaga pengelola perbatasan yang bersifat koordinatif saja sehingga semua kebijakan pembangunan kawasan perbatasan didominasi oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat tidak mengerti mengenai karakteristik masyarakat perbatasan sehingga tidak jarang program-program yang direalisasikan oleh pemerintah pusat untuk masyarakat perbatasan dinilai tidak tepat sasaran dan dikhawatirkan mengancam kearifan lokal masyarakat perbatasan setempat.

Peran lembaga swasta di perbatasan Entikong juga belum dirasakan.

Fakta tersebut diungkapkan oleh Bapak Gak Muliadi selaku Kepala Desa Suruh Tembawang di Kecamatan Entikong:

“Pernah dapat bantuan dari pihak swasta. Waktu itu pun hanya dari pihak Bank Indonesia datang. Desa kami dapat bantuan seribu batang kayu ulin untuk mengembangkan perkebunan lada. Selain itu, dapat juga bantuan di sektor pendidikan berupa fasilitas olahraga untuk beberapa SD di Desa Suruh Tembawang”(Wawancara dilakukan pada tanggal 21 Januari 2018 Pukul 09.55 WIB).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kontribusi pengelolaan kawasan perbatasan dari pihak swasta juga dinilai masih sangat kurang.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Suparman, S.Pd., M.Si selaku camat Kecamatan Entikong:

“..... di sisi lain memang masih sedikit keterlibatan sektor swasta dalam mengembangkan kawasan perbatasan, misalnya melalui program CSR” (Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Januari 2018, pukul 10.07 WIB).

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas disimpulkan, selama ini Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) hanya berperan sebagai lembaga koordinatif. Hal ini berarti BNPP memiliki keterbatasan kewenangan karena hanya memiliki kewenangan sebatas koordinasi lintas instansi. Pemerintah pusat merupakan lembaga yang paling menentukan setiap kebijakan dan program yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan perbatasan. Sementara itu, peran dari pihak swasta di kawasan perbatasan juga terbilang sangat kurang.

Perhatian dari aspek keamanan dan pertahanan diberikan, yaitu berupa penempatan pasukan satuan tugas pengamanan perbatasan (satgas pamtas).

Satgas pamtas ini ditempatkan di Pos Komando Taktis Gabungan Bersama (Gabma) Malaysia-Indonesia Entikong. Di pos Gabma, pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ditugaskan bersama dengan pasukan Tentara Diraja Malaysia (TDM). Tugas satgas pamtas bermacam-macam. Mulai dari aspek keamanan hingga sosial. Peran satgas pamtas dari aspek keamanan antara lain:

1. Melakukan pengawasan dan patrol bersama Tentara Diraja Malaysia untuk mencegah terjadinya pelanggaran perbatasan antara kedua negara
2. Memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan di sepanjang wilayah perbatasan
3. Mengawasi, mencegah, dan menindak jika terjadi perusakan, pergesaran, dan pengambilan patok perbatasan
4. Mengawasi, mencegah, dan menindak setiap terjadinya penyelundupan, sabotase, dan infiltrasi melalui perbatasan
5. Mengawasi, mencegah, dan menindak jika terjadi perampokan di laut yang meluas ke daratan
6. Mengawasi dan berkoordinasi dengan instansi berwenang dalam melaksanakan lintas batas melalui kerjasama dengan instansi-instansi terkait seperti Bea Cukai, Imigrasi, dan Polri.

Peralatan yang dibawa Satgas Pamtas RI-Malaysia adalah peta, pelacak GPS, radio *handy talkie*, sangkur, helm, rompi anti peluru dan senapan Serbu 1 jenis SS1 buatan Pindad Indonesia untuk TNI, sedangkan pasukan TMD menggunakan senapan M4A1 Carbine asal Amerika Serikat.

Berdasarkan wawancara dengan Lettu Inf. Septyan Dwi Nuryadi selaku Kepala Seksi Operasi Satgas Pamtas Batalyon Infanteri 131/Braja Sakti menuturkan bahwa:

“Setiap pagi Satgas Pamtas melakukan kegiatan apel rutin terlebih dahulu. Setelah itu mempersiapkan peralatan yang dibawa untuk patroli. Kami tidak hanya patroli patok perbatasan, tetapi juga melakukan patroli jalan tikus yang mana jalan tikus digunakan untuk menyelundupkan barang illegal seperti miras dan narkoba. Patroli patok perbatasan yang pada awalnya dilakukan sebulan sekali, kini ditingkatkan menjadi dua bulan sekali. Sedangkan untuk mengawasi dan mencegah adanya aktivitas terorisme lintas batas negara, pihak Indonesia sendiri sudah memasang CCTV di titik-titik yang dirahasiakan” (Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Januari 2018, Pukul 07.00 WIB).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam mengelola kawasan perbatasan di Kecamatan Entikong dari aspek keamanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) bekerjasama dengan Tentara Diraja Malaysia (TMD) menjaga kemandirian di sepanjang wilayah perbatasan Entikong hingga Malaysia. TNI dan TDM juga memiliki tanggungjawab mencegah kejahatan lintas negara seperti penyelundupan barang-barang illegal maupun terlarang hingga mencegah kejahatan terorisme di perbatasan Entikong.



Gambar 36: Prajurit TNI bersama Tentara Diraja Malaysia Memeriksa Patok

Sumber : Peneliti, 2018



Gambar 37: TNI dan Tentara Diraja Malaysia Melakukan Patroli Bersama

Sumber : Peneliti, 2018



Gambar 38: Salah Satu Patok Perbatasan yang Rusak

Sumber : Peneliti, 2018

Tidak hanya menjaga wilayah kedaulatan negara, prajurit TNI juga berinteraksi dengan masyarakat sekitar perbatasan melalui berbagai kegiatan sosial. TNI berupaya melakukan pendekatan terhadap masyarakat sekitar perbatasan melalui kegiatan-kegiatan sosial yang bekerjasama dengan pemerintah dan tokoh masyarakat. Berdasarkan penuturan Lettu Inf. Septyan Dwi Nuryadi selaku Kepala Seksi Operasi Satgas Pamtas Batalyon Infantri 131/Braja Sakti, bahwa:

“Kami di sini juga membantu mengajar di sekolah, gotong-royong dengan warga bangun jembatan atau membangun jalan hingga memberikan pengobatan gratis. Ikutnya prajurit TNI menjadi tenaga

pendidik bukan tanpa alasan. Selain untuk menanamkan rasa cinta mereka pada Indonesia, juga karena jumlah guru di perbatasan memang terbatas. Kami juga selalu memberikan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan dan Pancasila setiap bertemu dengan masyarakat perbatasan. Ini juga merupakan upaya agar mereka tetap mencintai NKRI. Pokoknya tidak ada jarak antara prajurit TNI dengan masyarakat sekitar perbatasan” (Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Januari 2018, pukul 08.00 WIB).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa TNI di perbatasan juga memiliki kontribusi melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, disimpulkan bahwa para prajurit TNI yang bertugas di tapal batas negara ternyata tidak hanya sigap menjaga keamanan di wilayah yang berbatasan dengan negara lain, tetapi juga *multitasking*. Mulai dari mengajar anak sekolah hingga memberikan pengobatan gratis untuk masyarakat di perbatasan Entikong. Para TNI juga melakukan pembinaan dan memberikan pendidikan kebangsaan dan cinta tanah air kepada masyarakat Entikong sebagai salah satu upaya untuk memelihara jiwa nasionalisme masyarakat di perbatasan. TNI yang bertugas di perbatasan memiliki hubungan yang akrab dengan masyarakat.



Gambar 39: Seorang TNI Sedang Mengajar Ngaji Anak-Anak di Perbatasan Entikong
Sumber : Satgas Pamtas Entikong



Gambar 40: TNI Sedang Mengajar di Salah Satu Sekolah di Perbatasan

Sumber : Peneliti, 2018

2. Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Ekonomi Kawasan Perbatasan Dalam Pendekatan Kesejahteraan

Kecamatan Entikong merupakan sebuah kawasan perbatasan darat yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Sebagai sebuah kawasan perbatasan, Entikong terbilang cukup pesat dalam perkembangan ekonominya. Walaupun demikian, pengelolaan ekonomi kawasan perbatasan Entikong masih jauh dari yang diharapkan. Selama beberapa tahun ini, pemerintah berupaya mengubah paradigma pengelolaan kawasan perbatasan melalui pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) tanpa meninggalkan pendekatan keamanan (security approach) yang mana sebelumnya pendekatan keamanan paling mendominasi sehingga mengabaikan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Implementasi dalam mewujudkan pendekatan kesejahteraan di kawasan perbatasan memang tidak mudah. Masih banyak faktor-faktor yang menjadi penghambat pengelolaannya. Walaupun demikian, faktor penghambat yang

ada tentunya juga dibarengi dengan faktor-faktor pendukung. Berikut faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan ekonomi kawasan perbatasan di Kecamatan Entikong:

a. Faktor Pendukung

1) Faktor Internal

- a) Letak geografis Entikong yang berbatasan langsung dengan Malaysia

Secara geografis, letak Kecamatan Entikong menguntungkan karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Berdasarkan penuturan Pak Suparman, S.Pd., M.Si selaku camat Kecamatan Entikong menuturkan:

“Di sini kan enaknya letak Entikong berbatasan langsung sama Malaysia. Keuntungannya ya masyarakat bisa menjual komoditas unggulannya ke Malaysia. Di sana kan dibeli dengan harga lebih mahal daripada di dalam negeri. Selain itu, banyak wisatawan yang datang ke Entikong untuk sekedar jalan-jalan. Transportasinya juga mudah, cukup naik bis sudah bisa sampe ke Malaysia. Tentunya arus ke luar masuk orang-orang tersebut dibarengi dengan pendapatan masyarakat perbatasan karena para wisatawan pasti juga membelanjakan uangnya di sini” (Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Januari 2018, pukul 10.22 WIB).

Berdasarkan penjelasan informan, Entikong memiliki keunggulan dari sisi geografisnya. Letak Kecamatan Entikong yang berhadapan langsung dengan Malaysia memudahkan masyarakat melakukan aktivitas ekonomi, terutama masyarakat Entikong dapat menjual komoditas unggulan wilayahnya ke Malaysia. Letak Entikong yang berbatasan langsung dengan Malaysia juga menarik perhatian banyak wisatawan

untuk berkunjung. Arus keluar masuk wisatawan diharapkan menjadi pendorong pendapatan masyarakat Entikong.

b) Potensi sumber daya alam yang melimpah

Setiap kawasan perbatasan memiliki karakteristik masing-masing dengan potensi yang berbeda-beda. Potensi yang dimiliki kawasan perbatasan yang bernilai ekonomis cukup besar adalah Sumber Daya Alam (SDA). Kecamatan Entikong yang merupakan perbatasan darat termasuk yang memiliki potensi SDA yang melimpah. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Kurniawan, SP selaku Kasi Pengembangan Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau:

“Sumber daya alam di Kecamatan Entikong sangat potensial. Terlebih kawasan itu daerah perbatasan dan dekat dengan negara tetangga, jadi punya nilai strategis dan daya saing dari sisi ekonomi serta pariwisatanya. Potensi wisata di wilayah perbatasan di Entikong, Kalimantan Barat, jika dikembangkan dengan baik bisa menjadi sumber pendapatan yang potensial. Kecamatan Entikong banyak menghasilkan padi, beras merah, sagu, umbi-umbian, lada, kakao, pisang, talas, cabe rawit, sayur-sayuran dan buah-buahan juga tumbuh subur” (Wawancara dilakukan pada tanggal 16 Januari 2018, pukul 13.20 WIB).

Berdasarkan penjelasan dari informan, Kecamatan Entikong memiliki sumber daya alam yang melimpah. Potensi sumberdaya alam kawasan perbatasan di Kecamatan Entikong yang besar dan bernilai ekonomi tinggi menjadi faktor pendukung daya saing. Potensi pariwisata yang terdapat di Kecamatan Entikong diharapkan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat setempat.

2) Faktor Eksternal

a) Adanya Pos Lintas Batas Negara (PLBN)

PLBN yang telah dibangun di Entikong menimbulkan dampak positif bagi masyarakat perbatasan. PLBN Entikong yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo tersebut terbilang cukup megah, bahkan lebih megah dibandingkan dengan PLBN yang dimiliki Malaysia. PLBN Entikong tersebut tidak hanya dimanfaatkan sebagai fasilitas untuk mendukung aktivitas perdagangan masyarakat perbatasan, tetapi juga menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung. Sebagaimana penuturan Bapak Raditya Ishak selaku Kepala Subseksi Penindakan Bea Cukai PLBN Entikong bahwa:

“Sebelum direnovasi kondisi bangunan PLBN Entikong sangat tidak terawat dibandingkan milik Malaysia. Tapi sekarang keadannya berbalik, kita punya PLBN yang jauh lebih bagus. Dari sisi fasilitas sekarang PLBN Entikong udah sama kok dengan punya Malaysia, hanya saja usia PLBN Malaysia lebih tua. PLBN ini tentunya lebih memudahkan masyarakat untuk ke luar masuk. Sekarang waktu pemeriksaan lebih cepat, orang-orang antri pun bisa lebih nyaman, teknologi juga sudah canggih dibanding dulu. Selain itu, kepercayaan negara luar terhadap ekonomi kita makin baik karena PLBN itu sebagai jendela ke luar negeri. Orang dari negara luar jika masuk ke suatu negara yang pintu gerbangnya tidak meyakinkan, pasti imejnya udah nggak baik. Kalau mereka yang sekedar berkunjung ke sini ya pasti buat berswafoto, itu juga salah satu dampak positif karena secara tidak langsung para wisatawan ikut mempromosikan Entikong apalagi jika diunggah di media sosial” (Wawancara dilakukan pada tanggal 17 Januari 2018, pukul 16.30 WIB).

Berdasarkan penjelasan dari informan, semenjak PLBN Entikong selesai direnovasi, tampilan PLBN lebih baik bahkan dikatakan lebih bagus dibandingkan PLBN yang dimiliki Malaysia. Pelayanan yang

diberikan pihak PLBN juga meningkat karena pembangunan PLBN disertai teknologi yang lebih canggih dari sebelumnya sehingga orang-orang yang akan keluar masuk lebih tertib saat mengantri. Tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat keluar masuk orang dari Entikong-Malaysia atau sebaliknya, wisatawan yang datang ke PLBN juga tertarik berswafoto di sekitar lingkungan PLBN Entikong.

b. Faktor Penghambat

1) Faktor Internal

a) Kualitas pendidikan yang masih rendah

Pengelolaan kawasan perbatasan belum seimbang jika tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan masyarakatnya. Kondisi tersebut sampai saat ini masih terjadi di Kecamatan Entikong. Sebagian besar masyarakat perbatasan hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar. Sebagaimana penuturan Bapak Suparman S.Pd., M.Si selaku camat Kecamatan Entikong:

“Kondisi sekolah di sini jauh dari pemukiman warga. Hal ini menjadi faktor masyarakat perbatasan malas untuk mengenyam sekolah tinggi. Sekitar 70% masyarakat di sini lulusan SD saja. Yang sekolah sampai SMA kebanyakan langsung bekerja jadi TKI di Malaysia. Itu juga banyak yang berstatus illegal. Sedangkan yang bisa sampai S1, S2, ataupun S3 sangat jarang. Kalau seperti itu kan pasti susah untuk memajukan ekonomi perbatasan karena kualitas pendidikan juga berpengaruh terhadap sumber daya manusia yang ada. Biasa yang lanjut bersekolah lebih milih sekolah di Malaysia soalnya di sana sekolahnya dibangun dengan baik termasuk sarana dan prasarannya lengkap” (Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Januari 2018 Pukul 12.17 WIB).

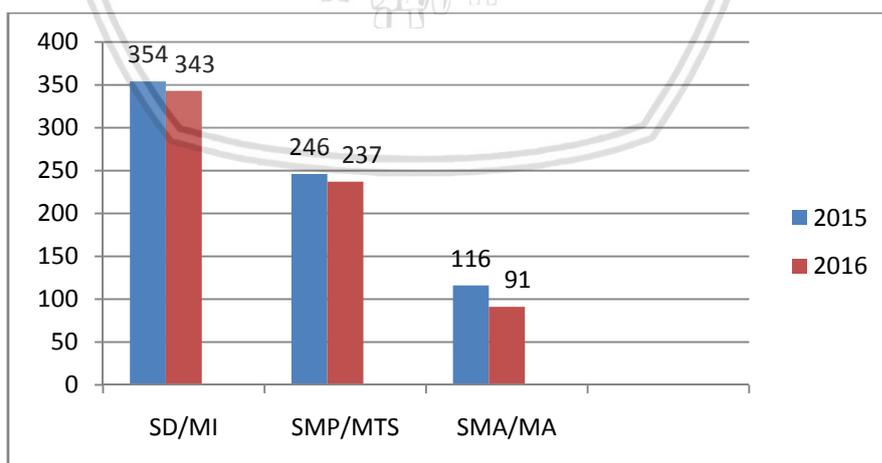
Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa banyak anak-anak perbatasan yang tidak mengenyam pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Kurangnya minat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dikarenakan mereka malas dan lebih memilih untuk bekerja di Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Anak-anak perbatasan yang masih melanjutkan sekolah lebih memilih bersekolah di Malaysia karena kondisi pendidikan di Malaysia lebih baik.

Pernyataan tersebut juga diperkuat berdasarkan wawancara dengan Ibu Siti selaku Guru salah satu Sekolah Dasar di Kecamatan Entikong:

“Banyak sekolah di desa-desa yang sarana dan prasarananya kurang. Misalnya bangku yang tidak cukup. Terpaksa pihak sekolah meminjam kursi plastik milik kantor desa. Buat tiang bendera merah putih saja kami pakai batang kayu karena belum ada tiang bendera permanen. Yang paling susah itu kalau ujian nasional tiap tahunnya. Para murid harus pergi ke pusat Kecamatan Entikong sebab pelaksanaan ujian di sana. Mereka harus naik perahu motor yang ongkosnya 1,5 juta sekali berangkat. Memang itu semua dibebankan ke biaya operasional sekolah tapi uang itu kan juga digunakan untuk menggaji para guru honorer. Contohnya SD di Desa Suruh Tembawang. Makanya banyak anak-anak yang putus sekolah atau setelah lulus SD malas untuk melanjutkan pendidikannya. Di sini bisa bersekolah sampai SMP itu sudah sangat bersyukur. Setelah itu mereka memilih ikut kerja di Malaysia, membantu orangtua berkebun atau bertani, atau sekedar jadi kuli angkut” (Wawancara dilakukan pada tanggal 24 Januari 2018 Pukul 11.00 WIB).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan di Kecamatan Entikong sangat minim. Masalah minimnya fasilitas pendidikan di Kecamatan Entikong sangat di rasakan. Tidak hanya sarana dan prasarana yang memprihatinkan, anak-anak perbatasan yang bersekolah juga harus menempuh jarak yang jauh untuk menuju ke kota

kecamatan setiap tahunnya agar dapat melaksanakan ujian nasional. Perahu motor merupakan transportasi satu-satunya yang dapat digunakan karena lebih cepat sampai walaupun memerlukan biaya yang mahal. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan di Kecamatan Entikong terbilang buruk karena fasilitas penunjang yang tidak memadai seperti bangku sekolah yang tidak sesuai dengan jumlah siswa serta tiang bendera seadanya, dan letak sekolah yang jauh dari pemukiman warga. Kondisi ini sungguh sangat jauh berbeda dengan negeri tetangga Malaysia. Di Malaysia, sekolah-sekolah dibangun dengan baik serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang representatif. Sementara di kawasan perbatasan Entikong tidak ditemukan kondisi seperti itu, sehingga tidak banyak masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan Entikong memilih bersekolah di Malaysia.



Gambar 41 : Banyaknya Siswa SD, SMP, SMA yang Lulus Tahun 2015-2016

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sanggau, 2017

Data grafik di atas menunjukkan jumlah masyarakat Kecamatan Entikong yang mampu menyelesaikan pendidikannya setiap tahun mengalami penurunan. Data dari tahun 2015-2016 menunjukkan jumlah lulusan SD masih mendominasi tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Entikong.

b) Maraknya kegiatan ilegal yang sulit dihilangkan

Berdasarkan penuturan Bapak Suparman, S.Pd., M.Si selaku camat Kecamatan Entikong, bahwa:

“Beberapa pelanggaran hukum yang terjadi di perbatasan Entikong kadang tidak ditegakkan dengan baik. Akibatnya masih banyak oknum yang tidak jera untuk melakukan pelanggaran lagi. Kebanyakan terjadi kegiatan penyelundupan misalnya *illegal logging*, penyelundupan barang, dan perdagangan manusia. Ironisnya, pelaku kegiatan ilegal seperti itu berasal dari luar perbatasan. Jikapun ada itu karena kepolosan dan ketidaktahuan mereka karena diiming-imingi keuntungan yang tidak seberapa.” (Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Januari 2018, pukul 13.18 WIB).

Berdasarkan penjelasan informan di atas menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap penanganan kasus ilegal di perbatasan Entikong menyebabkan masih banyak terjadi kegiatan-kegiatan ilegal seperti illegal logging, penyelundupan barang, dan perdagangan manusia. Pelaku kejahatan lintas batas di Entikong didominasi oleh orang-orang yang bukan berasal dari Entikong.

Beberapa kejahatan ilegal yang pernah terjadi di Kecamatan Entikong antara lain penyelundupan sabu seberat 15,39 kilogram melalui perbatasan Entikong; penyelundupan narkoba jenis sabu yang diselundupkan dari Kuching, Malaysia ke Indonesia melalui jalur tikus di perbatasan Entikong. Penangkapan tersebut petugas mengamankan

28,24 kilogram (kg) sabu dan 21.727 butir ekstasi; penyelundupan 3 kg sabu beserta 14 ribu butir ekstasi senilai Rp 7,3 miliar; penyelundupan 17 orang calon TKI ilegal melalui jalan tikus ke Sarawak; penyelundupan ikan dori fillet beku asal Vietnam yang diterima dari Sarawak; penyeludupan barang ilegal dari Malaysia melalui hutan berupa 39.120 batang rokok dengan berbagai macam merk; penyelundupan 5,15 kilogram sabu-sabu dari Malaysia dan lain-lain.

2) Faktor Eksternal

a) Sengketa penetapan batas wilayah

Masalah batas wilayah antar dua negara sampai saat ini merupakan masalah yang masih tetap ada. Demikian pula yang terjadi di sepanjang perbatasan Entikong-Malaysia. Berdasarkan penuturan Bapak Suparman, S.Pd., M.Si selaku camat Kecamatan Entikong:

“....ya jadi cuma dipasang patok batas wilayah. Saya sering dapat kabar dari tentara yang bertugas di wilayah tersebut kalau patoknya kadang bergeser, bahkan kerap hilang. Masalahnya juga di sini sebagian besar statusnya hutan lindung, Ada juga yang statusnya lahan ulayat atau adat. Kalau pengawasannya lemah sedikit saja bisa bahaya, bisa jadi konflik. Masih ada beberapa titik juga yang belum disetujui kedua belah pihak dengan alasan produk hukum yang berbeda. Yang sulit kalau misalnya ada pembangunan terus lahannya belum siap karna itu tadi” (Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Januari 2018, pukul 11.22 WIB).

Berdasarkan penjelasan informan di atas menunjukkan bahwa kondisi di sepanjang perbatasan darat Entikong-Malaysia rawan terhadap terjadinya sengketa batas wilayah karena pemerintah Indonesia-Malaysia hanya memasang patok batas wilayah yang kerap kali bergeser maupun

hilang. Wilayah Entikong sebagian besar merupakan kawasan hutan lindung. Hal ini juga yang menyebabkan rentannya patok batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia apabila minim pengawasan.

Beberapa patok batas wilayah yang belum terselesaikan antara Indonesia (Entikong)-Malaysia disebabkan adanya perbedaan persepsi mengenai dasar hukum yang digunakan. Sebelumnya Indonesia dan Malaysia telah membuat suatu MOU 1973 yang merupakan suatu produk hukum Internasional yang mengikat Indonesia dan Malaysia sebagai dasar hukum batas wilayah kedua negara.

Indonesia dan Malaysia lebih mengutamakan cara-cara penyelesaian secara damai karena, Indonesia dan Malaysia merupakan negara serumpun. Metode penyelesaian sengketa Internasional yang efektif untuk dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan kasus batas wilayah darat ini adalah dengan cara negosiasi. Upaya penyelesaian sengketa batas wilayah darat melalui negosiasi secara damai yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia ini menggunakan MOU dan hasil survey pemetaan bersama sebagai dasar dalam penyelesaian sengketa. Negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia ditempuh melalui pembentukan tim khusus yang menangani masalah perbatasan. Indonesia dan Malaysia secara rutin setiap tahun melaksanakan pertemuan delegasi kedua belah pihak dengan tingkatan *Joint Boundary Committee*, *Joint Boundary Technical Committee* dan *Co-Project Director*.

Berikut ini adalah dasar-dasar hukum yang digunakan dalam tahap-tahap penetapan batas wilayah Indonesia-Malaysia:

1. Proses Survei Penentuan Wilayah Demarkasi tahun 1973

Setelah proses penetapan terkait metode untuk menentukan wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia dilakukan, yaitu kedua negara sepakat untuk berpedoman pada perjanjian yang telah disepakati antara Belanda dan Inggris pada tahun 1891, bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan metode watershade dalam menentukan batas-batas wilayah masing-masing. Setelah disepakati, selanjutnya kedua negara kembali sepakat untuk menggunakan peta pembagian wilayah yang telah ditentukan oleh negara kolonial masing-masing dalam penentuan wilayah perbatasan berdasarkan asas *uti possidentis juris* berdasarkan perjanjian pada tahun 1915. Setelah proses penentuan delimitasi dilakukan, dalam penentuan proses demarkasi kedua negara diberikan kebebasan untuk berunding dan membuat perjanjian perbatasan dalam menentukan patok-patok di wilayah perbatasan masing-masing. Dalam proses ini pembuatan perjanjian tidak lepas dari peraturan yang ada dalam dua perjanjian sebelumnya, yaitu perjanjian tahun 1891 dan perjanjian tahun 1915. Kedua negara telah melakukan proses survei demarkasi pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1976 di Tanjung Datu, Kalimantan Barat. Tim survei masing-masing negara yang pada saat itu menggunakan metode watershade berhasil menemukan patok-patok wilayah perbatasan dan membangun pilar-pilar perbatasan, sebagai berikut: a. Pilar I : Titik patok

A 98 sampai A 156 Titik patok A 231 sampai C 1 Titik patok G sampai H 1, b. Pilar II : Titik patok D 001 sampai D 186 Titik patok D 186 sampai D 300 Titik patok D 300 sampai E 001 (Pasal 1 *Memorandum of Understanding of Demarcation Survey of International Boundary between the Government of Indonesia and the Government of Malaysia* 1976)

2. Perundingan Penetapan Wilayah Demarkasi tahun 1976

Setelah dilakukannya proses survei dan demarkasi wilayah perbatasan yang dilakukan oleh tim survei masing-masing negara, selanjutnya antara Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menuangkannya dalam bentuk perjanjian MoU. MoU sengaja dipilih oleh Indonesia dan Malaysia sebagai instrumen hukum bersama dalam perjanjian demarkasi perbatasan, karena bentuknya yang sederhana dan pembuatannya yang relatif lebih cepat. Namun, tidak menutup kemungkinan jika MoU ini apabila telah selesai sepenuhnya dalam proses survei dan pemetaan bersama akan ditingkatkan menjadi perjanjian perbatasan (treaty) yang bisa di depositkan ke PBB. 11 Dan karena MoU ini merupakan perjanjian demarkasi perbatasan, yang membahas mengenai teknis kelanjutan dari suatu penentuan patok perbatasan dari perjanjian delimitasi yang sudah selesai dibuat oleh Belanda dan Inggris dahulu, maka tidak diatur mengenai kaharusan MoU ini menggunakan nomenklatur lainnya agar bersifat mengikat, karena

MoU ini sendiri sejak ditandatangani oleh kedua pihak sudah bersifat *consent to be bound*.

Perundingan yang dilakukan oleh kedua negara membahas mengenai penetapan patok-patok serta pembagian masing-masing wilayah perbatasan kedua negara. Dalam konteks ini, tidak terjadi masalah. Namun, pihak dari Indonesia meminta izin untuk menunda penandatanganan MoU dikarenakan tim survei dari Indonesia ingin kembali menindaklanjuti dan mempertimbangkan isi dari perjanjian perbatasan tersebut dikarenakan berdasarkan hasil dari proses survei demarkasi, ditemukan bahwa wilayah Malaysia lebih menjorok ke wilayah Indonesia. Dikarenakan menurut hasil watershade wilayah Malaysia memang lebih menjorok ke Indonesia, dan setelah dipertimbangkan pada saat itu tidak adanya masalah yang akan mengganggu kepentingan Indonesia, masing-masing negara sepakat untuk menandatangani perjanjian perbatasan tersebut dua tahun kemudian yaitu pada 18 November 1978 di Semarang yang dituangkan pada Memorandum of Understanding of Demarcation Survey of International Boundary between the Government of Indonesia and the Government of Malaysia 1976

3. Penandatanganan MoU Perbatasan tahun 1978

MoU perbatasan antara Indonesia dan Malaysia dalam menentukan patok-patok wilayah di Tanjung Datu, Kalimantan Barat, setelah dilakukannya perundingan pada tahun 1978 oleh kedua negara, akhirnya

sepakat untuk dituangkan dan ditandatangani pada 18 November 1978 di Semarang dalam bentuk Memorandum of Understanding of Demarcation Survey of International Boundary between the Government of Indonesia and the Government of Malaysia 1976. Proses penandatanganan ini tidak terjadi masalah serta kedua negara pun sepakat untuk mengikatkan diri pada perjanjian tersebut (consent to be bound). Perjanjian perbatasan di Tanjung Datu ini berlaku bagi kedua negara pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan. Perjanjian perbatasan tahun 1976 ini mengatur beberapa hal, diantaranya: *Pursuant to the Memorandum of Understanding relating to the joint demarcation and survey of the common land boundary between the Republic Indonesia and Malaysia signed at Jakarta on the 26th of November 1973, and in accordance with:*

a) *The Boundary Convention signed at London dated 20th June, 1891* b) *The Boundary Agreement signed at London dated 28th September, 1915* and c) *The Boundary Convention signed at the Hague dated 26th March, 1928; The joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee hereby agree to the following:*

1. *The Areas that have been demarcated and surveyed by the Joint Indonesia-Malaysia Survey Teams are as follows: Kalimantan Barat/Sarawak areas: I A 98 to A 156, A 231 to C 1 II, G to H 1, D 001 to D 186 III, D 186 to D 300, D 300 to E 001; The Field Plans/Maps (Plans) referred to and tabulated in Annex 1 are the Field Plans/Maps (Plans) which have been approved and signed: a. On the part of Indonesia by: (1) The Indonesian Co-project Director of Kalimantan*

Barat; and (2) The Chairman of the Indonesian Technical Committee/Chairman of the National Coordination Agency for Surveys and Mapping, Indonesia, and b. On the part of Malaysia by: (1) The Malaysian Co-project Director of Sarawak; and (2) The Chairman of the Malaysian Technical Committee/Director of National Mapping, Malaysia; All the Boundary pillars/markers and their coordinate including the abovementioned terminal boundary pillars/markers as demarcated and surveyed in the said Areas are shown in the said Field Plans/Maps (Memorandum of Understanding of Demarcation Survey of International Boundary between the Government of Indonesia and the Government of Malaysia 1976).

4. Peninjauan Kembali Wilayah Demarkasi tahun 2001

Setelah perjanjian tersebut berlaku sejak tahun 1978, pihak Indonesia sudah melakukan survei lanjutan mengenai patok-patok perbatasan pada tahun 1973 dan diulang kembali pada tahun 1976 dan tahun 1978 dengan hasil yang identik. Pada proses peninjauan kembali tersebut tim survei dari Indonesia masih dilakukan dengan orang-orang yang sama, yaitu staf yang melakukan survei pada saat proses demarkasi pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1978. Dalam hal ini proses peninjauan kembali demarkasi tidak ada masalah. Namun, pada saat melakukan survei lanjutan mengenai batas wilayah di Tanjung Datu pada tahun 2001, tim survei yang pada saat itu dilakukan dengan staf yang baru menemukan permasalahan. Permasalahan timbul dikarenakan titik garis wilayah

perbatasan yang lebih menjorok ke Indonesia sehingga menguntungkan wilayah Malaysia. Titik garis tersebut sebenarnya telah di survei pertama kali pada tahun 1976 oleh tim survei sebelumnya, lalu dikaji secara mendalam selama dua tahun oleh Indonesia pada saat itu dan disepakati melalui MoU tahun 1976.

MoU ini dipermasalahkan karena telah menggunakan metode *watershade* dalam menentukan wilayah demarkasi perbatasan. Pada saat tim survei tahun 2001 mencari kembali titik patok menggunakan *watershade*, mereka menjelaskan tidak dapat menemukannya sedangkan pada saat mereka mengukur ulang menggunakan penarikan garis lurus, patok demarkasi dapat ditemukan. Alasan inilah yang menyebabkan pihak Indonesia mengklaim bahwa MoU perbatasan pada tahun 1976 ini error dan harus diajukan untuk adanya suatu peninjauan kembali atas perjanjian perbatasan tersebut agar adanya suatu perubahan atau dimungkinkannya pembatalan perjanjian dengan alasan *fundamental of circumstances* yang merujuk pada Pasal 62 ayat 1 VCLT 1969. Mereka juga menjelaskan bahwa sifat MoU dalam perjanjian perbatasan ini bersifat non-legally binding karena tidak ada persetujuan dari pihak lembaga negara (Dewan Perwakilan Rakyat) serta penggunaan nomenklatur dari MoU yang dianggap mereka tidak mempunyai daya ikat dalam sahnya perjanjian internasional.

5. Perundingan Kembali Wilayah Perbatasan Demarkasi tahun 2011

Atas permasalahan yang timbul pada tahun 2001 yaitu terkait pihak dari Indonesia menginginkan adanya suatu peninjauan kembali dalam perubahan atau dimungkinkannya pembatalan terhadap isi perjanjian MoU 1976, telah diadakanya rapat antar Kementerian untuk menyelesaikannya. Pada tahun 2011, tim yang terdiri dari Kementerian atau Lembaga terkait, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Mabes TNI serta Badan Informasi Geospasial telah membuat kajian atau pembahasan mengenai masalah penentuan demarkasi wilayah di Tanjung Datu. Selain itu, dilaksanakan pula rapat koordinasi tingkat Menteri di Kementerian Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) yang dipimpin oleh Menteri Polhukam pada 20 Oktober 2011 yang secara khusus membahas mengenai permasalahan yang terjadi di Tanjung Datu.

Kesimpulan yang didapat dari rapat koordinasi tersebut antara lain:

- 1) Penentuan wilayah demarkasi antara Indonesia dan Malaysia di Tanjung Datu, Kalimantan Barat, menggunakan metode *watershade*
- 2) Sesuai dengan Traktat pada tahun 1891 pasal 3, proses demarkasi didasarkan pada garis batas yang mengikuti *watershade*. Survei bersama dilakukan tahun 1976 dan diulang tahun 1978 dengan hasil yang identik
- 3) Pandangan untuk merubah MoU dari aspek hukum internasional tidak memiliki dasar hukum yang kuat mengingat MoU tahun 1978 merupakan kesepakatan dari hasil survei untuk

mengimplementasikan traktat tahun 1891 pasal 3 yang telah menetapkan garis batas berdasarkan watershed bukan garis lurus, MoU tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak, dan VCLT 1969 tentang Perjanjian Internasional menegaskan bahwa perjanjian perbatasan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak dapat dibatalkan.

b) Kewenangan pemerintah daerah terbatas

Pemerintah daerah dalam mengelola perbatasan Entikong tidak memiliki kewenangan penuh dikarenakan semua kebijakan yang ditujukan untuk Entikong hanya berada pada pemerintah pusat. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Suparman, S.Pd., M.Si selaku camat Kecamatan Entikong:

“Sebagian besar kewenangan masih dipegang pemerintah pusat. Alasannya karena untuk mengintegrasikan kegiatan sosial ekonomi diperlukan koordinasi dari level pemerintahan yang lebih tinggi. Memang semenjak Undang-Undang 23 Tahun 2014 diterbitkan kewenangan daerah tidak banyak. Pemerintah daerah cuma sebagai perpanjangan tangan dari apa yang sudah ditetapkan dari pusat. Ya kalau dari pusat bilanganya A kami juga demikian. Tidak jarang masing-masing pemerintahan berebut kalau ada potensi atau program buat perbatasan”(Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Januari 2018 pukul 12.30 WIB).

Berdasarkan penjelasan informan, disimpulkan bahwa kewenangan pemerintah daerah Entikong terbatas semenjak UU Nomor 23 Tahun 2014 diterbitkan. Secara keseluruhan pengelolaan kawasan perbatasan dipegang oleh pemerintah pusat. Keterbatasan wewenang dan ketidakjelasan koordinasi membuat masing-masing level pemerintahan

berebut pengaruh di perbatasan ketika ada potensi dan program yang diperuntukkan untuk kawasan perbatasan.

- c) Pembangunan infrastruktur yang tidak sejalan dengan regulasi perdagangan

Aktivitas perdagangan di Keamatan Entikong belum setara dengan kemajuan pembangunan infrastruktur. Potensi pasar yang ada masih terdistorsi oleh regulasi yang belum jelas. Berdasarkan wawancara dengan Pak Herik selaku pedagang di Kecamatan Entikong bahwa:

“Pembangunan infrastruktur di sini boleh lah diacungi dua jempol. Tapi sayangnya peraturan perdagangan belum jelas. Masyarakat di sini sering mengeluhkan susahnya berdagang di kawasan perbatasan. Semua harus legal, tetapi peraturannya sampai sekarang belum jelas. Jangan setengah-setengah kalau bikin peraturan. Karena ingat, kita selalu mendung-denungkan NKRI harga mati. Tapi kalau ekonominya tidak berkembang, yang notabene masalah perut, jangan heran banyak warga di perbatasan yang akhirnya memilih menjadi warga negara Malaysia” (Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Januari 2018, pukul 14.02 WIB).

Berdasarkan penjelasan informan, disimpulkan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan di Entikong mengenai perdagangan masih mengalami permasalahan yaitu ketidakjelasan peraturan perdagangan lintas batas. Masyarakat Entikong terutama yang berprofesi sebagai pedagang mengeluhkan hal tersebut. Pembangunan infrastruktur yang secara besar-besaran dilakukan di Entikong dinilai tidak diiringi dengan peraturan perdagangan yang jelas sebagai acuan dan dasar hukum dalam melakukan aktivitas ekonomi kawasan perbatasan.

C. Pembahasan

1. Konsep Pendekatan Kesejahteraan Melalui Pengembangan Ekonomi

a. Identifikasi Potensi Ekonomi Berbasis Komoditas Unggulan Melalui Kriteria-Kriteria Komoditas Unggulan

Letak kawasan perbatasan yang berhadapan langsung dengan negara lain dianggap memiliki potensi ekonomi daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Potensi ekonomi daerah menurut Suparmoko (2002: 99) adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang layak dikembangkan untuk menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan mampu mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dengan berkesinambungan. Potensi ekonomi yang ada di kawasan perbatasan pada dasarnya merupakan keunggulan komparatif yang menjadi modal bagi daerah sehingga dengan adanya identifikasi potensi ekonomi nantinya dapat diketahui komoditas-komoditas unggulan daerah di kawasan perbatasan. Menurut Yulianti (2011) komoditas unggulan diartikan sebagai komoditas andalan yang memiliki posisi strategis baik dalam hal teknis (kondisi tanah dan iklim) ataupun sosio-ekonomi serta kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumberdaya manusia, infrastruktur, dan kondisi sosial masyarakat setempat) yang dapat dikembangkan di suatu daerah atau wilayah. Komoditas unggulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komoditas adalah *hasil bumi dan kerajinan setempat dapat dimanfaatkan sbg – ekspor ; bahan mentah yang dapat digolongkan menurut mutunya standar perdagangan*

internasional. Sedangkan, kata unggulan memiliki kata dasar unggul yang berarti utama (terbaik, terutama). Dapat disimpulkan bahwa komoditas unggulan merupakan hasil utama masyarakat yang memiliki peluang pemasaran dan berdaya saing tinggi.

Pemerintah daerah harus menentukan komoditas unggulan daerahnya sebelum dikembangkan. Menurut Bahrein (2003) yang dikutip oleh Demmatadju (2012: 29) penetapan komoditas unggulan di suatu wilayah menjadi keharusan dengan mempertimbangkan komoditas-komoditas yang mampu bersaing secara berkelanjutan dengan komoditas yang sama di wilayah lain yang diusahakan secara efisien dari aspek teknologi dan sosial ekonomi serta memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.

Penentuan komoditas unggulan menurut Hasyim dan Subagiyo (2017: 49) mempunyai beberapa kriteria, antara lain:

- 1) Sifat strategis komoditas. Kriteria ini diukur berdasarkan permintaan pasar, dukungan pemerintah dalam pengembangan komoditas serta ada tidaknya komoditas pengganti yang bersifat suplementer
- 2) Nilai ekonomi komoditas. Kriteria ini dinilai dari jumlah produsen komoditas, tingkat produksi komoditas, keunggulan komparatif komoditas, ketersediaan lahan yang sesuai untuk pengembangan komoditas, dan kondisi pasar
- 3) Memiliki status teknologi yang terus meningkat
- 4) Pengembangan komoditas unggulan mempunyai kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja

5) Berorientasi pada kelestarian sumberdaya dan lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian, komoditas unggulan yang ditetapkan di Kecamatan Entikong adalah lada. Potensi pengembangan lada di wilayah ini sangat besar. Hal ini didukung oleh kebutuhan pasar dunia yang cukup tinggi, luas lahan yang meningkat, dan tingkat produksi yang tinggi. Selama ini, pengolahan lada di Kecamatan Entikong masih dilakukan dengan cara tradisional dan pemasarannya juga dilakukan dengan cara tradisional. Penjualan produk lada dari Kecamatan Entikong ke Malaysia pada umumnya masih dalam bentuk biji/mentah. Sampai saat ini, petani lada masih bergantung kepada Malaysia dalam hal penjualan lada sehingga harga lada dikendalikan oleh para *tengkulak* dari Malaysia. Petani tidak mempunyai pilihan pasar lain, selain ke Malaysia (Sarawak) dikarenakan pasar lokal belum mampu menyerap produk lada yang dihasilkan oleh petani lada di perbatasan Entikong. Selain itu, akses yang lebih mudah menuju Malaysia membuat para petani lada merasa menjual lada ke Malaysia lebih menguntungkan.

Kecamatan Entikong sampai saat ini telah mengembangkan produk turunan hasil perkebunan lada di perbatasan Entikong. Masyarakat merupakan pihak yang hingga saat ini mengembangkan produk olahan lada, yakni kopi lada hitam. Walaupun kopi lada hitam khas Entikong telah masuk ke beberapa provinsi di Indonesia, ternyata distribusinya terbilang masih jarang. Pengelolaan pemasaran lada di kawasan ini belum berjalan dengan baik. Pembuatan produk olahan lada masih mengalami kesulitan

dikarenakan terbatasnya teknologi yang dimiliki. Dukungan pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah produk masih terbatas, terutama dari pemerintah pusat. Kekurangannya adalah daya saing lada di Kecamatan Entikong terbilang masih rendah, antara lain karena lada yang dijual lebih banyak masih dalam bentuk biji dan belum didukung oleh industri pengolahan yang memadai.

Pengembangan perkebunan lada di Kecamatan Entikong belum ditangani secara khusus. Peran dan dukungan kelembagaan penunjang sebagai sarana pengembangan usaha petani lada masih terbilang lemah dan belum berfungsi secara maksimal. Lemahnya kemampuan dan peran kelembagaan tersebut menyebabkan petani tidak mampu mengakses informasi, jaringan pasar, dan teknologi yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa kelemahan dan kekuatan dalam pengembangan ekonomi berbasis komoditas unggulan di Kecamatan Entikong, sebagai berikut:

1) Kekuatan

a) Ketersediaan Lahan

Kecamatan Entikong memiliki luas lahan yang memadai untuk perkebunan lada atau dikatakan memiliki luas lahan paling banyak dibandingkan komoditas lainnya

b) Pengalaman Petani

Berdasarkan penelitian, lada telah lama menjadi sumber pendapatan keluarga di Kecamatan Entikong. Pengetahuan tentang lada juga

sudah banyak karena masyarakat di Kecamatan Entikong sejak kecil sudah diikutsertakan membantu dalam perkebunan lada

- c) Lokasi pengembangan lada yang dekat dengan Malaysia sebagai pintu masuk pasar ekspor
- d) Identitas lada Entikong yang sudah dikenal baik karena dapat menghasilkan jumlah lada yang banyak dan kualitas yang baik

2) Kelemahan

- a) Penggunaan peralatan yang masih tradisional. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti harga peralatan pertanian lebih canggih yang mahal dan rendahnya kualitas petani sehingga belum mengerti dalam mengoperasikan dan memanfaatkannya
- b) Siklus pemasaran lada yang tidak jelas menyebabkan banyak petani lada hanya mengikuti harga tidak menentu dari tengkulak dari Malaysia, sehingga petani kadangkala mengalami kerugian apabila hasil panennya dibeli dengan harga murah
- c) Dukungan dan kebijakan pemerintah yang belum berjalan dengan baik walaupun sudah mempunyai program yang ditujukan untuk pengembangan lada
- d) Belum ada industri pengolahan lada di Kecamatan Entikong yang menghasilkan produk turunan komoditas unggulan tersebut yang dapat meningkatkan nilai tambah lada

Berdasarkan hasil penelitian, Kecamatan Entikong belum mampu memanfaatkan lada sebagai komoditas unggulan untuk mendukung usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga lada yang dianggap sebagai produk unggulan masyarakat Kecamatan Entikong belum sepenuhnya memenuhi kriteria-kriteria yang harus dimiliki komoditas unggulan.

b. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting untuk mempercepat proses pembangunan. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu penggerak perkembangan ekonomi. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi sebagaimana menurut Grigg (dalam Jesly, 2016) yang mendefinisikan infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Seperti yang dikemukakan Setiadi (2006) yang dikutip oleh Warsilan dan Noor (2015: Vol. 31) bahwa infrastruktur merupakan prasyarat bagi sektor-sektor lain untuk berkembang dan juga sebagai sarana penciptaan hubungan antara satu dengan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan infrastruktur di Kecamatan Entikong sebagian besar telah memadai. Tetapi masih terdapat beberapa persoalan bagi masyarakat perbatasan. Pertama, infrastruktur jalan masih belum baik dan merata. Kualitas jalan raya parallel perbatasan sepanjang jalur Malaysia-Indonesia secara umum memang sudah baik, tetapi perbaikan

jalan beberapa desa masih belum tertangani. Contohnya berdasarkan hasil wawancara, di Desa Suruh Tembawang akses jalan darat sangat tidak layak. Masyarakat bisa menggunakan transportasi air berupa perahu dengan membayar mahal. Untuk sekali perjalanan pulang-pergi, biaya sewa perahu antara 1 juta hingga 1,4 juta. Kondisi tersebut tentunya sangat memberatkan masyarakat terlebih bagi masyarakat yang tidak mempunyai cukup uang untuk menyewa perahu. Kedua, masalah pasokan listrik yang belum merata. Sebagian desa yang belum terjangkau listrik dari PLN Balai Karangan harus mengimpor listrik dari PLTA Malaysia. Ketiga, terminal barang (*dry port*) yang masih dalam tahap pembangunan membuat masyarakat perbatasan masih kesulitan melakukan aktivitas ekonomi, terutama kegiatan ekspor-impor. Hambatan tersebut akan membuat para investor, khususnya pengusaha yang tertarik menanamkan modal di Entikong menjadi kesulitan karena belum adanya prasarana yang mendukung ekspor-impor.

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang berubah fungsi tidak hanya dilalui pelintas batas tradisional ternyata menarik perhatian dari kalangan pelintas batas non tradisional. Arus masuk dan ke luar dari sisi pergerakan manusia tidak hanya dilalui oleh pelintas batas yang berasal dari ASEAN, tetapi juga dari negara-negara lain. Kendalanya adalah aktivitas ekonomi melalui PLBN sampai saat ini masih terbatas perdagangan tradisional saja. Berdasarkan hasil penelitian, belum menunjukkan adanya pengaruh infrastruktur dengan perkembangan aktivitas ekonomi di Kecamatan Entikong sehingga dapat disimpulkan pembangunan infrastruktur di

Kecamatan Entikong belum mampu mendukung pengembangan ekonomi di perbatasan dikarenakan masih banyak kendala yang dihadapi.

c. Integrasi Ekonomi

Integrasi ekonomi merupakan salah satu faktor keberhasilan perekonomian regional, termasuk di kawasan perbatasan. Menurut United Nation Conference on Trade and Development (UNCTD) integrasi ekonomi diwujudkan dalam kesepakatan yang dilakukan untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan pergerakan faktor produksi lintas negara. Pelkman yang dikutip oleh Ridwan (2009:Vol. 5) menjelaskan integrasi ekonomi ditandai dengan penghapusan hambatan-hambatan ekonomi (*economic frontier*) antara dua atau lebih ekonomi atau negara. Hambatan-hambatan ekonomi yang dimaksud meliputi semua pembatasan yang menyebabkan mobilitas barang, jasa, faktor produksi, dan aliran komunikasi.

Integrasi ekonomi di kawasan perbatasan dilakukan dengan membuat kesepakatan kerjasama dengan negara tetangga. Bagi suatu negara yang letaknya bersebelahan dengan negara tetangga, tentunya secara otomatis akan menyepakati perdagangan lintas batas yang merupakan komponen penting dalam hubungan bilateral perdagangan. Kesepakatan perdagangan lintas batas antar kedua negara pada dasarnya bertujuan untuk perbaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di masing-masing negara. Berdasarkan hasil penelitian dan data yang telah didapat, perbatasan Entikong telah lama melakukan integrasi ekonomi yang dinamakan Border

Trade Agreement (BTA). Adapun kerjasama yang tertuang dalam BTA adalah Sosial Ekonomi Malindo (Sosek Malindo). Kerjasama tersebut memiliki prinsip-prinsip dasar, antara lain:

- 1) Bertujuan memudahkan masyarakat perbatasan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dengan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian perdagangan lintas batas itu sendiri, antara lain barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk jenis peralatan, perkakas, serta perlengkapan yang dibutuhkan untuk keperluan perindustrian dalam suatu daerah lintas batas Indonesia
- 2) Masyarakat perbatasan hanya diperbolehkan menjual hasil pertanian dan hasil bumi lainnya yang berasal dari suatu daerah lintas batas Indonesia (tidak termasuk minyak, mineral, dan bijih tambang)
- 3) Masyarakat perbatasan hanya diperbolehkan melakukan pembelian barang dari Malaysia dengan nilai tidak melebihi 600 Ringgit Malaysia tanpa dikenakan bea masuk dalam kurun waktu satu bulan

Kerjasama Sosek Malindo yang dilakukan antara Entikong dan Malaysia menimbulkan berbagai macam dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Beberapa dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat perbatasan, antara lain:

- 1) Membantu masyarakat perbatasan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti gas, beras, gula, minyak goreng, dan lain-lain

- 2) Masyarakat perbatasan dapat menjual hasil pertanian dan perkebunan ke Malaysia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam isi perjanjian kerjasama
- 3) Akses jalan yang lebih mudah dan dekat ke Malaysia membantu masyarakat perbatasan memasarkan komoditasnya
- 4) Kekeluargaan antar masyarakat perbatasan Entikong dan Malaysia terjalin baik dikarenakan adanya interaksi yang dilakukan masyarakat kedua negara setiap hari
- 5) Akses masyarakat perbatasan yang mudah yaitu dengan menggunakan Kartu Identitas Lintas Batas tanpa visa ataupun paspor tentunya memudahkan masyarakat perbatasan untuk saling berbagi tidak hanya dalam hal perdagangan, tetapi juga sosial dan budaya

Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian kerjasama Sosek Malindo juga banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat perbatasan, antara lain:

- 1) Masyarakat perbatasan akan sangat bergantung pada Malaysia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya
- 2) Masyarakat perbatasan lebih terbiasa menggunakan barang buatan luar negeri yang dapat berakibat berkurangnya rasa bangga dan cinta pada Indonesia
- 3) Perjanjian perdagangan lintas batas tersebut sudah terbilang lama, sehingga ada beberapa butir isi perjanjian yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Salah satunya adalah pembatasan nilai

transaksi yang hanya sebesar 600 RM atau sekitar tidak lebih dari Rp 2.000.000,00. Nilai tersebut dianggap masyarakat perbatasan sudah tidak relevan lagi karena tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terlebih bagi para pelaku usaha di Kecamatan Entikong

- 4) Adanya perjanjian lintas batas seperti ini tentunya memudahkan barang buatan Malaysia lebih mudah masuk ke wilayah perbatasan Indonesia. Jika tanpa pengawasan yang ketat dari aparat pemerintah dapat memungkinkan peraturan yang ada dalam perjanjian lintas batas tersebut diabaikan

Perjanjian kerjasama Sosek Malindo ternyata belum menimbulkan dampak positif yang signifikan. Banyak masyarakat perbatasan yang mengeluh terhadap isi perjanjian Sosek Malindo yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini. Sampai saat ini aturan yang ada dalam perjanjian tersebut belum mengalami revisi, sedangkan perkembangan masyarakat perbatasan semakin pesat, terutama dalam perdagangan. Implementasi integrasi ekonomi di Kecamatan Entikong belum mencapai tujuan sebagaimana mestinya walaupun telah dilakukan selama berpuluh-puluh tahun.

d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor penting dalam setiap pembangunan.

Kondisi persaingan global yang semakin berkembang pesat menuntut setiap negara untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada secara terus-menerus. Perhatian terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya

Manusia sangat penting karena melalui manusia merupakan unsur yang menciptakan berbagai inovasi. Salah satu bentuk dari pengembangan Sumber Daya Manusia adalah pemberdayaan. Menurut Craig dan Mayo (1995) yang dikutip oleh Alfitri (2012: 22) konsep pemberdayaan termasuk dalam pengembangan masyarakat dan terkait dengan kemandirian (*self help*), partisipasi (*participation*), jaringan kerja (*network*), dan pemerataan (*equity*). Pemberdayaan masyarakat menurut Suharto (2010: 59) adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk memperkuat keberdayaan kelompok lemah, dalam hal ini masyarakat yang kurang mampu (miskin). Sebagai tujuan, pemberdayaan adalah suatu keadaan ingin mencapai suatu perubahan masyarakat yang berdaya, mandiri dalam memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai pekerjaan, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian, di Kecamatan Entikong terdapat program pelatihan keterampilan teknis untuk masyarakat perbatasan. Sebagaimana teori konsep pemberdayaan yang dikemukakan oleh Craig dan Mayo (1995) yang dikutip oleh Alfitri (2012: 22), pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Entikong telah memenuhi konsep-konsep tersebut diantaranya partisipasi (*participation*), jaringan kerja (*network*), dan equity (*pemerataan*). Pertama, masyarakat Entikong terbilang cukup antusias mengikuti pelatihan yang diadakan oleh ULKI Entikong. Melalui dana APBD dan APBN, banyak masyarakat Entikong yang memanfaatkan

program pelatihan tersebut untuk mengembangkan diri. Kedua, ULKI Entikong tidak hanya menyediakan program pelatihan bagi masyarakat, tetapi juga memiliki layanan yang membantu masyarakat dalam mencari kerja. Layanan tersebut diwujudkan dengan adanya bursa kerja yang menyediakan informasi mengenai lowongan pekerjaan. Prosedurnya pun terbilang mudah. Para pencari kerja dapat mengakses website resmi yang telah disediakan ULKI Entikong untuk mengirimkan lamaran pekerjaan. Ketiga, ULKI Entikong memberikan kesempatan bagi setiap masyarakat perbatasan untuk mengikuti program pelatihan yang ada. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta juga tidak memberatkan, salah satunya adalah ijazah terakhir pendidikan. Masyarakat perbatasan yang memiliki keterbatasan dalam mencapai pendidikan lebih tinggi tentunya dimudahkan dengan adanya syarat tersebut, terlebih lagi bagi mereka yang taraf ekonominya masih tergolong rendah juga sangat dimudahkan tanpa adanya pungutan biaya dalam program pelatihan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Entikong telah cukup lama memiliki dan menjalankan program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga ada kesesuaian antara teori langkah-langkah melakukan pendekatan kesejahteraan dengan fakta yang terjadi di lapangan.

e. Mengoptimalkan Peran Kelembagaan

Menurut Hasyim dan Subagiyo (2017: 56) salah satu langkah melakukan pendekatan kesejahteraan di kawasan perbatasan adalah mengoptimalkan peran kelembagaan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di

kawasan perbatasan dilakukan dengan optimalisasi peran kelembagaan pemerintah, swasta, dan masyarakat secara produktif, sinergis, dan kreatif sesuai perannya masing-masing.

Hasil penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Entikong menunjukkan bahwa optimalisasi peran kelembagaan baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat. BNPP yang dibentuk sebagai respon pemerintah atas dinamika dan tuntutan kebutuhan obyektif untuk mengelola kawasan perbatasan agar tidak semakin tertinggal ternyata tidak menimbulkan dampak signifikan bagi masyarakat perbatasan. Peraturan Presiden Nomor 12 Pasal 3 Tahun 2010 yang menyebutkan tugas BNPP hanya bersifat koordinatif. Hal itu menyebabkan kerja BNPP menjadi tidak efektif ketika seharusnya BNPP menjadi lembaga yang bertanggungjawab penuh dan memiliki otoritas terhadap pengelolaan perbatasan. Peran BNPP yakni hanya mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pembangunan perbatasan, sementara pengambil kebijakan tetap pada pemerintah pusat yang berada pada kementerian teknis terkait.

Badan Pengelola Perbatasan Kalimantan Barat yang telah dibubarkan pun semakin menyulitkan optimalisasi peran kelembagaan pengelola perbatasan karena tidak adanya kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten untuk mengurus pengelolaan kawasan perbatasan di Kecamatan Entikong dalam hal kebijakan. Apabila urusan perbatasan dikelola secara langsung oleh pemerintah pusat, maka secara koordinasi akan menjadi sulit karena harus melalui proses birokrasi panjang dan

berbelit-belit dalam setiap hal-hal yang berkaitan dengan urusan kepentingan masyarakat perbatasan. Masyarakat perbatasan Entikong menilai pemerintah pusat tidak memahami karakteristik masyarakat perbatasan sehingga tidak jarang kebijakan yang diturunkan tidak tepat sasaran dan dikhawatirkan pengelolaan perbatasan nantinya semakin tidak memperhatikan kearifan lokal setempat. Di sisi lain, peran lembaga swasta dan masyarakat pun terbilang rendah. Masyarakat merasa hanya menjadi objek dari program-program pengelolaan kawasan perbatasan dari pemerintah pusat sehingga kesulitan untuk menyampaikan aspirasinya.

Perhatian pemerintah pusat dalam aspek pertahanan dan keamanan di perbatasan Entikong adalah bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pemerintah pusat menempatkan pasukan satuan tugas pengamanan perbatasan (satgas pamtas). Satgas pamtas ditempatkan di Pos Komando Taktis Gabungan Bersama (Gabma) Malaysia-Indonesia Entikong. TNI bersama dengan pasukan Tentara Diraja Malaysia (TDM) ditempatkan di pos tersebut dan secara bersama-sama menjaga stabilitas keamanan, menjamin keutuhan wilayah perbatasan melalui pemeliharaan patok batas, mencegah pelanggaran lintas batas, penyelundupan dan lain-lain.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan optimalisasi peran kelembagaan di Kecamatan Entikong dari pemerintah, swasta, dan masyarakat secara produktif, sinergis, dan kreatif belum terwujud. Efektivitas program dan bantuan yang diberikan pemerintah pusat masih memiliki kekurangan, yaitu sering terjadi kasus program yang diberikan

tidak sesuai sasaran. Hal ini terjadi karena penetapan kebijakan, program, dan bantuan pemerintah pusat untuk Kecamatan Entikong lebih dirumuskan berdasarkan apa yang menurut pemerintah pusat baik, padahal perspektif masyarakat di perbatasan Entikong belum tentu demikian. Kebijakan yang masih bersifat *top-down*, dengan kata lain mengabaikan aspirasi masyarakat dan pemerintah lokal pada akhirnya membuat masyarakat setempat terkesan memaksakan diri untuk menerima apa yang sudah diberikan dari pusat. Terdapat beberapa permasalahan optimalisasi kelembagaan dalam pengelolaan kawasan perbatasan di Entikong, antara lain:

- 1) Di tingkat pusat belum ada suatu lembaga khusus yang berwenang penuh mengelola kawasan perbatasan
- 2) Di tingkat daerah tidak memiliki lembaga khusus yang berwenang untuk menangani kawasan perbatasan
- 3) Belum terdapat mekanisme hubungan yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- 4) Pengambilan keputusan di tingkat pusat masih dilakukan secara sektoral
- 5) Pemerintah pusat lebih dominan memperhatikan pendekatan keamanan sehingga pengelolaan kawasan perbatasan dalam pendekatan kesejahteraan cenderung berjalan lambat

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Kawasan Perbatasan Dalam Pendekatan Kesejahteraan

a. Faktor Pendukung

1) Faktor Internal

- a) Letak geografis Kecamatan Entikong yang berbatasan langsung dengan Malaysia memudahkan masyarakat kedua negara tersebut melakukan aktivitas ekonomi. Bagi masyarakat perbatasan Entikong, posisi strategis tersebut dimanfaatkan sebagai pintu gerbang untuk menjual komoditas yang dihasilkan. Masyarakat Entikong lebih senang menjual hasil buminya ke Malaysia karena letak wilayah yang dekat dibandingkan harus memasarkannya ke pusat ibukota yang letaknya jauh
- b) Potensi sumber daya alam yang melimpah menjadi modal kawasan perbatasan dalam menunjang pendapatan masyarakat. Prospek sumber daya pangan yang dihasilkan tentunya dapat dipasarkan ke negara tetangga, Malaysia selain komoditas unggulan. Masyarakat perbatasan juga dapat lebih menghemat pengeluaran belanja untuk konsumsi makanan karena sebagian bahan pangan dan rempah-rempah untuk bumbu masak tumbuh subur di Entikong

2) Faktor Eksternal

- a) Adanya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) memberikan pengaruh besar dalam perputaran ekonomi masyarakat dan pemerintah setempat. PLBN sebagai akses formal untuk pergerakan barang

dan manusia meningkat pesat. Dari sisi pergerakan manusia, tidak hanya masyarakat perbatasan yang menggunakan PLBN Entikong. Wisatawan dari luar Entikong atau disebut pelintas batas non tradisional juga tertarik dengan PLBN Entikong. Banyak wisatawan yang berkunjung untuk melihat-lihat dan berfoto di sekitar area PLBN Entikong. Secara tidak langsung pelintas batas non tradisional ikut andil mempromosikan Entikong yang nantinya akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat perbatasan.

b. Faktor Penghambat

1) Faktor Internal

- a) Kualitas pendidikan yang masih rendah menjadi kendala bagi pengelolaan ekonomi kawasan perbatasan di Entikong. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sumber, keterbatasan berbagai faktor seperti sarana dan prasarana serta akses yang sulit menuju sekolah menyebabkan banyak masyarakat perbatasan memilih untuk putus sekolah maupun tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Masyarakat yang berhasil mengenyam pendidikan hingga, lulus lebih memilih untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Banyak masyarakat perbatasan yang menjadi TKI ilegal. Masyarakat yang tidak menjadi TKI memilih untuk ikut

membantu orangtuanya bertani, berkebun ataupun menjadi kuli angkut

- b) Keberadaan aktivitas illegal di perbatasan Entikong sampai saat ini masih terbilang sulit untuk dicegah. Akibat penegakan hukum yang lemah, maka berbagai bentuk pelanggaran hukum sering terjadi di Entikong. Pelanggaran hukum yang paling menonjol adalah maraknya kegiatan illegal. Kegiatan illegal tersebut bahkan tidak hanya satu macam. Illegal logging (pencurian kayu), penyelundupan barang, hingga perdagangan manusia adalah bentuk pelanggaran hukum yang paling banyak terjadi di Entikong

2) Faktor Eksternal

- a) Sengketa patok batas wilayah antara Indonesia-Malaysia. Pemerintah Indonesia-Malaysia hanya memasang patok batas wilayah. Patok-patok batas tersebut seringkali ditemukan bergeser, bahkan kerap kali hilang. Jika kondisi tersebut masih sering terjadi, besar kemungkinan akan timbul sengketa antara pihak Indonesia dan Malaysia. Selain itu, wilayah perbatasan Entikong dan Malaysia sebagian besar merupakan kawasan hutan lindung. Hal ini juga yang menjadikan rentannya patok batas wilayah bergeser maupun hilang, ditambah dengan belum terselesaikannya penetapan patok batas wilayah di beberapa titik. Upaya penyelesaian patok batas wilayah hingga saat ini belum menemui titik temu antara kedua belah pihak. Perbatasan darat Entikong-

Malaysia memang dituangkan dalam perjanjian, tetapi adanya perbedaan persepsi antara Indonesia dan Malaysia di beberapa titik menyebabkan timbulnya permasalahan patok batas yang belum disepakati

- b) Salah satu faktor yang menjadi penghambat belum optimalnya pengelolaan ekonomi di Entikong adalah terbatasnya kewenangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara, kewenangan pemerintah daerah masih terbatas dalam mengelola kawasan perbatasan secara hukum. Minimnya peran pemerintah daerah tersebut dikarenakan dalam pengelolaan kawasan perbatasan bersifat lintas administrasi wilayah pemerintahan dan lintas sektoral sehingga memerlukan koordinasi dari institusi yang secara hirarkis lebih tinggi. Kebijakan yang hanya berdasarkan keputusan pemerintah pusat terkesan bahwa strategi yang ditetapkan bersifat elitis dan *top-down policy*. Akibatnya, banyak program kawasan perbatasan yang dinikmati oleh sejumlah oknum demi keuntungan pribadi
- c) Pembangunan infrastruktur yang tidak sejalan dengan regulasi perdagangan

Pembangunan infrastruktur besar-besaran di Entikong ternyata sejalan dengan aktivitas perekonomiannya. Kendati PLBN Entikong telah diresmikan, aktivitas ekonomi di Kecamatan Entikong berbanding terbalik dengan megahnya infrastruktur yang terbangun.

Berdasarkan hasil wawancara, perdagangan di kawasan perbatasan masih menjadi persoalan pelik dikarenakan regulasinya yang belum jelas. Banyak masyarakat di perbatasan Entikong merasa dipersulit karena produk yang dipasarkan harus berstatus legal sementara hingga saat ini regulasi mengenai perdagangan lintas batas belum diperjelas. Dampak dari ketidakjelasan regulasi perdagangan lintas batas tersebut adalah banyak masyarakat Kecamatan Entikong yang memilih untuk menjadi warganegara Malaysia.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian, kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Entikong merupakan kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat yang berhadapan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Adanya pergeseran paradigma *inward looking* yang semula hanya menitikberatkan pada pendekatan keamanan dalam pengelolaan kawasan perbatasan, kini bergeser menjadi paradigma *outward looking* menjadikan pengelolaan kawasan perbatasan pendekatan kesejahteraan dengan tidak meninggalkan esensi pendekatan keamanan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagian besar masyarakat Kecamatan Entikong dapat dikatakan belum mencapai tingkat kesejahteraan yang maksimal berdasarkan konsep dan indikator kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan kawasan perbatasan yang implementasinya belum optimal:
 - a. Lada yang menjadi komoditi andalan masyarakat Kecamatan Entikong belum sepenuhnya mampu menopang perekonomian masyarakat lokal dikarenakan produksinya yang tidak menentu, kurang mendapat dukungan dari pemerintah terutama pemerintah pusat, serta harga lada yang tidak menentu membuat para petani harus selalu siap mencari tambahan

- penghasilan dari sumber lain seperti menjual karet atau bahkan beralih menjadi karyawan di perusahaan kelapa sawit
- b. Beberapa desa di Kecamatan Entikong yang belum mendapat perhatian dari aspek pembangunan infrastruktur sehingga membuat masyarakat kesulitan untuk memasarkan hasil perkebunan hingga berbelanja kebutuhan hidup. Akibat infrastruktur yang minim dan rusak, biaya kebutuhan hidup yang diperlukan masyarakat menjadi lebih mahal dari harga yang dijual di pusat kecamatan. Hal ini tentu sangat memberatkan masyarakat yang berpenghasilan rendah
 - c. Perjanjian lintas batas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Entikong tidak memberikan banyak dampak positif. Perjanjian sosek malindo dianggap merugikan dan semakin menyulitkan dikarenakan isi perjanjian tersebut tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman
 - d. Masih banyak aktivitas ilegal yang terjadi di Kecamatan Entikong. Kegiatan ilegal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan penghasilan yang tidak mencukupi sehingga masyarakat melakukan kegiatan ilegal walaupun harus menghadapi banyak resiko, seperti dikenakan sanksi atau bahkan mendapat hukuman penjara apabila tertangkap
 - e. Sarana prasarana sosial dasar yang masih minim terutama pendidikan dan kesehatan.

2. Pengelolaan kawasan perbatasan dalam pendekatan kesejahteraan di Kecamatan Entikong masih terhambat oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang ada adalah Kualitas pendidikan yang masih rendah dan keberadaan aktivitas ilegal dalam jumlah yang besar. Faktor eksternal yang dihadapi antara lain sengketa patok batas wilayah antara Indonesia-Malaysia, kewenangan pemerintah daerah, dan infrastruktur yang tidak sejalan dengan regulasi perdagangan

B. Saran

1. KUB Bageri yang merupakan salah satu UMKM di Kecamatan Entikong sebaiknya lebih mendapatkan dukungan dari pemerintah, terutama terkait masalah permodalan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Mengingat KUB Bageri menjadi salah satu UMKM yang terbilang cukup sukses dalam memperkenalkan produk komoditas unggulan, yaitu kopi lada hitam khas perbatasan Entikong. UMKM di daerah perbatasan pada umumnya belum memperoleh pelatihan, maka perlu diberikan pelatihan yang dilakukan oleh perangkat daerah atau bisa bekerjasama dengan perbankan atau perusahaan setempat dengan mengoptimalkan dana CSR. Penciptaan pasar bagi UMKM perbatasan juga sangat penting. Pemerintah dapat menggunakan strategi pemasaran wisata seperti *Festival Cross Border Tourism* (FGD) yang pernah dilaksanakan di Kecamatan Entikong. Melalui FGD, pemerintah dapat membantu masyarakat untuk mempromosikan produk dari KUB Bageri dan UMKM

lainnya agar lebih dikenal luas. Selain itu, strategi pemasaran melalui pariwisata juga dapat menangkap peluang investasi dan mitra kerja. Dampaknya adalah UMKM lebih berkembang sehingga diharapkan lebih banyak menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

2. Mengadakan program perbaikan kualitas pendidikan di perbatasan melalui sistem *top-down*. Pemerintah bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk menyebarluaskan pola pembinaan guru dengan program pelatihan, hibah, dan pendampingan. Sebagai program rintisan, penyebaran pola pembinaan dan perbaikan kualitas pembelajaran melalui *lesson Study* secara bertahap menyentuh guru-guru di berbagai wilayah, baik melalui sekolah sebagai pelaksana, MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) merupakan forum guru untuk jenjang SMP, SMA atau SMK, ataupun KKG (Kelompok Kerja Guru) merupakan forum untuk guru-guru SD. Oleh karena itu, guru-guru di daerah perbatasan juga layak untuk mendapatkan pelatihan yang sejenis. Selain itu beberapa solusi peningkatan pendidikan di Kecamatan Entikong dapat dilakukan dengan cara optimalisasi penyuluhan TNI sebagai tenaga guru tambahan/ bantu. TNI dapat menjangkau wilayah pelosok di perbatasan. Kurangnya jumlah guru kiranya dapat ditutupi dengan peran TNI yang nantinya berperan sebagai guru tambahan/ bantu, memanfaatkan guru-guru ngaji/ pendeta desa, kelompok karang taruna desa, dukun, bidan sebagai guru bagi anak-anak di desanya (team teaching). Tentu ini diperlukan pelatihan, adanya ADD

relatif dapat menutupi kebutuhan operasional pihak-pihak tersebut, pelaksanaan KKN universitas di wilayah perbatasan dalam rangka memajukan wilayah perbatasan, dan kampanye/promosi pendidikan di perbatasan ke universitas untuk membangun jaringan pendidikan non formal berorientasi pendidikan dasar (baca, tulis, hitung)

3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan berbagai sumberdaya alam yang ada melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Entikong merupakan petani sehingga model pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan Program Budidaya Tanaman Organik. Program ini bisa difasilitasi oleh CSR atau perusahaan. Program budidaya tanaman organik tersebut bertujuan untuk menggerakkan masyarakat agar dapat mengelola berbagai sumber daya lokal untuk dapat meningkatkan pendapatan keluarga yang sudah tentu akan berdampak bagi meningkatnya kesejahteraan masyarakat. CSR perusahaan atau masyarakat menyisihkan lahan kosong untuk di jadikan lahan tanaman pangan. Pengelolaan keuangan dan bagi hasil dilakukan dengan memanfaatkan manajemen melalui koperasi pekerja yang sudah ada untuk memastikan pengelolaan keuangan yang profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2008. *Pengembangan Wilayah: Konsep dan Teori*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- _____. 2013. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alfitri. 2012. *Community Development: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik. 2005. *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta.
- _____. 2010. _____.
- Bangun, Budi Hermawan. 2014. Membangun model kerjasama pengelolaan perbatasan negara di Kalimantan Barat-Sarawak (Suatu studi perbandingan). *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, (43) 1: 31-39.
- Damarjati, Danu. 2017. *Tapal Batas: Ekspor Indonesia vs Impor Malaysia via PLBN Entikong, Menang Mana?*. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2017 dari news.detik.com/berita/3611759/ekspor-indonesia-vs-impor-malaysia-via-plbn-entikonmenang-mana.
- Demmatadju, Rezki Kurniawan. 2012. Analisis Komoditas Unggulan Regional Sektor Pertanian di Sulawesi Selatan Tahun 2000-2009. "Skripsi". Jurusan Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2017 dari <https://core.ac.uk/download/pdf/25488991.pdf>.
- Guba, E.G. dan Lincoln Y. S. 1981. *Effective Evaluation: Improving The Usefulness of Evaluations Result Through Responsive and Naturalistic Approaches*. San Fransisco: Jasley-Bass Inc. Publisher.
- Haryati, Eny. 2009. Pengembangan ekonomi lokal yang berorientasi pada

penyerapan tenaga kerja di provinsi jawa timur. *Jurnal Ekuitas*, (14) 2: 245-269.

Hasyim, Adul Wahid dan Aris Subagiyo. 2017. *Pengelolaan Wilayah Perbatasan*. Malang: UB Media.

Heningtyas, Murdiana Asih, Sjamsiar Sjamsuddin, dan Minto Hadi. Peran pemerintah dan masyarakat lokal dalam upaya pengembangan pendidikan lokal (Studi kasus: eksistensi “kampung inggris” kabupaten kediri). *Jurnal Administrasi Publik*, 2 (2): 264-268.

Jesly, Kule. 2016. Pembangunan infrastruktur daerah perbatasan (Studi kasus di kecamatan kanyan selatan kabupaten malinau). *E-journal Pemerintahan Integratif*, (4) 3: 404-418. Diakses pada tanggal 21 November 2017 dari [ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2017/01/10%20Kule%20Jesly%20\(01-23-17-03-14-33\).pdf](http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2017/01/10%20Kule%20Jesly%20(01-23-17-03-14-33).pdf).

Kurnia, Mahendra Putra. 2012. Kawasan perbatasan ri: Kesabaran tak terbatas menanti janji sebatas janji. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2017 dari mahendraputra.id/wp-content/uploads/2012/02/Kawasan-Perbatasan-RI-Kesabaran-Tak-Berbatas-Menanti-Janji-Sebatas-Janji.pdf.

Laini, Ema Fita, Sakinah Fathrunnadi Shalihati, dan Esti Sarjanti. 2016. *Kajian Komoditas Unggulan Pada Sektor Pertanian di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga*. Purwokerto: Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Geografi FKIP UMP.

Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019). 2015. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Madu, Ludiro, Aryanta Nugraha, Nikolaus Lay dan Fauzan. 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan, dan Pilihan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Marwasta, Djaka. 2016. Pendampingan pengelolaan wilayah perbatasan di Indonesia: Lesson learned dari kkn-ppm ugm di kawasan perbatasan. *Indonesian Journal of Community Engagement*, 1 (2): 204-216.

- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulki. 2015. *Analisis Sosial Ekonomi Pengembangan Infrastruktur Jalan di Kawasan Perbatasan (Studi Kasus Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat)*. Jakarta: Puslitbang Sosekling Kementerian PUPR RI.
- Muta'ali, Lutfi, Djaka Marwasta dan Joko Christanto. 2014. *Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 2011. *Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 (Nomor 44)*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Prasetyaningsih, Eka Dyah Wahyu dan Widjonarko. 2015. Strategi pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas salak di kecamatan madukara kabupaten banjarnegara. *Jurnal Teknik PWK*, (4) 4: 514 529.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Ridwan. 2009. Dampak integrasi ekonomi terhadap investasi di kawasan asean: Analisis model gravitasi. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, (5) 2: 95 107.
- Riyadi, D.S. 2002. *Dampak Globalisasi Ekonomi dan Kebijakan Regionalisasi Terhadap Pengembangan Wilayah Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian

Kebijakan Pengembangan Wilayah (P2KTPW-BPPT).

Setiono, Dedi NS. 2011. *Ekonomi Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

. 2011.

Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.

Tim Pusat Studi Pancasila UGM. 2015. *Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T)*. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada.

Triutomo, Sugeng. 2001. *Pengembangan Wilayah Melalui Pembentukan Kawasan Ekonomi Terpadu dalam Tiga Pilar Pengembangan Wilayah*. Jakarta: BPPT.

Yulianti, Mira. Penentuan prioritas unggulan buah-buahan di kabupaten minahasa utara provinsi sulawesi utara: Aplikasi analisis lq dan daya tarik-daya saing. *Jurnal Agribisnis Perdesaan*, (1) 3: 206-221.

Warsilan dan Akhmad Noor. 2015. Peranan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan implikasi pada kebijakan pembangunan di kota samarinda. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, (31) 2: 359-366.

Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Peneliti*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

